



**KABUPATEN BEKASI**

**2024**  
**TRIWULAN IV**



# **LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 2

KATA PENGANTAR..... 3

BAB I PENDAHULUAN ..... 4

1.1. LATAR BELAKANG..... 4

1.2. DASAR HUKUM..... 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..... 8

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN ..... 8

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI..... 10

2.1. TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BEKASI .....10

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024.....13

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024.....23

BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024..... 28

3.1 CAPAIAN KINERJA TUJUAN .....28

3.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN .....29

3.3. CAPAIAN KINERJA TEMATIK.....30

3.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN..... 167

3.5. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
PROVINSI DAN NASIONAL ..... 173

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA..... 291

4.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....291

4.2 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN RKPD BERIKUTNYA.....313

BAB V PENUTUP ..... 315

5.1 KESIMPULAN.....315

5.2 REKOMENDASI.....315



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati Bekasi melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten Bekasi, antarkabupaten/kota dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dilakukan secara berkala setiap triwulan. Penyusunan laporan tersebut diformulasikan berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Kabupaten Bekasi yang disampaikan kepada Bappeda secara berkala setiap triwulan juga. Laporan ini merupakan hasil pencermatan dari tim pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2024 yang meliputi:

- 1) Penelaahan terhadap realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Bekasi.
- 2) Penelaahan realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kabupaten Bekasi.

Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai masukan/acuan guna percepatan pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2024.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Cikarang, Desember 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Bekasi,



**AGUS BUDIONO, S.STP, M.Tr.I.P.**

NIP. 198311172002121001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Ginjar Kartasmita, 1994). Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perencanaan pembangunan dalam lingkup waktu dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang baik mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) Politik;
- 2) Teknokratik;
- 3) Partisipatif;
- 4) Atas-bawah (top-down); dan
- 5) Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah proses penyusunan rencana karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon bupati. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten, provinsi dan nasional.



Penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (3) juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.

RKPD disusun melalui tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang, perumusan rancangan akhir, fasilitasi gubernur, serta penetapan.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. Evaluasi yang dimaksud, dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bekasi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah Propinsi Jawa Barat.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan evaluasi RKPD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 antaran lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan



- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017





11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun



- 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 195);
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2018)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2024 dimaksudkan untuk menilai hasil pelaksanaan RKPD di lingkup wilayah Kabupaten Bekasi dan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya yang telah disusun dalam RKPD sesuai dengan pelaksanaan APBD.

### **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan





## **BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI**

- 2.1 Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bekasi**
- 2.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024**
- 2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024**

## **BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

- 3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro**
- 3.2 Capaian Kinerja Tematik**
- 3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan**
- 3.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Tabel Evaluasi RKPD)**

## **BAB I FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

- 4.1 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja**
- 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya**

## **BAB V PENUTUP**

- 5.1 Kesimpulan**
- 5.2 Rekomendasi**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI**

#### **2.1. TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BEKASI**

##### **2.1.1. TUJUAN KABUPATEN BEKASI**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dijelaskan sasaran pembangunan daerah untuk RPJMD tahap ke lima (Tahun 2022-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dan unggul melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Berdasarkan hal tersebut, sektor ekonomi menjadi fokus utama pembangunan daerah dengan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah yang bersifat komparatif baik dalam skala regional maupun nasional. Memperhatikan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bekasi baik secara geografis, sosial maupun infrastruktur yang memadai untuk terus tumbuh dan berkembang secara perekonomian, sektor ekonomi didorong sebagai penopang utama pembangunan daerah dengan didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten Bekasi juga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan hasil analisa isu-isu strategis serta evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, sektor utama pembangunan yang terdampak dan memberikan pengaruh cukup luas yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun indikator dan target kedua tujuan di atas untuk tahun 2024 dengan mempertimbangkan target nasional untuk Jawa Barat untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1 Indikator dan Target Tujuan Daerah  
Kabupaten Bekasi Tahun 2024**

| No | TUJUAN DAERAH  | INDIKATOR                      | SATUAN | TARGET    |
|----|--|--------------------------------|--------|-----------|
|    |  |                                |        | 2024      |
| 1  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin     | Persen | 4,66      |
| 2  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah                            | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 4,7 – 5,3 |

2.1.2. SASARAN KABUPATEN BEKASI

Berdasarkan isu strategis dan tujuan yang telah ditetapkan di atas, kemudian ditetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari siklus kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu bersaing dalam upaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pada akhirnya masyarakat miskin tidak dapat keluar dari siklus kemiskinan. Oleh sebab itu, dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mencegah timbulnya masyarakat miskin baru, maka intervensi utama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia.
2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi dimana tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Dengan kemudahan akses transportasi dan komunikasi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi tidak hanya bersaing dengan angkatan kerja dari daerah lain saja, melainkan juga akan bersaing dengan angkatan kerja yang berasal dari luar negeri, terutama pada sektor-sektor yang pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. Oleh karenanya, diperlukan adanya intervensi untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru serta penyiapan angkatan kerja agar dapat berdaya saing dalam pencarian kerja.



3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik  
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam mendorong perekonomian daerah diperlukan mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta kepada pemerintah yang pada akhirnya dapat mendorong masuknya investasi serta pembukaan bisnis baru dan usaha di Kabupaten Bekasi.
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah  
Faktor lainnya yang dapat diintervensi oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur dan konektivitas wilayah. Pengeluaran pemerintah yang besar di infrastruktur pelayanan publik dapat meningkatkan nilai PDRB kabupaten. Sementara konektivitas antarwilayah yang baik akan memudahkan akses barang dan jasa, yang dapat menurunkan biaya transportasi serta menurunkan biaya operasional keseluruhan sehingga akan menarik investasi dan bisnis untuk masuk dan berkembang.
5. Terwujudnya kondusifitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi  
Kondisi lainnya yang diperlukan untuk mendorong perkembangan bisnis dan usaha adalah kondusifitas wilayah. Bencana atau kerusakan yang terjadi tiap hari tentunya akan menghalangi jalannya bisnis dan usaha masyarakat. Kebijakan pembatasan yang ketat selama 2 tahun terakhir telah membuktikan bagaimana banyak perusahaan dan bisnis yang gulung tikar akibat omset yang diterima perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasional yang besar dengan menurunnya produktivitas serta permintaan konsumen. Oleh karenanya, kondusifitas wilayah sangat diperlukan untuk menciptakan stabilisasi ekonomi agar dapat mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih cepat.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  
Dalam menunjang perekonomian daerah, faktor penunjang lain yang tidak kalah penting adalah kualitas lingkungan hidup. Dengan semakin padatnya penduduk serta banyaknya aktivitas, kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Apalagi orientasi yang cenderung kepada profit seringkali melupakan dampaknya terhadap lingkungan sehingga diperlukan adanya intervensi pemerintah agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin merosot di masa yang akan datang. Degradasi kualitas lingkungan hidup pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya bencana baru yang akan mempengaruhi



kondusIitas wilayah. Selain itu dengan kualitas lingkungan hidup yang baik, masyarakat dapat melakukan aktIitas ekonominya dengan nyaman yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan. Daya dukung lingkungan juga dibutuhkan untuk usaha dalam skala besar. Untuk itu, kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung upaya mewujudkan kondusIitas wilayah.

Indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024**

| No | TUJUAN DAERAH   | INDIKATOR                          | SATUAN | TARGET |
|----|---|------------------------------------|--------|--------|
|    |   |                                    |        | 2024   |
| 1  | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia                           | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | Poin   | 76,43  |
| 2  | Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja         | Tingkat Pengangguran Terbuka       | Persen | 8,76   |
| 3  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi         | Poin   | 73,99  |
| 4  | Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah   | Tingkat Konektivitas Antar Wilayah | Persen | 63,36  |
| 5  | Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi   | Indeks Resiko Bencana              | Poin   | 113,46 |
|    |   | Indeks Demokrasi                   | Poin   | 83,5   |
|    |   | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Poin   | 85,75  |
| 6  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                              | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | Poin   | 45,02  |

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sasaran daerah, selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024, maka prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN BEKASI TRIWULAN IV TAHUN 2024



## **I. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar
- b. Mendorong peningkatan Pendidikan masyarakat melalui Pendidikan non formal dan kesetaraan
- c. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan dasar negeri
- e. Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan
- f. Mendorong sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar untuk menerapkan kurikulum berbasis muatan lokal
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar nasional pendidikan
- h. Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk membaca melalui peningkatan kualitas perpustakaan
- i. Melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno
- j. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada satuan kesehatan
- k. Meningkatkan pengawasan atas usaha kefarmasian, alat kesehatan, produk makanan, dan usaha pengelolaan makanan agar memenuhi standar kesehatan
- l. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat
- m. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- n. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada satuan kesehatan
- o. Mengoptimalkan peran desa, kecamatan, dan posyandu dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- p. Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit
- q. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah
- r. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pada satuan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan
- s. Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perluasan fasilitas umum





- t. Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kosong untuk memenuhi kebutuhan TPU
- u. Melakukan mediasi atas sengketa tanah milik pemerintah daerah
- v. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- w. Meningkatkan cakupan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat
- x. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian layanan air minum perpipaan
- y. Menyelesaikan penanganan kawasan kumuh pada wilayah yang belum tertangani
- z. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pada daerah yang berpotensi menjadi kumuh
- aa. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga
- bb. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka olahraga
- cc. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM keolahragaan
- dd. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pertanian yang digunakan oleh petani untuk mendorong peningkatan produksi pertanian
- ee. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha obat hewan
- ff. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani
- gg. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- hh. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- ii. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertanian
- jj. Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian
- kk. Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan, pengelolaan TPI, serta pengendalian dan pengawasan perizinan kapal perikanan
- ll. Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui bantuan sarana prasarana perikanan budidaya, pengembangan kapasitas petani ikan, serta pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan



- mm. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan
- nn. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk tertib ukur
- oo. Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang ekspor
- pp. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- qq. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting
- rr. Mendorong diversifikasi pangan dan meningkatkan ketersediaan cadangan pangan pokok daerah
- ss. Mendistribusikan cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan
- tt. Meningkatkan ketersediaan serta kualitas infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan daerah
- uu. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuh
- vv. Mengoptimalkan pengendalian penduduk melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan
- ww. Mengoptimalkan pengendalian penduduk melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan data kependudukan
- xx. Mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga
- yy. Mendorong peningkatan peserta KB aktif dan baru melalui optimalisasi pelayanan KB
- zz. Mendorong peningkatan kepatuhan dan ketertiban desa dalam pengelolaan keuangan desa
- aaa. Mendorong peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa
- bbb. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa dalam administrasi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset desa
- ccc. Membantu desa dalam melakukan penataan desa
- ddd. Mendorong pembentukan kawasan perdesaan
- eee. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum ada
- fff. Mendorong pencapaian target indikator PUG
- ggg. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan



- hhh. Mendorong peningkatan kualitas ketahanan keluarga
- iii. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan data
- jjj. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak
- kkk. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus anak
- III. Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, keluarga pahlawan, dan janda PKRI melalui pemberdayaan sosial dan pemberian santunan
- mmm. Meningkatkan cakupan bantuan dan kualitas layanan sosial bagi warga negara migran korban kekerasan
- nnn. Meningkatkan kualitas dan cakupan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
- ooo. Meningkatkan kualitas dan cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
- ppp. Meningkatkan kualitas pengelolaan data fakir miskin
- qqq. Mendorong peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui pembinaan
- rrr. Meningkatkan cakupan bantuan bagi korban bencana
- sss. Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan kewirausahaan
- ttt. Mendorong peningkatan pemuda berprestasi
- uuu. Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan
- vvv. Mengembangkan budaya daerah dan kesenian tradisional
- www. Meningkatkan kompetensi SDM sejarah lokal
- xxx. Melestarikan cagar budaya daerah
- yyy. Meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap sejarah daerah

## **II. Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja**

- a. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM pariwisata
- b. Meningkatkan kinerja promosi pariwisata untuk menarik wisatawan
- c. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual
- d. Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
- e. Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam
- f. Mendorong pertumbuhan koperasi sehat melalui penilaian kesehatan, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi



- g. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- h. Mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- i. Mendorong pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing UMKM
- j. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif melalui kebijakan yang jelas dan terarah
- k. Meningkatkan kinerja promosi penanaman modal untuk mendorong masuknya investasi
- l. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- m. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi, perencanaan, pembangunan dan pengembangan industri yang menjadi kewenangan kabupaten
- n. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian
- o. Mendorong peningkatan ekspor produk UMKM lokal
- p. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan
- q. Meningkatkan layanan administrasi penunjang ekspor
- r. Membantu penempatan pencari kerja terdaftar
- s. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penyampaian informasi kesempatan kerja kepada masyarakat
- t. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan membantu mewujudkan iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan dan tenaga kerja
- u. Meningkatkan kompetensi pencari kerja agar dapat memenuhi standar perusahaan melalui pelatihan
- v. Meningkatkan kerjasama di bidang transmigrasi

### **III. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. Meningkatkan kualitas integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah
- b. Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- c. Meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah



- d. Mendorong tindak lanjut rekomendasi perbaikan program dan kegiatan
- e. Mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan
- f. Mendorong peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
- h. Meningkatkan kapabilitas APIP
- i. Mendorong penerapan SPIP sampai ke tingkat perangkat daerah
- j. Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan mendorong pengadaan ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel
- k. Meningkatkan kinerja pengelolaan data dan sistem informasi ASN
- l. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja serta reward and punishment bagi ASN
- m. Mendorong pejabat struktural, fungsional dan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi
- n. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- o. Mendorong peningkatan kerjasama dalam penyelesaian permasalahan pembangunan
- p. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi
- q. Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan
- r. Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa
- s. Meningkatkan kualitas layanan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah
- t. Meningkatkan kualitas penguatan organisasi, pelayanan publik, ketatalaksanaan, dan manajemen perubahan pada perangkat daerah
- u. Mendorong pelaksanaan dan pengembangan rencana inovasi yang telah disusun
- v. Mendorong tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan
- w. Meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah daerah
- x. Meningkatkan kinerja layanan media informasi dan komunikasi publik
- y. Meningkatkan kinerja pengelolaan, pengolahan, dan analisa data statistik sektoral



- z. Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat perangkat daerah
- aa. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha
- bb. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
- cc. Mendorong peningkatan tertib arsip pada perangkat daerah
- dd. Menindaklanjuti permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat
- ee. Meningkatkan tertib administrasi pada pemerintah desa dan kelurahan
- ff. Meningkatkan kualitas dan cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- gg. Mencegah timbulnya konflik sosial ekonomi melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum
- hh. Meningkatkan kualitas penyusunan penganggaran belanja daerah
- ii. Mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah
- jj. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan barang milik daerah
- kk. Menyusun rencana optimalisasi potensi pendapatan asli daerah
- ll. Meningkatkan kinerja penagihan pajak daerah
- mm. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi wajib pajak daerah
- nn. Mendorong sertifikasi laik fungsi bagi gedung milik pemerintah
- oo. pemerintah Program Penataan Bangunan Gedung Persentase SLF yang diterbitkan 32% 4.900.000.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Meningkatkan layanan persetujuan bangunan gedung
- pp. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan jasa konstruksi
- qq. Meningkatkan kondisi bangunan negara lainnya melalui penataan bangunan dan lingkungan.

#### IV. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan desa
- c. Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan desa untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan melalui rekayasa lalu lintas dan penyediaan perlengkapan jalan





- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan perumahan
- e. Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan perumahan untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan
- f. Meningkatkan pemenuhan perlengkapan jalan penghubung antarpermukiman dan jalan perumahan serta fasilitas penunjang lainnya
- g. Menyediakan kebutuhan lahan untuk meningkatkan kapasitas jalan
- h. Meningkatkan kinerja layanan pengujian berkala kendaraan bermotor
- i. Meningkatkan ketersediaan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan
- j. Menurunkan derajat kejenuhan jalan

#### **V. Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilitas Ekonomi**

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana
- b. Meningkatkan kualitas kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana
- c. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan sarana prasarana pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran
- d. Meningkatkan kinerja penanganan banjir dan kekeringan
- e. Membangun dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai
- f. Meningkatkan cakupan penanganan rumah korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- g. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pencegahan konflik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- h. Mengoptimalkan peran DPRD melalui dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- i. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah
- j. Meningkatkan kinerja pengamanan lingkungan
- k. Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik melalui pemberdayaan dan pengawasan



- l. Melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi tokoh agama dan/atau penghayat kepercayaan
- m. Meningkatkan kerjasama antarinstansi di daerah untuk mencegah terjadinya konflik agama dan sosial
- n. Meningkatkan pemahaman mengenai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

## **VI. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan**

- a. Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan
- b. Meningkatkan kinerja pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis
- c. Menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Melakukan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- e. Meningkatkan dan menjaga luasan ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara dan melestarikan habitat keanekaragaman hayati
- f. Meningkatkan kinerja pengendalian pengelolaan limbah B3
- g. Mendorong peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan persampahan secara mandiri melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan bagi masyarakat
- i. Menindaklanjuti pengaduan kasus lingkungan
- j. Meningkatkan kinerja layanan air limbah domestik kepada masyarakat
- k. Membantu penyediaan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk buang air besar sembarangan
- l. Meningkatkan kualitas rencana umum dan rinci tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan
- m. Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah



### 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 140 program, yang terdiri dari 1 program non urusan/unsur dan 139 program urusan/unsur. Jumlah program ini tidak memperhatikan perangkat daerah pelaksana sehingga program yang sama dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah akan dihitung sebanyak 1 (satu) kali. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pembinaan Perpustakaan
5. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
13. Program Penatagunaan Tanah
14. Program Pengelolaan Tanah Kosong
15. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
16. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
18. Program Kawasan Permukiman
19. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
20. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
22. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
23. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
24. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
25. Program Perizinan Usaha Pertanian
26. Program Penyuluhan Pertanian



27. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
28. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
29. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
30. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
31. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
32. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
33. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
34. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
35. Program Penanganan Kerawanan Pangan
36. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
37. Program Pengawasan Keamanan Pangan
38. Program Pengendalian Penduduk
39. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
40. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
41. Program Administrasi Pemerintahan Desa
42. Program Penataan Desa
43. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
44. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
45. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
46. Program Perlindungan Perempuan
47. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
48. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
49. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
50. Program Perlindungan Khusus Anak
51. Program Pemberdayaan Sosial
52. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
53. Program Rehabilitasi Sosial
54. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
55. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
56. Program Penanganan Bencana
57. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
58. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
59. Program Pengembangan Kebudayaan
60. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



61. Program Pembinaan Sejarah
62. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
63. Program Pengelolaan Permuseuman
64. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
65. Program Pemasaran Pariwisata
66. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
67. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
68. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
69. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
70. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
71. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
72. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
73. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
74. Program Pengembangan UMKM
75. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
76. Program Promosi Penanaman Modal
77. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
78. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
79. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
80. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
81. Program Pengembangan Ekspor
82. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
83. Program Penempatan Tenaga Kerja
84. Program Hubungan Industrial
85. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
86. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
87. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
88. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
89. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
90. Program Perekonomian dan Pembangunan
91. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
92. Program Pendaftaran Penduduk
93. Program Pencatatan Sipil
94. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



95. Program Penyelenggaraa n Pengawasan
96. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
97. Program Kepegawaian Daerah
98. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
99. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
100. Program Perekonomian dan Pembangunan
101. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
102. Program Perekonomian dan Pembangunan
103. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
104. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
105. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
106. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
107. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
108. program pelayanan penanaman modal
109. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
110. program pengelolaan arsip
111. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
112. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
113. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
114. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
115. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
116. program pengelolaan keuangan daerah
117. Program pengelolaan Barang Milik daerah
118. Program pengelolaan pendapatan daerah
119. program penataan bangunan gedung
120. program pengembangan jasa kontruksi
121. program penataan bangunan dan lingkungannya
122. program penyelenggaraan jalan
123. program pengembangan permukiman
124. program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
125. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
126. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
127. Program penanggulangan bencana
128. program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran





129. program pengelolaan sumber daya air (SDA)
130. program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
131. program pengembangan perumahan
132. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
133. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
134. program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
135. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
136. program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
137. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
138. program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
139. program pengelolaan persampahan
140. program perencanaan lingkungan hidup
141. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
142. program pengelolaan keaneka ragaman hayati
143. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
144. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
145. program peningkatan pendidikan dan pelatihan dan penyluhuna lingkungan hidup untuk masyarakat
146. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
147. program penangan pengaduan lingkungan hidup
148. program pengelolaan dan pengembangan sistem sistem air limbah
149. program penyelenggaraan penataan ruang

Sementara itu, kegiatan yang direncanakan pada 60 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 913 kegiatan dengan kegiatan yang termasuk ke dalam program urusan/unsur sebanyak 483 kegiatan, dan 430 kegiatan lainnya termasuk ke dalam program non urusan/non unsur. Sedangkan subkegiatan yang direncanakan adalah sebanyak 2.663 subkegiatan dengan jumlah subkegiatan urusan/unsur sebanyak 1.356 subkegiatan, dan non urusan/non unsur sebanyak 1.307 subkegiatan. Jumlah kegiatan dan subkegiatan ini tidak memperhitungkan double kegiatan atau subkegiatan yang dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yang sama karena keberadaan subunit organisasi sehingga judul kegiatan/subkegiatan yang double akan dihitung 1 (satu) kali. Jumlah program, kegiatan, maupun subkegiatan di atas dapat mengalami pengurangan, menyesuaikan

LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN BEKASI TRIWULAN IV TAHUN 2024



dengan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2024 dan penyempurnaan lainnya di tahap penganggaran.

**BAB III**

**CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

**3.1 CAPAIAN KINERJA TUJUAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan hasil analisa isu-isu strategis serta evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, sektor utama pembangunan yang terdampak dan memberikan pengaruh cukup luas yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu:

- 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan
- 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Tujuan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Tujuan beserta capaian kinerja tujuan Kabupaten Bekasi tersebut dijabarkan ke dalam Tabel 3.1. sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Tingkat Capaian Kinerja Tujuan Kabupaten Bekasi Tahun 2024**

| No | TUJUAN DAERAH  | INDIKATOR                      | SATUAN | TARGET    | CAPAIAN |
|----|--|--------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |  |                                |        | 2024      | 2024    |
| 1  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin     | Persen | 4,66      | 4,8     |
| 2  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah                            | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 4,7 – 5,3 | 5,34    |

Hasil capaian kinerja tujuan pembangunan daerah “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan” sampai dengan Triwulan 4 Tahun Anggaran 2024 sebesar 4,80% telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menekan angka penduduk miskin di Kabupaten Bekasi. Sejalan dengan keberhasilan tersebut, hasil capaian kinerja tujuan pembangunan daerah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah” sampai dengan Triwulan 4 Tahun Anggaran 2024 sebesar 5,34% telah mencapai target yang telah ditetapkan.



3.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
- 2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja
- 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- 4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah
- 5. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi

Indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk Tahun 2024 dan capaiannya dapat dilihat melalui Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Bekasi Tahun 2024

| No | TUJUAN DAERAH   | INDIKATOR                          | SATUAN | TARGET | CAPAIAN |
|----|---|------------------------------------|--------|--------|---------|
|    |   |                                    |        | 2024   | 2024    |
| 1  | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia                           | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | Poin   | 76,43  | 76,8    |
| 2  | Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja         | Tingkat Pengangguran Terbuka       | Persen | 8,76   | 8,82    |
| 3  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi         | Poin   | 73,99  | 75,41   |
| 4  | Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah   | Tingkat Konektivitas Antar Wilayah | Persen | 63,36  | 65,846  |
| 5  | Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi   | Indeks Resiko Bencana              | Poin   | 113,46 | 106,39  |
|    |   | Indeks Demokrasi                   | Poin   | 83,5   | 83,52   |
|    |   | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Poin   | 85,75  | 85,916  |



| No | TUJUAN DAERAH                          | INDIKATOR                        | SATUAN | TARGET | CAPAIAN |
|----|--|----------------------------------|--------|--------|---------|
|    |  |                                  |        | 2024   | 2024    |
| 6  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin   | 45,02  | 49,36   |

3.3. CAPAIAN KINERJA TEMATIK

Sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024, adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.

- Terdapat empat fokus RB Tematik yang ditetapkan saat ini, antara lain:
1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan;
  2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*);
  3. Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting; dan
  4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Fokus RB tematik tersebut didukung pelaksanaannya melalui sejumlah program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKPD. Evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengukur kinerja pencapaian target berdasarkan rentang selisih nilai antara realisasi capaian pada tahun berjalan terhadap target



capaian yang ditetapkan dalam RPD untuk tahun berjalan (2024) dan tahun terakhir periode RPD.

Pencapaian kinerja tematik tersebut sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut sebagai berikut:

#### 1. Pengentasan Kemiskinan

Kinerja tematik pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan yang diampu oleh beberapa Perangkat Daerah dengan kelompok program, antara lain:

1. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
  - a. Dinas Sosial
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
  - c. Dinas kesehatan
  - d. Dinas Pendidikan
  - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - b. Dinas Pertanian
  - c. Dinas Ketenagakerjaan
  - d. Dinas Pariwisata
  - e. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
  - f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
  - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  - h. Dinas Sumber Daya Air, Binamarga dan Bina Kontruksi
3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
  - a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - b. Dinas Perindustrian
  - c. Dinas Perdagangan

Terkait capaian kinerja tematik Pengentasan Kemiskinan dijabarkan ke dalam Tabel 3.2.

#### 2. Penanganan Stunting

Kinerja tematik selanjutnya yaitu Penanganan Stunting yang diampu oleh beberapa Perangkat Daerah, diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Lingkungan Hidup. Terkait capaian kinerja tematik Penanganan Stunting dijabarkan ke dalam Tabel 3.3.



### 3. Standar Pelayanan Minimal

Kinerja tematik terakhir yaitu terkait Standar Pelayanan Minimal yaitu urusan wajib pelayanan dasar antara lain urusan pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan pekerjaan Umum, urusan Perumahan Rakyat, urusan trantibumlinmas dan urusan sosial yang diampu oleh beberapa Perangkat Daerah, diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Binamarga dan Bina Kontruksi, Dinas Sosial, Dinas Pemadam kebakaran dan Dinas Satpol PP. Terkait capaian kinerja tematik Standar Pelayanan Minimal dijabarkan ke dalam Tabel 3.4.





Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tematik Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bekasi

| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                        |               |                 |                |                  |
|-------------------------------|--|--|------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| KODE                          | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.)                                 | REAL. KEUANGAN         |               | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK    |                  |
|                               |  |  | (Rp.)                  | (%)           |                 | K              | (%)              |
| 1                             | 2  | 4  | 5                      | 6             | 7               | 8              | 6                |
| 2.08                          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  | 1.055.863.900,00                                   | 951.918.101,00         | 90,16         | 0,00            | 0,00           | 100,00           |
| 2.08.01                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 280.932.200,00                                     | 258.971.641,00         | 92,18         | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 2.08.01.2.08                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 280.932.200,00                                     | 258.971.641,00         | 92,18         | 0,00            | 0,00           | 100,00           |
| 2.08.01.2.08.0003             | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 280.932.200,00<br>0,00                             | 258.971.641,00<br>0,00 | 92,18<br>0,00 | 0,00<br>1,00    | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00 |
| 2.08.02                       | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  | 257.027.500,00                                     | 213.285.360,00         | 82,98         | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 2.08.02.2.03                  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 257.027.500,00                                     | 213.285.360,00         | 82,98         | 0,00            | 0,00           | 100,00           |
| 2.08.02.2.03.0005             | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>- Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di Bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum Pd LPLPP tingkat Kab/Kota | 257.027.500,00<br>0,00                             | 213.285.360,00<br>0,00 | 82,98<br>0,00 | 0,00<br>220,00  | 0,00<br>220,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.08.03                       | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | 69.020.000,00                                      | 65.217.500,00          | 94,49         | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 2.08.03.2.03                  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 69.020.000,00                                      | 65.217.500,00          | 94,49         | 0,00            | 0,00           | 100,00           |
| 2.08.03.2.03.0002             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 69.020.000,00                                      | 65.217.500,00          | 94,49         | 0,00            | 0,00           | 100,00           |

|                   |  |                       |                       |              |             |             |               |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 52,00       | 52,00       | 100,00        |
| 2.08.06           | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Nilai Capaian Kluster KLA  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
| 2.08.07           | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>  | <b>448.884.200,00</b> | <b>414.443.600,00</b> | <b>92,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | 101.500.000,00        | 81.765.000,00         | 80,56        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Fasilitasi Advokasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 300,00      | 300,00      | 100,00        |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA   | 101.500.000,00        | 81.765.000,00         | 80,56        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah SDM yang Memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan Pencegahan KTA   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 300,00      | 300,00      | 100,00        |
| 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | 234.530.000,00        | 232.447.000,00        | 99,11        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 234.530.000,00        | 232.447.000,00        | 99,11        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 30,00       | 30,00       | 100,00        |
| 2.08.07.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 112.854.200,00        | 100.231.600,00        | 88,82        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota   | 112.854.200,00        | 100.231.600,00        | 88,82        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah KIE perlindungan khusus anak  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   |  |                       |                       |              |             |             |               |

|        |                  |                |       |  |  |        |
|--------|------------------|----------------|-------|--|--|--------|
| JUMLAH | 1.055.863.900,00 | 951.918.101,00 | 90,16 |  |  | 100,00 |
|--------|------------------|----------------|-------|--|--|--------|

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

| KODE              | URAIAN   | LOKASI | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN   |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |       |
|-------------------|--|--------|--------------------|------------------|-------|-----------------|-------------|-------|
|                   |  |        |                    | (Rp.)            | (%)   |                 | K           | (%)   |
| 1                 | 2  | 3      | 4                  | 5                | 6     | 7               | 8           | 6     |
| 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  |        | 2.147.109.000,00   | 1.983.613.144,00 | 92,39 | 0,00            | 0,00        | 65,08 |
| 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  |        | 2.147.109.000,00   | 1.983.613.144,00 | 92,39 | 0,00            | 0,00        | 0,00  |
|                   | - Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan Sosial dan bantuan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |        | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 20,00           | 0,00        | 0,00  |
| 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial   |        | 2.147.109.000,00   | 1.983.613.144,00 | 92,39 | 0,00            | 0,00        | 97,61 |
|                   | - Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar   |        | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 2.620,00        | 2.567,00    | 97,98 |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan  |        | 2.147.109.000,00   | 1.983.613.144,00 | 92,39 | 0,00            | 0,00        | 97,25 |
|                   | - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  |        | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 1.929,00        | 1.876,00    | 97,25 |
|                   |  |        |                    |                  |       |                 |             |       |
| JUMLAH            |  |        | 2.147.109.000,00   | 1.983.613.144,00 | 92,39 |                 |             | 65,08 |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

| KODE | URAIAN | LOKASI |  | REAL. KEUANGAN |  | REAL. FISIK |
|------|--------|--------|--|----------------|--|-------------|
|------|--------|--------|--|----------------|--|-------------|

|                   |  |   | PAGU DANA<br>(Rp.)        | (Rp.)                     | (%)          | TARGET<br>FISIK | K             | (%)           |
|-------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1                 | 2  | 3 | 4                         | 5                         | 6            | 7               | 8             | 6             |
| 1.02              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |   | <b>387.887.321.685,00</b> | <b>379.092.268.882,00</b> | <b>97,73</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <b>102,08</b> |
| 1.02.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   |   | <b>9.687.212.273,00</b>   | <b>8.900.000.000,00</b>   | <b>91,87</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <b>100,00</b> |
|                   | - <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>   |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>23,40</i>    | <i>23,40</i>  | <i>100,00</i> |
| 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   | 9.687.212.273,00          | 8.900.000.000,00          | 91,87        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
| 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |   | 9.687.212.273,00          | 8.900.000.000,00          | 91,87        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan</i>                                 |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>44,00</i>    | <i>44,00</i>  | <i>100,00</i> |
| 1.02.02           | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                             |   | <b>376.229.167.112,00</b> | <b>368.276.481.082,00</b> | <b>97,89</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <b>109,09</b> |
|                   | - <i>Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit dan FKTP sesuai standar</i> |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Kabupaten/ Kota Sehat</i>   |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>1,00</i>     | <i>2,00</i>   | <i>200,00</i> |
|                   | - <i>Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar</i>                          |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>             |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase warga negara usia 60 tahun Ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>     |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase kasus Penyakit Menular &amp; Penyakit Tidak menular yang berhasil tertangani</i>               |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Prevalensi stunting</i>   |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>12,00</i>    | <i>12,00</i>  | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase desa yang melaksanakan STBM</i>  |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>90,00</i>    | <i>90,00</i>  | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer dan sekunder sesuai standar</i>  |   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>85,00</i>    | <i>85,00</i>  | <i>100,00</i> |

|                   |   |  |                    |                    |       |            |            |        |
|-------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------|------------|------------|--------|
|                   | - Jumlah Angka Kematian Ibu   |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 9,00       | 9,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Angka Kematian Bayi  |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    |  | 376.229.167.112,00 | 368.276.481.082,00 | 97,89 | 0,00       | 0,00       | 96,67  |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   |  | 1.438.936.320,00   | 1.421.993.720,00   | 98,82 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 76.000,00  | 76.000,00  | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                              |  | 168.000.000,00     | 160.600.000,00     | 95,60 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  |  | 128.000.000,00     | 126.026.000,00     | 98,46 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar       |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 253.000,00 | 253.000,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                              |  | 6.717.544.100,00   | 6.589.914.200,00   | 98,10 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                      |  | 90.000.000,00      | 89.809.080,00      | 99,79 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga               |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 2,00       | 2,00       | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   |  | 425.679.850,00     | 416.760.000,00     | 97,90 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan                          |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 1,00       | 1,00       | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  |  | 367.122.768.842,00 | 359.408.773.082,00 | 97,90 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                         |  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 2,00       | 2,00       | 100,00 |

|                   |  |  |                         |                         |              |        |        |               |
|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|---------------|
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional<br>- <i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Ke Laboratorium Rujukan / Nasional Yang Didistribusikan</i> |  | 88.032.000,00           | 23.194.000,00           | 26,35        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00   | 1,00   | 100,00        |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>- <i>Jumlah Dokuomen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>  |  | 17.350.000,00           | 7.150.000,00            | 41,21        | 0,00   | 0,00   | 66,67         |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00   | 2,00   | 66,67         |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak<br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak</i>   |  | 32.856.000,00           | 32.261.000,00           | 98,19        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00   | 1,00   | 100,00        |
| 1.02.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b><br>- <i>Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat uji kompetensi</i>   |  | <b>1.630.942.300,00</b> | <b>1.578.203.200,00</b> | <b>96,77</b> | 0,00   | 0,00   | <b>100,00</b> |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00        |
| 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  |  | 241.340.000,00          | 231.287.600,00          | 95,83        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>- <i>Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>   |  | 241.340.000,00          | 231.287.600,00          | 95,83        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 93,00  | 93,00  | 100,00        |

|                   |  |  |                  |                  |       |        |        |        |
|-------------------|--|--|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  | 1.389.602.300,00 | 1.346.915.600,00 | 96,93 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i></li> </ul>   |  | 1.389.602.300,00 | 1.346.915.600,00 | 96,93 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 490,00 | 490,00 | 100,00 |
| 1.02.04           | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Persentase usaha Kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan yang memenuhi standar</i></li> <li>- <i>Persentase usaha pengelolaan makanan berizin yang sesuai standar</i></li> </ul>   |  | 340.000.000,00   | 337.584.600,00   | 99,29 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   |  | 120.000.000,00   | 119.708.600,00   | 99,76 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatah dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i></li> </ul> |  | 120.000.000,00   | 119.708.600,00   | 99,76 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |

|                                      |  |               |                           |                           |              |                    |        |               |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------|---------------|
| 1.02.04.2.02                         | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga   |               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00   | 100,00        |
| 1.02.04.2.02.0001                    | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga<br>- <i>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>   |               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00   | 100,00        |
|                                      |  |               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00   | 100,00        |
| 1.02.04.2.03                         | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  |               | 140.000.000,00            | 139.094.000,00            | 99,35        | 0,00               | 0,00   | 100,00        |
| 1.02.04.2.03.0001                    | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga<br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i> |               | 140.000.000,00            | 139.094.000,00            | 99,35        | 0,00               | 0,00   | 100,00        |
|                                      |  |               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 2,00               | 2,00   | 100,00        |
| 1.02.04.2.04                         | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)   |               | 80.000.000,00             | 78.782.000,00             | 98,48        | 0,00               | 0,00   | 100,00        |
| 1.02.04.2.04.0001                    | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)<br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>   |               | 80.000.000,00             | 78.782.000,00             | 98,48        | 0,00               | 0,00   | 100,00        |
|                                      |  |               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 250,00             | 250,00 | 100,00        |
| <b>JUMLAH</b>                        |  |               | <b>387.887.321.685,00</b> | <b>379.092.268.882,00</b> | <b>97,73</b> |                    |        | <b>102,08</b> |
| <b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :</b> |  |               | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>   |                           |              |                    |        |               |
| <b>KODE</b>                          | <b>URAIAN</b>  | <b>LOKASI</b> |                           | <b>REAL. KEUANGAN</b>     |              | <b>REAL. FISIK</b> |        |               |



|                   |  |   | PAGU DANA<br>(Rp.)            | (Rp.)                         | (%)                   | TARGET<br>FISIK              | K                            | (%)                     |
|-------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2  | 3 | 4                             | 5                             | 6                     | 7                            | 8                            | 6                       |
| 1.01              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>   |   | <b>373.776.964.550,00</b>     | <b>265.879.428.099,00</b>     | <b>71,13</b>          | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  | <b>91,36</b>            |
| 1.01.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   |   | <b>1.339.739.550,00</b>       | <b>1.308.802.190,00</b>       | <b>97,69</b>          | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  | <b>0,00</b>             |
| 1.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   | 57.615.550,00                 | 38.900.000,00                 | 67,52                 | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  | 66,67                   |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>- <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  |   | 57.615.550,00<br><i>0,00</i>  | 38.900.000,00<br><i>0,00</i>  | 67,52<br><i>0,00</i>  | <i>0,00</i><br><i>3,00</i>   | <i>0,00</i><br><i>2,00</i>   | 66,67<br><i>66,67</i>   |
| 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |   | 420.624.000,00                | 409.680.000,00                | 97,40                 | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  | 100,00                  |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD<br>- <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i> |   | 420.624.000,00<br><i>0,00</i> | 409.680.000,00<br><i>0,00</i> | 97,40<br><i>0,00</i>  | <i>0,00</i><br><i>2,00</i>   | <i>0,00</i><br><i>2,00</i>   | 100,00<br><i>100,00</i> |
| 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |   | 661.500.000,00                | 661.500.000,00                | 100,00                | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  | 100,00                  |
| 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>- <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>                        |   | 661.500.000,00<br><i>0,00</i> | 661.500.000,00<br><i>0,00</i> | 100,00<br><i>0,00</i> | <i>0,00</i><br><i>150,00</i> | <i>0,00</i><br><i>150,00</i> | 100,00<br><i>100,00</i> |
| 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  | 100,00                  |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>- <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>  |   | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0,00<br><i>0,00</i>   | <i>0,00</i><br><i>0,00</i>   | <i>0,00</i><br><i>0,00</i>   | 100,00<br><i>100,00</i> |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>- <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>  |   | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0,00<br><i>0,00</i>           | 0,00<br><i>0,00</i>   | <i>0,00</i><br><i>0,00</i>   | <i>0,00</i><br><i>0,00</i>   | 100,00<br><i>100,00</i> |
| 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD  |   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                  | 100,00                  |

|                   |   |  |                           |                           |              |             |             |             |
|-------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>                                       |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD                              |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD</i>      |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |  | 200.000.000,00            | 198.722.190,00            | 99,36        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      |  | 200.000.000,00            | 198.722.190,00            | 99,36        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                 |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00      |
| 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   |  | <b>371.842.690.000,00</b> | <b>264.088.265.409,00</b> | <b>71,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  |  | 256.840.620.000,00        | 188.150.661.087,00        | 73,26        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah   |  | 12.000.000.000,00         | 11.570.320.120,00         | 96,42        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>   |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 199,00      | 199,00      | 100,00      |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar  |  | 243.735.620.000,00        | 175.544.311.967,00        | 72,02        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS</i>   |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 712,00      | 712,00      | 100,00      |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik   |  | 1.105.000.000,00          | 1.036.029.000,00          | 93,76        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar</i>                            |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 212,00      | 212,00      | 100,00      |
| 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   |  | 113.189.400.000,00        | 74.687.804.322,00         | 65,98        | 0,00        | 0,00        | 80,00       |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah   |  | 9.000.000.000,00          | 6.805.730.640,00          | 75,62        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>   |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 149,00      | 149,00      | 100,00      |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                  |  | 1.500.000.000,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | - <i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima Biaya Personil Peserta Didik</i> |  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        |

|                   |  |  |                    |                   |       |        |        |        |
|-------------------|--|--|--------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| 1.01.02.2.02.0042 | <div> <div>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</div> <div> <div>- Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS</div> </div> </div>  |  | 102.539.400.000,00 | 67.734.679.682,00 | 66,06 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.02.0051 | <div> <div>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</div> <div> <div>- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</div> </div> </div> |  | 100.000.000,00     | 98.230.000,00     | 98,23 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1,00   | 1,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.02.0052 | <div> <div>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</div> <div> <div>- Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan</div> </div> </div>                                 |  | 50.000.000,00      | 49.164.000,00     | 98,33 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1,00   | 1,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   |  | 1.114.750.000,00   | 1.076.952.000,00  | 96,61 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0012 | <div> <div>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</div> <div> <div>- Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia</div> </div> </div>   |  | 186.885.000,00     | 164.500.000,00    | 88,02 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 7,00   | 7,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0013 | <div> <div>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</div> <div> <div>- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar</div> </div> </div>  |  | 377.865.000,00     | 374.521.000,00    | 99,12 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0026 | <div> <div>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</div> <div> <div>- Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</div> </div> </div>                                 |  | 550.000.000,00     | 537.931.000,00    | 97,81 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1,00   | 1,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  |  | 697.920.000,00     | 172.848.000,00    | 24,77 | 0,00   | 0,00   | 75,00  |
| 1.01.02.2.04.0010 | <div> <div>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</div> <div> <div>- Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan yang menerima biaya personal peserta didik</div> </div> </div>                           |  | 500.000.000,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                   |  |  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 310,00 | 0,00   | 0,00   |
| 1.01.02.2.04.0018 | <div> <div>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</div> <div> <div>- Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</div> </div> </div>      |  | 47.920.000,00      | 43.700.000,00     | 91,19 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  |  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                   |   |                |                |       |      |      |        |
|-------------------|---|----------------|----------------|-------|------|------|--------|
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br><div>- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</div>  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan<br><div>- Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan</div>  | 150.000.000,00 | 129.148.000,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM  | 444.933.500,00 | 336.815.000,00 | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar   | 444.933.500,00 | 336.815.000,00 | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar<br><div>- Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</div>   | 46.198.000,00  | 45.892.000,00  | 99,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar<br><div>- Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun</div>   | 398.735.500,00 | 290.923.000,00 | 72,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN<br><div>- Presentase pemenuhan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan</div>   | 149.601.500,00 | 145.545.500,00 | 97,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | 149.601.500,00 | 145.545.500,00 | 97,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br><div>- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</div> | 149.601.500,00 | 145.545.500,00 | 97,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   |   |                |                |       |      |      |        |

| JUMLAH                        |  |        | 373.776.964.550,00                     | 265.879.428.099,00 | 71,13 |                 |             | 91,36  |
|-------------------------------|--|--------|--|--------------------|-------|-----------------|-------------|--------|
| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : |  |        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                    |       |                 |             |        |
| KODE                          | URAIAN   | LOKASI | PAGU DANA<br>(Rp.)                     | REAL. KEUANGAN     |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|                               |  |        |  | (Rp.)              | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1                             | 2  | 3      | 4                                      | 5                  | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 2.13                          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                    |        | 5.719.558.819,00                       | 5.510.694.164,00   | 96,35 | 0,00            | 0,00        | 97,92  |
| 2.13.01                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    |        | 2.446.382.162,00                       | 2.281.250.814,00   | 93,25 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah                                  |        | 0,00                                   | 0,00               | 0,00  | 32,10           | 32,10       | 100,00 |
| 2.13.01.2.06                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |        | 1.608.344.940,00                       | 1.491.466.294,00   | 92,73 | 0,00            | 0,00        | 91,67  |
| 2.13.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |        | 150.000.000,00                         | 136.928.000,00     | 91,29 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |        | 0,00                                   | 0,00               | 0,00  | 3,00            | 3,00        | 100,00 |
| 2.13.01.2.06.0006             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       |        | 200.000.000,00                         | 133.050.000,00     | 66,53 | 0,00            | 0,00        | 66,67  |
|                               | - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |        | 0,00                                   | 0,00               | 0,00  | 12,00           | 8,00        | 66,67  |
| 2.13.01.2.06.0008             | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |        | 150.000.000,00                         | 131.738.500,00     | 87,83 | 0,00            | 0,00        | 91,67  |
|                               | - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     |        | 0,00                                   | 0,00               | 0,00  | 12,00           | 11,00       | 91,67  |
| 2.13.01.2.06.0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD                             |        | 958.344.940,00                         | 941.144.834,00     | 98,21 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD            |        | 0,00                                   | 0,00               | 0,00  | 12,00           | 12,00       | 100,00 |
| 2.13.01.2.06.0010             | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD  |        | 150.000.000,00                         | 148.604.960,00     | 99,07 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD                           |        | 0,00                                   | 0,00               | 0,00  | 12,00           | 12,00       | 100,00 |
| 2.13.01.2.07                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |        | 438.037.222,00                         | 436.507.720,00     | 99,65 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
| 2.13.01.2.07.0010             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |        | 438.037.222,00                         | 436.507.720,00     | 99,65 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |

|                   |   |  |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 20,00       | 20,00       | 100,00        |
| 2.13.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  | 150.000.000,00          | 148.092.800,00          | 98,73        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  | 150.000.000,00          | 148.092.800,00          | 98,73        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 2.13.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  | 250.000.000,00          | 205.184.000,00          | 82,07        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 100.000.000,00          | 87.144.000,00           | 87,14        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya            |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 5,00        | 5,00        | 100,00        |
| 2.13.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |  | 150.000.000,00          | 118.040.000,00          | 78,69        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                    |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 93,00       | 93,00       | 100,00        |
| 2.13.02           | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>  |  | <b>2.480.000.000,00</b> | <b>2.453.034.850,00</b> | <b>98,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan desa   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 90,00       | 90,00       | 100,00        |
| 2.13.02.2.01      | Penyelenggaraan Penataan Desa   |  | 2.480.000.000,00        | 2.453.034.850,00        | 98,91        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.13.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa   |  | 200.000.000,00          | 197.673.800,00          | 98,84        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 179,00      | 179,00      | 100,00        |
| 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa  |  | 2.280.000.000,00        | 2.255.361.050,00        | 98,92        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 2.13.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>  |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 90,00       | 90,00       | 100,00        |

|                   |  |  |                        |                        |                |                |                |                  |
|-------------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.13.04           | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b><br><br>- <i>Cakupan Desa yang tertib pengelolaan aset desa</i>   |  | 175.000.000,00<br>0,00 | 174.270.000,00<br>0,00 | 99,58<br>0,00  | 0,00<br>90,00  | 0,00<br>90,00  | 100,00<br>100,00 |
| 2.13.04.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  |  | 175.000.000,00         | 174.270.000,00         | 99,58          | 0,00           | 0,00           | 100,00           |
| 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa<br><br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</i>   |  | 75.000.000,00<br>0,00  | 75.000.000,00<br>0,00  | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>3,00   | 0,00<br>3,00   | 100,00<br>100,00 |
| 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD<br><br>- <i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>  |  | 100.000.000,00<br>0,00 | 99.270.000,00<br>0,00  | 99,27<br>0,00  | 0,00<br>179,00 | 0,00<br>179,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.13.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b><br><br>- <i>Persentase desa yang difasilitasi dalam pemberdayaan kelembagaan</i>  |  | 618.176.657,00<br>0,00 | 602.138.500,00<br>0,00 | 97,41<br>0,00  | 0,00<br>90,00  | 0,00<br>90,00  | 100,00<br>100,00 |
| 2.13.05.2.01      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota   |  | 618.176.657,00         | 602.138.500,00         | 97,41          | 0,00           | 0,00           | 100,00           |
| 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br><br>- <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna ) Lembaga adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i> |  | 297.450.000,00<br>0,00 | 291.208.500,00<br>0,00 | 97,90<br>0,00  | 0,00<br>77,00  | 0,00<br>77,00  | 100,00<br>100,00 |
| 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat<br><br>- <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>   |  | 320.726.657,00<br>0,00 | 310.930.000,00<br>0,00 | 96,95<br>0,00  | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00 |

| JUMLAH                        |   |        | 5.719.558.819,00   | 5.510.694.164,00  | 96,35 |                 |             | 97,92  |
|-------------------------------|---|--------|--------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------|--------|
| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : |   |        | DINAS PERTANIAN    |                   |       |                 |             |        |
| KODE                          | URAIAN  | LOKASI | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN    |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|                               |   |        |                    | (Rp.)             | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1                             | 2   | 3      | 4                  | 5                 | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 3.27                          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  |        | 12.087.665.251,00  | 11.283.436.890,00 | 93,35 | 0,00            | 0,00        | 84,69  |
| 3.27.02                       | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  |        | 4.546.243.840,00   | 3.782.309.510,00  | 83,20 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Persentase peningkatan jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi  |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 15,00           | 15,00       | 100,00 |
|                               | - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Holtikultura dan Perkebunan per tahun                             |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 2,20            | 2,20        | 100,00 |
|                               | - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan  |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 4,50            | 4,50        | 100,00 |
|                               | - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Peternakan (Daging, Telur)  |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,94            | 0,94        | 100,00 |
|                               | - Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang dibina dalam Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Holtikultura dan Perkebunan |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 20,00           | 20,00       | 100,00 |
|                               | - Persentase pemenuhan sarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 Tahun                        |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1,50            | 1,50        | 100,00 |
| 3.27.02.2.02                  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                        |        | 3.351.603.840,00   | 2.756.876.260,00  | 82,26 | 0,00            | 0,00        | 41,81  |
|                               | - Jumlah Produksi ubi kayu  |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1,85            | 0,00        | 0,00   |
|                               | - Jumlah Produksi ubi jalar   |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 425,00          | 3,00        | 0,71   |
|                               | - Jumlah Produksi kacang tanah  |        | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 72,00           | 6,00        | 8,33   |



|                   |   |                                 |                                 |                      |               |               |                         |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman<br>- <i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>  | 2.851.603.840,00<br>0,00        | 2.275.080.260,00<br>0,00        | 79,78<br>0,00        | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00        |
| 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman<br>- <i>Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian</i>                                  | 500.000.000,00<br>0,00          | 481.796.000,00<br>0,00          | 96,36<br>0,00        | 0,00<br>4,00  | 0,00<br>4,00  | 100,00<br>100,00        |
| 3.27.02.2.05      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | 1.194.640.000,00                | 1.025.433.250,00                | 85,84                | 0,00          | 0,00          | 100,00                  |
| 3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak<br>- <i>Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar</i>  | 1.194.640.000,00<br>0,00        | 1.025.433.250,00<br>0,00        | 85,84<br>0,00        | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00        |
| 3.27.03           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b><br>- <i>Persentase penerapan teknologi inseminasi buatan pada sapi potong</i>                    | <b>7.541.421.411,00</b><br>0,00 | <b>7.501.127.380,00</b><br>0,00 | <b>99,47</b><br>0,00 | 0,00<br>77,00 | 0,00<br>77,00 | <b>100,00</b><br>100,00 |
| 3.27.03.2.01      | Pengembangan Prasarana Pertanian  | 464.040.000,00                  | 461.986.120,00                  | 99,56                | 0,00          | 0,00          | 100,00                  |
| 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya<br>- <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>          | 464.040.000,00<br>0,00          | 461.986.120,00<br>0,00          | 99,56<br>0,00        | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00        |
| 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian   | 7.077.381.411,00                | 7.039.141.260,00                | 99,46                | 0,00          | 0,00          | 100,00                  |
| 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani<br>- <i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>                           | 2.245.920.000,00<br>0,00        | 2.229.965.000,00<br>0,00        | 99,29<br>0,00        | 0,00<br>22,00 | 0,00<br>22,00 | 100,00<br>100,00        |
| 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani<br>- <i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>                                    | 4.831.461.411,00<br>0,00        | 4.809.176.260,00<br>0,00        | 99,54<br>0,00        | 0,00<br>27,00 | 0,00<br>27,00 | 100,00<br>100,00        |
| 3.27.04           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b><br>- <i>Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ternak/Hewan Pemeliharaan</i> | <b>0,00</b><br>0,00             | <b>0,00</b><br>0,00             | <b>0,00</b><br>0,00  | 0,00<br>14,00 | 0,00<br>14,00 | <b>100,00</b><br>100,00 |

|              |   |  |                   |                   |       |        |        |        |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3.27.05      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|              | - Luas lahan tanaman pangan terdampak perubahan iklim                             |  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 473,00 | 473,00 | 100,00 |
| 3.27.06      | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|              | - Persentase peningkatan kelompok tani terdaftar yang dibina dan diawasi usahanya |  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 20,00  | 20,00  | 100,00 |
|              |   |  |                   |                   |       |        |        |        |
| JUMLAH       |   |  | 12.087.665.251,00 | 11.283.436.890,00 | 93,35 |        |        | 84,69  |

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN**

| KODE              | URAIAN  | LOKASI | PAGU DANA (Rp.)   | REAL. KEUANGAN    |       | TARGET FISIK | REAL. FISIK |        |
|-------------------|---|--------|-------------------|-------------------|-------|--------------|-------------|--------|
|                   |   |        |                   | (Rp.)             | (%)   |              | K           | (%)    |
| 1                 | 2   | 3      | 4                 | 5                 | 6     | 7            | 8           | 6      |
| 2.07              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                            |        | 16.773.659.879,00 | 16.122.366.746,00 | 96,12 | 0,00         | 0,00        | 102,91 |
| 2.07.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>        |        | 2.803.742.000,00  | 2.653.177.626,00  | 94,63 | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
| 2.07.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 |        | 215.780.000,00    | 210.180.000,00    | 97,40 | 0,00         | 0,00        | 100,00 |
| 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi             |        | 215.780.000,00    | 210.180.000,00    | 97,40 | 0,00         | 0,00        | 100,00 |
|                   | - Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 23,00        | 23,00       | 100,00 |
| 2.07.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |        | 200.000.000,00    | 186.276.000,00    | 93,14 | 0,00         | 0,00        | 100,00 |
| 2.07.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD                                       |        | 200.000.000,00    | 186.276.000,00    | 93,14 | 0,00         | 0,00        | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD                      |        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 1,00         | 1,00        | 100,00 |
| 2.07.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |        | 1.737.962.000,00  | 1.623.479.000,00  | 93,41 | 0,00         | 0,00        | 100,00 |
| 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |        | 1.737.962.000,00  | 1.623.479.000,00  | 93,41 | 0,00         | 0,00        | 100,00 |

|                   |  |  |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 64,00       | 64,00       | 100,00        |
| 2.07.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |  | 650.000.000,00          | 633.242.626,00          | 97,42        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  | 100.000.000,00          | 96.300.000,00           | 96,30        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 50,00       | 50,00       | 100,00        |
| 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         |  | 550.000.000,00          | 536.942.626,00          | 97,63        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 2.07.03           | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  |  | <b>7.215.231.300,00</b> | <b>7.054.754.800,00</b> | <b>97,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 50,00       | 50,00       | 100,00        |
| 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |  | 7.215.231.300,00        | 7.054.754.800,00        | 97,78        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |  | 7.215.231.300,00        | 7.054.754.800,00        | 97,78        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                             |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1.162,00    | 1.162,00    | 100,00        |
| 2.07.04           | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   |  | <b>3.886.393.530,00</b> | <b>3.711.626.520,00</b> | <b>95,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase lowongan kerja yang terinformasikan   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 55,00       | 55,00       | 100,00        |
| 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota   |  | 2.791.533.530,00        | 2.639.329.510,00        | 94,55        | 0,00        | 0,00        | 111,05        |
| 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja   |  | 328.625.000,00          | 315.905.000,00          | 96,13        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Sumber Daya Pelayanan Tenaga Kerja yang disediakan  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 120,00      | 120,00      | 100,00        |
| 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja  |  | 652.642.880,00          | 613.249.880,00          | 93,96        | 0,00        | 0,00        | 155,25        |
|                   | - Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 15.500,00   | 24.064,00   | 155,25        |

|                   |  |  |                         |                         |              |        |        |               |
|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|---------------|
| 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja<br>- Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan  |  | 180.415.750,00          | 175.685.000,00          | 97,38        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 170,00 | 170,00 | 100,00        |
| 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan<br>- Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD   |  | 593.000.000,00          | 536.148.000,00          | 90,41        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 700,00 | 700,00 | 100,00        |
| 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja<br>- Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja   |  | 1.036.849.900,00        | 998.341.630,00          | 96,29        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 150,00 | 150,00 | 100,00        |
| 2.07.04.2.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  |  | 500.000.000,00          | 490.129.000,00          | 98,03        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
| 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online<br>- Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karirhub)            |  | 500.000.000,00          | 490.129.000,00          | 98,03        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 80,00  | 80,00  | 100,00        |
| 2.07.04.2.04      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  |  | 594.860.000,00          | 582.168.010,00          | 97,87        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
| 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)<br>- Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya |  | 594.860.000,00          | 582.168.010,00          | 97,87        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 200,00 | 200,00 | 100,00        |
| 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan<br>- Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
| 2.07.05           | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b><br>- Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja   |  | <b>2.868.293.049,00</b> | <b>2.702.807.800,00</b> | <b>94,23</b> | 0,00   | 0,00   | <b>100,00</b> |
|                   |  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00   | 2,00   | 100,00        |
| 2.07.05.2.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota  |  | 2.868.293.049,00        | 2.702.807.800,00        | 94,23        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |

|                   |  |  |                          |                          |              |             |             |               |
|-------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |  | 1.751.653.049,00         | 1.663.669.000,00         | 94,98        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Perselisihan yang Dicegah   |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 190,00      | 190,00      | 100,00        |
| 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 1.116.640.000,00         | 1.039.138.800,00         | 93,06        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan   |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 190,00      | 190,00      | 100,00        |
| 3.32              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>   |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3.32.03           | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi  |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.32.03.2.01      | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.32.03.2.01.0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan  |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.32.03.2.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi   |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan   |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   |  |  |                          |                          |              |             |             |               |
| <b>JUMLAH</b>     |  |  | <b>16.773.659.879,00</b> | <b>16.122.366.746,00</b> | <b>96,12</b> |             |             | <b>101,45</b> |

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tematik Penanganan Stunting Kabupaten Bekasi

| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |                    |                |       |                 |             |        |
|--|--|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------|--------|
| KODE   | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|  |  |                    | (Rp.)          | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1  | 2  | 4                  | 5              | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 2.08   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  | 1.055.863.900,00   | 951.918.101,00 | 90,16 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
| 2.08.01  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 280.932.200,00     | 258.971.641,00 | 92,18 | 0,00            | 0,00        | 0,00   |
| 2.08.01.2.08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 280.932.200,00     | 258.971.641,00 | 92,18 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
| 2.08.01.2.08.0003  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 280.932.200,00     | 258.971.641,00 | 92,18 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|  |  | 0,00               | 0,00           | 0,00  | 1,00            | 1,00        | 100,00 |
| 2.08.02  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  | 257.027.500,00     | 213.285.360,00 | 82,98 | 0,00            | 0,00        | 0,00   |
| 2.08.02.2.03   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 257.027.500,00     | 213.285.360,00 | 82,98 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
| 2.08.02.2.03.0005  | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>- Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di Bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum Pd LPLPP tingkat Kab/Kota | 257.027.500,00     | 213.285.360,00 | 82,98 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|  |  | 0,00               | 0,00           | 0,00  | 220,00          | 220,00      | 100,00 |
| 2.08.03  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | 69.020.000,00      | 65.217.500,00  | 94,49 | 0,00            | 0,00        | 0,00   |
| 2.08.03.2.02   | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota<br>- Jumlah Layanan Penunjang Perlindungan Perempuan dan Anak yang disediakan   | 0,00               | 0,00           | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|  |  | 0,00               | 0,00           | 0,00  | 120,00          | 120,00      | 100,00 |

|                   |   |                        |                        |               |                |                |                  |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.08.03.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 69.020.000,00          | 65.217.500,00          | 94,49         | 0,00           | 0,00           | 100,00           |
| 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>- Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 69.020.000,00<br>0,00  | 65.217.500,00<br>0,00  | 94,49<br>0,00 | 0,00<br>52,00  | 0,00<br>52,00  | 100,00<br>100,00 |
| 2.08.06           | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b><br>- Nilai Capaian Kluster KLA  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.08.07           | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b><br>- Nilai Capaian Kluster Perlindungan Khusus Anak   | 448.884.200,00<br>0,00 | 414.443.600,00<br>0,00 | 92,33<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota<br>- Jumlah Fasilitas Advokasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak   | 101.500.000,00<br>0,00 | 81.765.000,00<br>0,00  | 80,56<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>300,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA<br>- Jumlah SDM yang Memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan Pencegahan KTA  | 101.500.000,00<br>0,00 | 81.765.000,00<br>0,00  | 80,56<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>300,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 234.530.000,00         | 232.447.000,00         | 99,11         | 0,00           | 0,00           | 100,00           |

|                   |   |                        |                        |               |               |               |                  |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>- Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | 234.530.000,00<br>0,00 | 232.447.000,00<br>0,00 | 99,11<br>0,00 | 0,00<br>30,00 | 0,00<br>30,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.08.07.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 112.854.200,00         | 100.231.600,00         | 88,82         | 0,00          | 0,00          | 100,00           |
| 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota<br>- Jumlah KIE perlindungan khusus anak                   | 112.854.200,00<br>0,00 | 100.231.600,00<br>0,00 | 88,82<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00 |
|                   |   |                        |                        |               |               |               |                  |
| JUMLAH            |   | 1.055.863.900,00       | 951.918.101,00         | 90,16         |               |               | 100,00           |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

| KODE              | URAIAN  | PAGU DANA<br>(Rp.)       | REAL. KEUANGAN           |               | TARGET<br>FISIK   | REAL. FISIK       |                  |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                   |   |                          | (Rp.)                    | (%)           |                   | K                 | (%)              |
| 1                 | 2   | 4                        | 5                        | 6             | 7                 | 8                 | 6                |
| 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   | 1.199.582.400,00         | 1.106.171.970,00         | 92,21         | 0,00              | 0,00              | 50,00            |
| 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL<br>- Cakupan jumlah pendamping sosial yang dibutuhkan untuk pendampingan kepada KPM PKH di Kabupaten Bekasi                           | 1.199.582.400,00<br>0,00 | 1.106.171.970,00<br>0,00 | 92,21<br>0,00 | 0,00<br>100,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     |
| 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | 1.199.582.400,00         | 1.106.171.970,00         | 92,21         | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga<br>- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.199.582.400,00<br>0,00 | 1.106.171.970,00<br>0,00 | 92,21<br>0,00 | 0,00<br>54.563,00 | 0,00<br>54.563,00 | 100,00<br>100,00 |
|                   |   |                          |                          |               |                   |                   |                  |
| JUMLAH            |   | 1.199.582.400,00         | 1.106.171.970,00         | 92,21         |                   |                   | 50,00            |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN



| KODE              | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.)       | REAL. KEUANGAN           |              | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK   |               |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|                   |  |                          | (Rp.)                    | (%)          |                 | K             | (%)           |
| 1                 | 2  | 4                        | 5                        | 6            | 7               | 8             | 6             |
| 1.02              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>20.764.552.843,00</b> | <b>19.683.495.800,00</b> | <b>94,79</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <b>102,15</b> |
| 1.02.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>9.687.212.273,00</b>  | <b>8.900.000.000,00</b>  | <b>91,87</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <b>100,00</b> |
|                   | - <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>23,40</i>    | <i>23,40</i>  | <i>100,00</i> |
| 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 9.687.212.273,00         | 8.900.000.000,00         | 91,87        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
| 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 9.687.212.273,00         | 8.900.000.000,00         | 91,87        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan</i>                                 | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>44,00</i>    | <i>44,00</i>  | <i>100,00</i> |
| 1.02.02           | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                             | <b>9.106.398.270,00</b>  | <b>8.867.708.000,00</b>  | <b>97,38</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <b>109,09</b> |
|                   | - <i>Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit dan FKTP sesuai standar</i> | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Kabupaten/ Kota Sehat</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>1,00</i>     | <i>2,00</i>   | <i>200,00</i> |
|                   | - <i>Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar</i>                          | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>             | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase warga negara usia 60 tahun Ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>     | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase kasus Penyakit Menular &amp; Penyakit Tidak menular yang berhasil tertangani</i>               | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Prevalensi stunting</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>12,00</i>    | <i>12,00</i>  | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase desa yang melaksanakan STBM</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>90,00</i>    | <i>90,00</i>  | <i>100,00</i> |
|                   |  |                          |                          |              |                 |               |               |

|                   |  |                  |                  |       |            |            |        |
|-------------------|--|------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer dan sekunder sesuai standar</i></li> <li>- <i>Jumlah Angka Kematian Ibu</i></li> <li>- <i>Jumlah Angka Kematian Bayi</i></li> </ul> | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 85,00      | 85,00      | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 9,00       | 9,00       | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 9.106.398.270,00 | 8.867.708.000,00 | 97,38 | 0,00       | 0,00       | 96,30  |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i></li> </ul>  | 1.438.936.320,00 | 1.421.993.720,00 | 98,82 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 76.000,00  | 76.000,00  | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i></li> </ul>  | 168.000.000,00   | 160.600.000,00   | 95,60 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i></li> </ul>  | 128.000.000,00   | 126.026.000,00   | 98,46 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 253.000,00 | 253.000,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i></li> </ul>  | 6.717.544.100,00 | 6.589.914.200,00 | 98,10 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i></li> </ul>  | 90.000.000,00    | 89.809.080,00    | 99,79 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00       | 2,00       | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan</i></li> </ul>  | 425.679.850,00   | 416.760.000,00   | 97,90 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1,00       | 1,00       | 100,00 |

|                   |  |                                 |                                 |                      |                |                |                         |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional<br>- <i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Ke Laboratorium Rujukan / Nasional Yang Didistribusikan</i> | 88.032.000,00<br>0,00           | 23.194.000,00<br>0,00           | 26,35<br>0,00        | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00        |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>- <i>Jumlah Dokuomen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>  | 17.350.000,00<br>0,00           | 7.150.000,00<br>0,00            | 41,21<br>0,00        | 0,00<br>3,00   | 0,00<br>2,00   | 66,67<br>66,67          |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak<br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak</i>   | 32.856.000,00<br>0,00           | 32.261.000,00<br>0,00           | 98,19<br>0,00        | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00        |
| 1.02.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b><br>- <i>Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat uji kompetensi</i>   | <b>1.630.942.300,00</b><br>0,00 | <b>1.578.203.200,00</b><br>0,00 | <b>96,77</b><br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | <b>100,00</b><br>100,00 |
| 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  | 241.340.000,00                  | 231.287.600,00                  | 95,83                | 0,00           | 0,00           | 100,00                  |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>- <i>Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>   | 241.340.000,00<br>0,00          | 231.287.600,00<br>0,00          | 95,83<br>0,00        | 0,00<br>93,00  | 0,00<br>93,00  | 100,00<br>100,00        |
| 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 1.389.602.300,00                | 1.346.915.600,00                | 96,93                | 0,00           | 0,00           | 100,00                  |

|                   |  |                  |                  |       |        |        |        |
|-------------------|--|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 1.02.03.2.03.0001 | <div>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</div> <div><div>- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</div></div>                       | 1.389.602.300,00 | 1.346.915.600,00 | 96,93 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 490,00 | 490,00 | 100,00 |
| 1.02.04           | <div><b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b></div> <div><div>- Persentase usaha Kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan yang memenuhi standar</div></div> <div><div>- Persentase usaha pengelolaan makanan berizin yang sesuai standar</div></div> | 340.000.000,00   | 337.584.600,00   | 99,29 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                   |  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | 120.000.000,00   | 119.708.600,00   | 99,76 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |

|                   |  |                |                |       |      |      |        |
|-------------------|--|----------------|----------------|-------|------|------|--------|
| 1.02.04.2.01.0001 | <p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>- Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p>  | 120.000.000,00 | 119.708.600,00 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   |  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.02      | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.02.0001 | <p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</p> <p>- Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</p>   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   |  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.03      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  | 140.000.000,00 | 139.094.000,00 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.03.0001 | <p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <p>- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> | 140.000.000,00 | 139.094.000,00 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   |  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.04      | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)   | 80.000.000,00  | 78.782.000,00  | 98,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | 80.000.000,00  | 78.782.000,00  | 98,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

|        |  |                   |                   |       |        |        |        |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
|        | - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
|        |  |                   |                   |       |        |        |        |
| JUMLAH |  | 20.764.552.843,00 | 19.683.495.800,00 | 94,79 |        |        | 102,15 |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

| KODE              | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN   |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|-------------------|--|--------------------|------------------|-------|-----------------|-------------|--------|
|                   |  |                    | (Rp.)            | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1                 | 2  | 4                  | 5                | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  | 5.542.227.350,00   | 4.808.233.190,00 | 86,76 | 0,00            | 0,00        | 100,04 |
| 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    | 3.071.359.850,00   | 2.523.712.190,00 | 82,17 | 0,00            | 0,00        | 80,00  |
|                   | - Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi                             | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 100,00          | 80,00       | 80,00  |
| 1.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 179.900.850,00     | 112.700.000,00   | 62,65 | 0,00            | 0,00        | 83,33  |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 57.615.550,00      | 38.900.000,00    | 67,52 | 0,00            | 0,00        | 66,67  |
|                   | - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 3,00            | 2,00        | 66,67  |
| 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD                                       | 122.285.300,00     | 73.800.000,00    | 60,35 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 2,00            | 2,00        | 100,00 |
| 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 420.624.000,00     | 409.680.000,00   | 97,40 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD                      | 420.624.000,00     | 409.680.000,00   | 97,40 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |

|                   |   |                  |                  |        |        |        |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|                   | - <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 661.500.000,00   | 661.500.000,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | 661.500.000,00   | 661.500.000,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>                            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 1.609.335.000,00 | 1.141.110.000,00 | 70,91  | 0,00   | 0,00   | 98,00  |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 1.609.335.000,00 | 1.141.110.000,00 | 70,91  | 0,00   | 0,00   | 90,00  |
|                   | - <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 10,00  | 9,00   | 90,00  |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD  | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD</i>                            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 200.000.000,00   | 198.722.190,00   | 99,36  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 200.000.000,00   | 198.722.190,00   | 99,36  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |

|                   |   |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>1.743.862.000,00</b> | <b>1.675.090.000,00</b> | <b>96,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase anak putus sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan Non Formal                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 64,70       | 64,70       | 100,00        |
| 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 100.000.000,00          | 98.230.000,00           | 98,23        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                        | 100.000.000,00          | 98.230.000,00           | 98,23        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | 1.308.210.000,00        | 1.267.262.000,00        | 96,87        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD  | 186.885.000,00          | 164.500.000,00          | 88,02        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 7,00        | 7,00        | 100,00        |
| 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD   | 377.865.000,00          | 374.521.000,00          | 99,12        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 615,00      | 615,00      | 100,00        |
| 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD   | 193.460.000,00          | 190.310.000,00          | 98,37        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
| 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  | 550.000.000,00          | 537.931.000,00          | 97,81        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   | 335.652.000,00          | 309.598.000,00          | 92,24        | 0,00        | 0,00        | 125,00        |



|                   |   |                        |                        |               |                  |                  |                  |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>- <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i> | 137.732.000,00<br>0,00 | 136.750.000,00<br>0,00 | 99,29<br>0,00 | 0,00<br>213,00   | 200,00<br>426,00 | 200,00<br>200,00 |
| 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>- <i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>  | 47.920.000,00<br>0,00  | 43.700.000,00<br>0,00  | 91,19<br>0,00 | 0,00<br>100,00   | 0,00<br>100,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan<br>- <i>Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>  | 150.000.000,00<br>0,00 | 129.148.000,00<br>0,00 | 86,10<br>0,00 | 0,00<br>1,00     | 0,00<br>1,00     | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.03           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>   | <b>444.933.500,00</b>  | <b>336.815.000,00</b>  | <b>75,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar<br>- <i>Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>   | 444.933.500,00<br>0,00 | 336.815.000,00<br>0,00 | 75,70<br>0,00 | 0,00<br>1.011,00 | 0,00<br>650,00   | 88,10<br>64,29   |
| 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar<br>- <i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>   | 46.198.000,00<br>0,00  | 45.892.000,00<br>0,00  | 99,34<br>0,00 | 0,00<br>2,00     | 0,00<br>2,00     | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar<br>- <i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun</i>   | 398.735.500,00<br>0,00 | 290.923.000,00<br>0,00 | 72,96<br>0,00 | 0,00<br>1,00     | 0,00<br>1,00     | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.04           | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>   | <b>282.072.000,00</b>  | <b>272.616.000,00</b>  | <b>96,65</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    |

|                   |  |                         |                         |              |        |        |               |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|---------------|
|                   | - <i>Presentase pemenuhan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan</i>  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00        |
| 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                             | 282.072.000,00          | 272.616.000,00          | 96,65        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   | 132.470.500,00          | 127.070.500,00          | 95,92        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00   | 1,00   | 100,00        |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                      | 149.601.500,00          | 145.545.500,00          | 97,29        | 0,00   | 0,00   | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00   | 1,00   | 100,00        |
|                   |  |                         |                         |              |        |        |               |
| <b>JUMLAH</b>     |  | <b>5.542.227.350,00</b> | <b>4.808.233.190,00</b> | <b>86,76</b> |        |        | <b>100,04</b> |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| KODE         | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.)       | REAL. KEUANGAN           |              | TARGET FISIK | REAL. FISIK |               |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|              |  |                          | (Rp.)                    | (%)          |              | K           | (%)           |
| 1            | 2  | 4                        | 5                        | 6            | 7            | 8           | 6             |
| 2.13         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> | <b>17.866.753.179,00</b> | <b>17.010.809.212,00</b> | <b>95,21</b> | 0,00         | 0,00        | <b>98,81</b>  |
| 2.13.01      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>2.801.382.162,00</b>  | <b>2.633.179.774,00</b>  | <b>94,00</b> | 0,00         | 0,00        | <b>100,00</b> |
|              | - <i>Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah</i>               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 32,10        | 32,10       | 100,00        |
| 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 1.963.344.940,00         | 1.843.395.254,00         | 93,89        | 0,00         | 0,00        | 94,05         |

|                   |   |   |   |  |  |  |   |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 2.13.01.2.06.0002 | <div>                     Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     <div>                         - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     </div> </div>   | <div>                     300.000.000,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     297.669.960,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     99,22                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>5,00</div> </div>  | <div>                     0,00                     <div>5,00</div> </div>  | <div>                     100,00                     <div>100,00</div> </div> |
| 2.13.01.2.06.0003 | <div>                     Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                     <div>                         - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                     </div> </div>   | <div>                     55.000.000,00                     <div>0,00</div> </div>  | <div>                     54.259.000,00                     <div>0,00</div> </div>  | <div>                     98,65                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>5,00</div> </div>  | <div>                     0,00                     <div>5,00</div> </div>  | <div>                     100,00                     <div>100,00</div> </div> |
| 2.13.01.2.06.0005 | <div>                     Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     <div>                         - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     </div> </div>   | <div>                     150.000.000,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     136.928.000,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     91,29                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>3,00</div> </div>  | <div>                     0,00                     <div>3,00</div> </div>  | <div>                     100,00                     <div>100,00</div> </div> |
| 2.13.01.2.06.0006 | <div>                     Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     <div>                         - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                     </div> </div>                   | <div>                     200.000.000,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     133.050.000,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     66,53                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>12,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>8,00</div> </div>  | <div>                     66,67                     <div>66,67</div> </div>   |
| 2.13.01.2.06.0008 | <div>                     Fasilitas Kunjungan Tamu                     <div>                         - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                     </div> </div>  | <div>                     150.000.000,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     131.738.500,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     87,83                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>12,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>11,00</div> </div> | <div>                     91,67                     <div>91,67</div> </div>   |
| 2.13.01.2.06.0009 | <div>                     Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD                     <div>                         - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD                     </div> </div>                                    | <div>                     958.344.940,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     941.144.834,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     98,21                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>12,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>12,00</div> </div> | <div>                     100,00                     <div>100,00</div> </div> |
| 2.13.01.2.06.0010 | <div>                     Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD                     <div>                         - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD                     </div> </div>  | <div>                     150.000.000,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     148.604.960,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     99,07                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>12,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>12,00</div> </div> | <div>                     100,00                     <div>100,00</div> </div> |
| 2.13.01.2.07      | <div>                     Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 </div>   | <div>                     438.037.222,00                 </div>                     | <div>                     436.507.720,00                 </div>                     | <div>                     99,65                 </div>                     | <div>                     0,00                 </div>                      | <div>                     0,00                 </div>                      | <div>                     100,00                 </div>                       |
| 2.13.01.2.07.0010 | <div>                     Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     <div>                         - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     </div> </div> | <div>                     438.037.222,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     436.507.720,00                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     99,65                     <div>0,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>20,00</div> </div> | <div>                     0,00                     <div>20,00</div> </div> | <div>                     100,00                     <div>100,00</div> </div> |

|                   |  |                                 |                                 |                      |                |                |                         |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 2.13.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 150.000.000,00                  | 148.092.800,00                  | 98,73                | 0,00           | 0,00           | 100,00                  |
| 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</li> </ul>   | 150.000.000,00<br>0,00          | 148.092.800,00<br>0,00          | 98,73<br>0,00        | 0,00<br>3,00   | 0,00<br>3,00   | 100,00<br>100,00        |
| 2.13.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 250.000.000,00                  | 205.184.000,00                  | 82,07                | 0,00           | 0,00           | 100,00                  |
| 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</li> </ul> | 100.000.000,00<br>0,00          | 87.144.000,00<br>0,00           | 87,14<br>0,00        | 0,00<br>5,00   | 0,00<br>5,00   | 100,00<br>100,00        |
| 2.13.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</li> </ul>  | 150.000.000,00<br>0,00          | 118.040.000,00<br>0,00          | 78,69<br>0,00        | 0,00<br>93,00  | 0,00<br>93,00  | 100,00<br>100,00        |
| 2.13.02           | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan desa</li> </ul>   | <b>2.680.000.000,00</b><br>0,00 | <b>2.645.308.650,00</b><br>0,00 | <b>98,71</b><br>0,00 | 0,00<br>90,00  | 0,00<br>90,00  | <b>100,00</b><br>100,00 |
| 2.13.02.2.01      | Penyelenggaraan Penataan Desa  | 2.680.000.000,00                | 2.645.308.650,00                | 98,71                | 0,00           | 0,00           | 100,00                  |
| 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya</li> </ul>  | 200.000.000,00<br>0,00          | 192.273.800,00<br>0,00          | 96,14<br>0,00        | 0,00<br>179,00 | 0,00<br>179,00 | 100,00<br>100,00        |
| 2.13.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya</li> </ul>  | 200.000.000,00<br>0,00          | 197.673.800,00<br>0,00          | 98,84<br>0,00        | 0,00<br>179,00 | 0,00<br>179,00 | 100,00<br>100,00        |
| 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa   | 2.280.000.000,00                | 2.255.361.050,00                | 98,92                | 0,00           | 0,00           | 100,00                  |

|                   |   |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 2.13.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>                                      | <b>5.387.950.000,00</b> | <b>4.887.207.158,00</b> | <b>90,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 90,00       | 90,00       | 100,00        |
| 2.13.03.2.01      | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa  | 5.387.950.000,00        | 4.887.207.158,00        | 90,71        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                           | 219.255.000,00          | 218.811.000,00          | 99,80        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota       | 5.168.695.000,00        | 4.668.396.158,00        | 90,32        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 4,00        | 4,00        | 100,00        |
| 2.13.04           | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                   | <b>3.813.360.000,00</b> | <b>3.751.962.740,00</b> | <b>98,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Cakupan Desa yang tertib pengelolaan aset desa                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 90,00       | 90,00       | 100,00        |
| 2.13.04.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa         | 3.813.360.000,00        | 3.751.962.740,00        | 98,39        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa   | 75.000.000,00           | 75.000.000,00           | 100,00       | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  | 1.100.000.000,00        | 1.094.742.790,00        | 99,52        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 5,00        | 5,00        | 100,00        |

|                   |  |   |   |  |  |   |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|
| 2.13.04.2.01.0005 | <div> <div>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</div> <div> <div>- Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</div> </div> </div>                          | <div> <div>1.050.000.000,00</div> <div>0,00</div> </div>        | <div> <div>1.028.982.000,00</div> <div>0,00</div> </div>        | <div> <div>98,00</div> <div>0,00</div> </div>        | <div> <div>0,00</div> <div>179,00</div> </div> | <div> <div>100,00</div> <div>100,00</div> </div>        |
| 2.13.04.2.01.0008 | <div> <div>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</div> <div> <div>- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</div> </div> </div> | <div> <div>604.000.000,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>599.031.200,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>99,18</div> <div>0,00</div> </div>        | <div> <div>0,00</div> <div>3,00</div> </div>   | <div> <div>100,00</div> <div>100,00</div> </div>        |
| 2.13.04.2.01.0011 | <div> <div>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</div> <div> <div>- Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</div> </div> </div>   | <div> <div>200.000.000,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>194.183.000,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>97,09</div> <div>0,00</div> </div>        | <div> <div>0,00</div> <div>1,00</div> </div>   | <div> <div>100,00</div> <div>100,00</div> </div>        |
| 2.13.04.2.01.0013 | <div> <div>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</div> <div> <div>- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</div> </div> </div>   | <div> <div>450.000.000,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>433.509.950,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>96,34</div> <div>0,00</div> </div>        | <div> <div>0,00</div> <div>1,00</div> </div>   | <div> <div>100,00</div> <div>100,00</div> </div>        |
| 2.13.04.2.01.0014 | <div> <div>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</div> <div> <div>- Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</div> </div> </div>  | <div> <div>100.000.000,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>99.270.000,00</div> <div>0,00</div> </div>           | <div> <div>99,27</div> <div>0,00</div> </div>        | <div> <div>0,00</div> <div>179,00</div> </div> | <div> <div>100,00</div> <div>100,00</div> </div>        |
| 2.13.04.2.01.0015 | <div> <div>Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa</div> <div> <div>- Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa</div> </div> </div>   | <div> <div>234.360.000,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>227.243.800,00</div> <div>0,00</div> </div>          | <div> <div>96,96</div> <div>0,00</div> </div>        | <div> <div>0,00</div> <div>179,00</div> </div> | <div> <div>100,00</div> <div>100,00</div> </div>        |
| 2.13.05           | <div> <div><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b></div> <div> <div>- Persentase desa yang difasilitasi dalam pemberdayaan kelembagaan</div> </div> </div>      | <div> <div><b>3.184.061.017,00</b></div> <div>0,00</div> </div> | <div> <div><b>3.093.150.890,00</b></div> <div>0,00</div> </div> | <div> <div><b>97,14</b></div> <div>0,00</div> </div> | <div> <div>0,00</div> <div>90,00</div> </div>  | <div> <div><b>100,00</b></div> <div>100,00</div> </div> |

|                   |   |                              |                              |                   |                   |                   |                      |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.13.05.2.01      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 3.184.061.017,00             | 3.093.150.890,00             | 97,14             | 0,00              | 0,00              | 100,00               |
| 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i> | 1.107.600.000,00<br><br>0,00 | 1.097.108.000,00<br><br>0,00 | 99,05<br><br>0,00 | 0,00<br><br>3,00  | 0,00<br><br>3,00  | 100,00<br><br>100,00 |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>- <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>   | 300.000.000,00<br><br>0,00   | 295.459.750,00<br><br>0,00   | 98,49<br><br>0,00 | 0,00<br><br>4,00  | 0,00<br><br>4,00  | 100,00<br><br>100,00 |
| 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>- <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna ) Lembaga adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>  | 297.450.000,00<br><br>0,00   | 291.208.500,00<br><br>0,00   | 97,90<br><br>0,00 | 0,00<br><br>77,00 | 0,00<br><br>77,00 | 100,00<br><br>100,00 |
| 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>- <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>  | 344.284.360,00<br><br>0,00   | 304.141.790,00<br><br>0,00   | 88,34<br><br>0,00 | 0,00<br><br>5,00  | 0,00<br><br>5,00  | 100,00<br><br>100,00 |
| 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat<br>- <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>  | 320.726.657,00<br><br>0,00   | 310.930.000,00<br><br>0,00   | 96,95<br><br>0,00 | 0,00<br><br>1,00  | 0,00<br><br>1,00  | 100,00<br><br>100,00 |
| 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga   | 814.000.000,00               | 794.302.850,00               | 97,58             | 0,00              | 0,00              | 100,00               |

|        |   |                   |                   |       |       |       |        |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|        | - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
|        |   |                   |                   |       |       |       |        |
| JUMLAH |   | 17.866.753.179,00 | 17.010.809.212,00 | 95,21 |       |       | 98,81  |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN

| KODE         | URAIAN  | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN   |       | TARGET FISIK | REAL. FISIK |        |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------|
|              |   |                    | (Rp.)            | (%)   |              | K           | (%)    |
| 1            | 2   | 4                  | 5                | 6     | 7            | 8           | 6      |
| 3.27         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  | 1.454.847.429,00   | 1.365.231.306,00 | 93,84 | 0,00         | 0,00        | 80,60  |
| 3.27.02      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | 1.454.847.429,00   | 1.365.231.306,00 | 93,84 | 0,00         | 0,00        | 100,00 |
|              | - Persentase peningkatan jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi  | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 15,00        | 15,00       | 100,00 |
|              | - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Holtikultura dan Perkebunan per tahun                             | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 2,20         | 2,20        | 100,00 |
|              | - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan  | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 4,50         | 4,50        | 100,00 |
|              | - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Peternakan (Daging, Telur)  | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 0,94         | 0,94        | 100,00 |
|              | - Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang dibina dalam Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Holtikultura dan Perkebunan | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 20,00        | 20,00       | 100,00 |
|              | - Persentase pemenuhan sarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 Tahun                        | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 1,50         | 1,50        | 100,00 |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 1.039.827.680,00   | 974.754.440,00   | 93,74 | 0,00         | 0,00        | 27,26  |
|              | - Jumlah Produksi ubi kayu  | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 1,85         | 0,00        | 0,00   |
|              | - Jumlah Produksi ubi jalar   | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 425,00       | 3,00        | 0,71   |



|                   |  |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah Produksi kacang tanah   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 72,00       | 6,00        | 8,33          |
| 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  | 1.039.827.680,00        | 974.754.440,00          | 93,74        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 3.27.02.2.03      | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 415.019.749,00          | 390.476.866,00          | 94,09        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak   | 415.019.749,00          | 390.476.866,00          | 94,09        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 3.27.03           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase penerapan teknologi inseminasi buatan pada sapi potong  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 77,00       | 77,00       | 100,00        |
| 3.27.04           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ternak/Hewan Pemeliharaan   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 14,00       | 14,00       | 100,00        |
| 3.27.05           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.27.05.2.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Luas lahan tanaman pangan terdampak perubahan iklim  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 473,00      | 473,00      | 100,00        |
| 3.27.06           | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase peningkatan kelompok tani terdaftar yang dibina dan diawasi usahanya                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 20,00       | 20,00       | 100,00        |
|                   |  |                         |                         |              |             |             |               |
| <b>JUMLAH</b>     |  | <b>1.454.847.429,00</b> | <b>1.365.231.306,00</b> | <b>93,84</b> |             |             | <b>80,60</b>  |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

:

DINAS PERIKANAN

| KODE              | URAIAN  | PAGU DANA<br>(Rp.)      | REAL. KEUANGAN          |              | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK   |               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|                   |   |                         | (Rp.)                   | (%)          |                 | K             | (%)           |
| 1                 | 2   | 4                       | 5                       | 6            | 7               | 8             | 6             |
| 3.25              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  | <b>9.954.363.615,00</b> | <b>9.100.339.363,00</b> | <b>91,42</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <b>100,00</b> |
| 3.25.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>2.491.375.018,00</b> | <b>2.403.708.218,00</b> | <b>96,48</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <b>100,00</b> |
|                   | - <i>Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                   | - <i>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</i>  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 3.25.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 150.000.000,00          | 149.972.245,00          | 99,98        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
| 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 150.000.000,00          | 149.972.245,00          | 99,98        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>  | <i>2,00</i>     | <i>2,00</i>   | <i>100,00</i> |
| 3.25.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 120.000.000,00          | 119.934.860,00          | 99,95        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
| 3.25.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD   | 20.000.000,00           | 20.000.000,00           | 100,00       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i>                                 | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>  | <i>4,00</i>     | <i>4,00</i>   | <i>100,00</i> |
| 3.25.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD   | 100.000.000,00          | 99.934.860,00           | 99,93        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>  | <i>3,00</i>     | <i>3,00</i>   | <i>100,00</i> |

|                   |  |                        |                        |               |               |               |                  |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.25.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 304.445.298,00         | 286.737.680,00         | 94,18         | 0,00          | 0,00          | 100,00           |
| 3.25.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi</i></li> </ul>                                      | 150.000.000,00<br>0,00 | 149.137.680,00<br>0,00 | 99,43<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00 |
| 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i></li> </ul> | 154.445.298,00<br>0,00 | 137.600.000,00<br>0,00 | 89,09<br>0,00 | 0,00<br>38,00 | 0,00<br>38,00 | 100,00<br>100,00 |
| 3.25.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 839.752.000,00         | 820.284.576,00         | 97,68         | 0,00          | 0,00          | 100,00           |
| 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i></li> </ul>                                       | 239.752.000,00<br>0,00 | 236.004.000,00<br>0,00 | 98,44<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00 |
| 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i></li> </ul>   | 30.000.000,00<br>0,00  | 29.616.900,00<br>0,00  | 98,72<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00 |
| 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i></li> </ul>   | 20.000.000,00<br>0,00  | 19.825.000,00<br>0,00  | 99,13<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00 |
| 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i></li> </ul>                              | 500.000.000,00<br>0,00 | 487.785.676,00<br>0,00 | 97,56<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00 |
| 3.25.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i></li> </ul>  | 50.000.000,00<br>0,00  | 47.053.000,00<br>0,00  | 94,11<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00 |
| 3.25.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 264.350.000,00         | 254.572.000,00         | 96,30         | 0,00          | 0,00          | 100,00           |

|                   |   |                                |                                |                       |                        |                        |                            |
|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.25.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>- <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i>   | 264.350.000,00<br>0,00         | 254.572.000,00<br>0,00         | 96,30<br>0,00         | 0,00<br>15,00          | 0,00<br>15,00          | 100,00<br>100,00           |
| 3.25.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 123.070.720,00                 | 118.029.326,00                 | 95,90                 | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                     |
| 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan</i>  | 70.000.000,00<br>0,00          | 64.996.046,00<br>0,00          | 92,85<br>0,00         | 0,00<br>1,00           | 0,00<br>1,00           | 100,00<br>100,00           |
| 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>  | 53.070.720,00<br>0,00          | 53.033.280,00<br>0,00          | 99,93<br>0,00         | 0,00<br>1,00           | 0,00<br>1,00           | 100,00<br>100,00           |
| 3.25.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 689.757.000,00                 | 654.177.531,00                 | 94,84                 | 0,00                   | 0,00                   | 100,00                     |
| 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>- <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i><br><br>- <i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam setahun</i> | 139.757.000,00<br>0,00<br>0,00 | 108.733.300,00<br>0,00<br>0,00 | 77,80<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>33,00<br>63,00 | 0,00<br>33,00<br>63,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>- <i>Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>  | 50.000.000,00<br>0,00          | 49.185.000,00<br>0,00          | 98,37<br>0,00         | 0,00<br>75,00          | 0,00<br>75,00          | 100,00<br>100,00           |
| 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>- <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>   | 500.000.000,00<br>0,00         | 496.259.231,00<br>0,00         | 99,25<br>0,00         | 0,00<br>4,00           | 0,00<br>4,00           | 100,00<br>100,00           |

|                   |  |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam setahun   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 63,00       | 63,00       | 100,00        |
| 3.25.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>   | <b>3.496.037.120,00</b> | <b>2.944.229.650,00</b> | <b>84,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase Pertumbuhan Kelompok Nelayan  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
|                   | - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
| 3.25.03.2.01      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 2.281.044.480,00        | 1.904.627.120,00        | 83,50        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan   | 50.000.000,00           | 48.172.000,00           | 96,34        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 3.25.03.2.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap   | 2.231.044.480,00        | 1.856.455.120,00        | 83,21        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 3.25.03.2.02      | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 989.992.640,00          | 814.926.650,00          | 82,32        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil   | 939.992.640,00          | 765.586.650,00          | 81,45        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan di kabupaten bekasi  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 30,00       | 30,00       | 100,00        |
| 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil  | 50.000.000,00           | 49.340.000,00           | 98,68        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 30,00       | 30,00       | 100,00        |
| 3.25.03.2.03      | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)   | 225.000.000,00          | 224.675.880,00          | 99,86        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)   | 225.000.000,00          | 224.675.880,00          | 99,86        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |

|                   |   |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 3.25.04           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | <b>2.079.351.477,00</b> | <b>1.941.417.790,00</b> | <b>93,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
| 3.25.04.2.02      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil  | 811.659.480,00          | 785.679.620,00          | 96,80        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil  | 142.571.000,00          | 138.735.000,00          | 97,31        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                               | 669.088.480,00          | 646.944.620,00          | 96,69        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 6,00        | 6,00        | 100,00        |
| 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  | 1.267.691.997,00        | 1.155.738.170,00        | 91,17        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 40.000.000,00           | 39.910.000,00           | 99,78        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 560.495.517,00          | 533.605.600,00          | 95,20        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 7,00        | 7,00        | 100,00        |
| 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 592.196.480,00          | 508.202.570,00          | 85,82        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |

|                   |   |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 3.25.04.2.04.0005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat  | 75.000.000,00           | 74.020.000,00           | 98,69        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 90,00       | 90,00       | 100,00        |
| 3.25.06           | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | <b>1.887.600.000,00</b> | <b>1.810.983.705,00</b> | <b>95,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Cakupan unit pengolahan ikan yang dibina  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
|                   | - Persentase Produksi hasil olahan perikanan  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
| 3.25.06.2.02      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil   | 200.000.000,00          | 195.526.750,00          | 97,76        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil  | 200.000.000,00          | 195.526.750,00          | 97,76        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 61,00       | 61,00       | 100,00        |
| 3.25.06.2.03      | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota   | 1.687.600.000,00        | 1.615.456.955,00        | 95,73        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 1.537.600.000,00        | 1.467.482.225,00        | 95,44        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 2 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 79.351,00   | 79.351,00   | 100,00        |

|                   |   |                  |                  |       |       |       |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota    | 150.000.000,00   | 147.974.730,00   | 98,65 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 47,00 | 47,00 | 100,00 |
|                   |   |                  |                  |       |       |       |        |
| JUMLAH            |   | 9.954.363.615,00 | 9.100.339.363,00 | 91,42 |       |       | 100,00 |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

| KODE              | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN     |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |       |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------|-----------------|-------------|-------|
|                   |  |                    | (Rp.)              | (%)   |                 | K           | (%)   |
| 1                 | 2  | 4                  | 5                  | 6     | 7               | 8           | 6     |
| 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   | 255.890.898.948,00 | 253.115.689.272,00 | 98,92 | 0,00            | 0,00        | 44,98 |
| 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 2.950.430.500,00   | 2.776.379.745,00   | 94,10 | 0,00            | 0,00        | 81,83 |
|                   | - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 64,77           | 53,00       | 81,83 |
| 1.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 519.565.000,00     | 452.019.846,00     | 87,00 | 0,00            | 0,00        | 16,67 |
| 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD  | 429.425.000,00     | 386.629.846,00     | 90,03 | 0,00            | 0,00        | 33,33 |
|                   | - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 6,00            | 2,00        | 33,33 |
| 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 90.140.000,00      | 65.390.000,00      | 72,54 | 0,00            | 0,00        | 0,00  |
|                   | - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 1,00            | 0,00        | 0,00  |



|                   |   |                          |                          |              |             |             |             |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 150.000.000,00           | 146.094.840,00           | 97,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 50.000.000,00            | 49.791.000,00            | 99,58        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD   | 100.000.000,00           | 96.303.840,00            | 96,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 968.672.000,00           | 895.210.000,00           | 92,42        | 0,00        | 0,00        | 31,48       |
|                   | - Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 24,00       | 20,00       | 83,33       |
| 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   | 350.000.000,00           | 345.370.000,00           | 98,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 25,00       | 0,00        | 0,00        |
| 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 618.672.000,00           | 549.840.000,00           | 88,87        | 0,00        | 0,00        | 11,11       |
|                   | - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 18,00       | 2,00        | 11,11       |
| 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1.312.193.500,00         | 1.283.055.059,00         | 97,78        | 0,00        | 0,00        | 57,22       |
| 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 182.193.500,00           | 160.425.660,00           | 88,05        | 0,00        | 0,00        | 20,00       |
|                   | - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 15,00       | 3,00        | 20,00       |
| 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 1.130.000.000,00         | 1.122.629.399,00         | 99,35        | 0,00        | 0,00        | 94,44       |
|                   | - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 18,00       | 17,00       | 94,44       |
| 1.03.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  | <b>17.787.350.092,00</b> | <b>17.678.776.696,00</b> | <b>99,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                   |   |                          |                          |                |               |               |                  |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 17.614.370.092,00        | 17.505.796.696,00        | 99,38          | 0,00          | 0,00          | 24,27            |
| 1.03.02.2.01.0119 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku<br>- Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun   | 5.476.470.000,00<br>0,00 | 5.453.715.000,00<br>0,00 | 99,58<br>0,00  | 0,00<br>25,00 | 0,00<br>12,00 | 48,00<br>48,00   |
| 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya<br>- Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun   | 994.000.000,00<br>0,00   | 982.577.000,00<br>0,00   | 98,85<br>0,00  | 0,00<br>10,00 | 0,00<br>4,00  | 40,00<br>40,00   |
| 1.03.02.2.01.0124 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi<br>- Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun   | 6.895.000.000,00<br>0,00 | 6.880.686.600,00<br>0,00 | 99,79<br>0,00  | 0,00<br>3,00  | 0,00<br>1,00  | 33,33<br>33,33   |
| 1.03.02.2.01.0127 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku<br>- Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun   | 2.406.400.092,00<br>0,00 | 2.371.390.765,00<br>0,00 | 98,55<br>0,00  | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00     |
| 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya<br>- Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 1.842.500.000,00<br>0,00 | 1.817.427.331,00<br>0,00 | 98,64<br>0,00  | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00     |
| 1.03.02.2.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 172.980.000,00           | 172.980.000,00           | 100,00         | 0,00          | 0,00          | 100,00           |
| 1.03.02.2.02.0031 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa<br>- Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi  | 172.980.000,00<br>0,00   | 172.980.000,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.03.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   | <b>9.846.113.957,00</b>  | <b>9.770.915.562,00</b>  | <b>99,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |

|                   |  |                           |                           |               |                   |                  |                |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | 9.846.113.957,00          | 9.770.915.562,00          | 99,24         | 0,00              | 0,00             | 15,05          |
| 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)<br>- <i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i> | 222.000.000,00<br>0,00    | 217.363.310,00<br>0,00    | 97,91<br>0,00 | 0,00<br>80,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)<br>- <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>                                     | 350.820.000,00<br>0,00    | 347.540.722,00<br>0,00    | 99,07<br>0,00 | 0,00<br>1,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan<br>- <i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>   | 9.273.293.957,00<br>0,00  | 9.206.011.530,00<br>0,00  | 99,27<br>0,00 | 0,00<br>1.329,00  | 0,00<br>600,00   | 45,15<br>45,15 |
| 1.03.06           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  | <b>2.951.876.000,00</b>   | <b>2.836.178.023,00</b>   | <b>96,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 2.951.876.000,00          | 2.836.178.023,00          | 96,08         | 0,00              | 0,00             | 22,97          |
| 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan<br>- <i>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan</i>   | 2.754.876.000,00<br>0,00  | 2.640.277.023,00<br>0,00  | 95,84<br>0,00 | 0,00<br>17.417,00 | 0,00<br>8.000,00 | 45,93<br>45,93 |
| 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan<br>- <i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>  | 197.000.000,00<br>0,00    | 195.901.000,00<br>0,00    | 99,44<br>0,00 | 0,00<br>3.667,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   |
| 1.03.10           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | <b>222.355.128.399,00</b> | <b>220.053.439.246,00</b> | <b>98,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | 222.355.128.399,00        | 220.053.439.246,00        | 98,96         | 0,00              | 0,00             | 88,99          |

|                   |   |   |   |                                  |                                   |                                   |                                     |
|-------------------|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.03.10.2.01.0028 | <div> <div>Pengelolaan Leger Jalan</div> <div>- Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</div> </div>   | <div>707.000.000,00</div> <div>0,00</div>     | <div>703.756.083,00</div> <div>0,00</div>     | <div>99,54</div> <div>0,00</div> | <div>0,00</div> <div>4,00</div>   | <div>0,00</div> <div>3,60</div>   | <div>90,00</div> <div>90,00</div>   |
| 1.03.10.2.01.0030 | <div> <div>Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa</div> <div>- Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</div> </div> | <div>18.850.419.505,00</div> <div>0,00</div>  | <div>18.117.224.382,00</div> <div>0,00</div>  | <div>96,11</div> <div>0,00</div> | <div>0,00</div> <div>87,00</div>  | <div>0,00</div> <div>81,71</div>  | <div>93,92</div> <div>93,92</div>   |
| 1.03.10.2.01.0034 | <div> <div>Pemeliharaan Berkala Jalan</div> <div>- Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</div> </div>  | <div>12.994.972.000,00</div> <div>0,00</div>  | <div>12.900.756.599,00</div> <div>0,00</div>  | <div>99,27</div> <div>0,00</div> | <div>0,00</div> <div>13,00</div>  | <div>0,00</div> <div>13,00</div>  | <div>100,00</div> <div>100,00</div> |
| 1.03.10.2.01.0037 | <div> <div>Pelebaran Jalan Menuju Standar</div> <div>- Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</div> </div>  | <div>6.123.537.670,00</div> <div>0,00</div>   | <div>5.980.829.960,00</div> <div>0,00</div>   | <div>97,67</div> <div>0,00</div> | <div>0,00</div> <div>3,80</div>   | <div>0,00</div> <div>3,23</div>   | <div>85,00</div> <div>85,00</div>   |
| 1.03.10.2.01.0040 | <div> <div>Pembangunan Jembatan</div> <div>- Jumlah Jembatan yang Dibangun</div> </div>   | <div>173.625.591.864,00</div> <div>0,00</div> | <div>173.279.097.352,00</div> <div>0,00</div> | <div>99,80</div> <div>0,00</div> | <div>0,00</div> <div>400,00</div> | <div>0,00</div> <div>336,00</div> | <div>84,00</div> <div>84,00</div>   |
| 1.03.10.2.01.0043 | <div> <div>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</div> <div>- Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</div> </div>  | <div>3.483.000.000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>3.420.885.170,00</div> <div>0,00</div>   | <div>98,22</div> <div>0,00</div> | <div>0,00</div> <div>947,00</div> | <div>0,00</div> <div>662,90</div> | <div>70,00</div> <div>70,00</div>   |
| 1.03.10.2.01.0046 | <div> <div>Pemeliharaan Rutin Jalan</div> <div>- Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</div> </div>  | <div>6.570.607.360,00</div> <div>0,00</div>   | <div>5.650.889.700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>86,00</div> <div>0,00</div> | <div>0,00</div> <div>20,00</div>  | <div>0,00</div> <div>20,00</div>  | <div>100,00</div> <div>100,00</div> |
|                   |   |   |   |                                  |                                   |                                   |                                     |
| JUMLAH            |   | 255.890.898.948,00                            | 253.115.689.272,00                            | 98,92                            |                                   |                                   | 44,98                               |

| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : |  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |       |                 |             |        |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------|-----------------|-------------|--------|
| KODE                          | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.)                                 | REAL. KEUANGAN    |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|                               |  |  | (Rp.)             | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1                             | 2  | 4  | 5                 | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 2.14                          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   | 34.294.588.640,00                                  | 23.462.038.433,00 | 68,41 | 0,00            | 0,00        | 62,88  |
| 2.14.01                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 20.757.050.340,00                                  | 16.794.201.691,00 | 80,91 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja<br>dan keuangan  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor<br>atau bangunan lainnya yang disediakan  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah kendaraan perorangan dinas atau<br>kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan<br>dibayarkan pajaknya   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Terlaksananya Pembayaran ASN yang menerima<br>gaji dan tunjangan selama 12 bulan   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
| 2.14.01.2.01                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah  | 336.475.340,00                                     | 304.443.750,00    | 90,48 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
| 2.14.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | 276.475.340,00                                     | 256.942.250,00    | 92,93 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 8,00            | 8,00        | 100,00 |
| 2.14.01.2.01.0006             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD   | 60.000.000,00                                      | 47.501.500,00     | 79,17 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja PD | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 1,00            | 1,00        | 100,00 |
| 2.14.01.2.02                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 19.270.575.000,00                                  | 15.789.216.325,00 | 81,93 | 0,00            | 0,00        | 50,00  |

|                   |  |                   |                   |       |       |      |        |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------|-------|------|--------|
| 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 19.170.575.000,00 | 15.707.703.125,00 | 81,94 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|                   | - <i>Terlaksananya Pembayaran ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama 12 bulan</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 66,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2.14.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD  | 100.000.000,00    | 81.513.200,00     | 81,51 | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|                   | - <i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 1,00  | 1,00 | 100,00 |
| 2.14.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 593.000.000,00    | 377.234.049,00    | 63,61 | 0,00  | 0,00 | 105,00 |
| 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 200.000.000,00    | 181.815.000,00    | 90,91 | 0,00  | 0,00 | 200,00 |
|                   | - <i>jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 1,00  | 2,00 | 200,00 |
| 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 50.000.000,00     | 42.497.400,00     | 84,99 | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 1,00  | 1,00 | 100,00 |
| 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 94.500.000,00     | 72.150.000,00     | 76,35 | 0,00  | 0,00 | 50,00  |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 1,00  | 0,50 | 50,00  |
| 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD   | 248.500.000,00    | 80.771.649,00     | 32,50 | 0,00  | 0,00 | 70,00  |
|                   | - <i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 10,00 | 7,00 | 70,00  |
| 2.14.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 302.000.000,00    | 185.221.872,00    | 61,33 | 0,00  | 0,00 | 50,00  |

|                   |   |                       |                       |              |             |             |               |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 302.000.000,00        | 185.221.872,00        | 61,33        | 0,00        | 0,00        | 50,00         |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1,00        | 0,50        | 50,00         |
| 2.14.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 255.000.000,00        | 138.085.695,00        | 54,15        | 0,00        | 0,00        | 71,27         |
| 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                 | 66.000.000,00         | 5.163.400,00          | 7,82         | 0,00        | 0,00        | 60,98         |
|                   | - <i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 82,00       | 50,00       | 60,98         |
| 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                     | 124.000.000,00        | 90.124.695,00         | 72,68        | 0,00        | 0,00        | 69,51         |
|                   | - <i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</i>                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 82,00       | 57,00       | 69,51         |
| 2.14.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 65.000.000,00         | 42.797.600,00         | 65,84        | 0,00        | 0,00        | 83,33         |
|                   | - <i>tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 12,00       | 10,00       | 83,33         |
| 2.14.02           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | <b>658.618.000,00</b> | <b>599.849.142,00</b> | <b>91,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - <i>Tersedianya Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - <i>Selarasnya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2.14.02.2.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 192.620.000,00        | 188.635.000,00        | 97,93        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |

|                   |   |                |                |        |      |      |        |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------|------|------|--------|
| 2.14.02.2.01.0002 | <div> <div> Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)</i></li> </ul> </div> </div>  | 127.620.000,00 | 124.742.500,00 | 97,75  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 2.14.02.2.01.0009 | <div> <div> Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i></li> </ul> </div> </div> | 65.000.000,00  | 63.892.500,00  | 98,30  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 465.998.000,00 | 411.214.142,00 | 88,24  | 0,00 | 0,00 | 92,50  |
| 2.14.02.2.02.0012 | <div> <div> Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>tersedianya dokumen pendataan keluarga</i></li> </ul> </div> </div>   | 112.200.000,00 | 112.200.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 2.14.02.2.02.0013 | <div> <div> Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i></li> </ul> </div> </div>  | 183.380.000,00 | 166.343.816,00 | 90,71  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain   | 95.418.000,00  | 58.872.176,00  | 61,70  | 0,00 | 0,00 | 70,00  |



|                   |   |                   |                  |       |       |      |        |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------|-------|------|--------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana \$Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</li> </ul>  | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 10,00 | 7,00 | 70,00  |
| 2.14.02.2.02.0019 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</li> </ul>  | 75.000.000,00     | 73.798.150,00    | 98,40 | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 1,00  | 1,00 | 100,00 |
| 2.14.03           | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Penggunaan KB &amp; MKJP</li> <li>- Terlaksananya Advokasi Program Banggakencana ( Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana ) kepada stakholders dan mitra kerja</li> <li>- Cakupan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</li> <li>- Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</li> </ul> | 11.979.085.000,00 | 5.754.745.470,00 | 48,04 | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|                   |   | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
| 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal   | 909.480.000,00    | 681.739.340,00   | 74,96 | 0,00  | 0,00 | 16,30  |
| 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK  | 138.480.000,00    | 55.389.000,00    | 40,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |

|                   |  |                |                |       |      |      |       |
|-------------------|--|----------------|----------------|-------|------|------|-------|
|                   | - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana  | 156.000.000,00 | 122.820.240,00 | 78,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                   | - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)   | 345.000.000,00 | 311.770.000,00 | 90,37 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|                   | - Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 1,00 | 0,50 | 50,00 |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | 50.000.000,00  | 13.605.100,00  | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                   | - Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal  | 70.000.000,00  | 32.205.000,00  | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|                   | - Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | 150.000.000,00 | 145.950.000,00 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 47,83 |

|                   |   |                  |                  |       |          |        |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|----------|--------|--------|
|                   | - Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana \$Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 23,00    | 11,00  | 47,83  |
| 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | 6.198.440.000,00 | 3.478.834.000,00 | 56,12 | 0,00     | 0,00   | 26,74  |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | 611.000.000,00   | 344.400.000,00   | 56,37 | 0,00     | 0,00   | 30,23  |
|                   | - Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP)  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 215,00   | 65,00  | 30,23  |
| 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB   | 45.000.000,00    | 40.104.000,00    | 89,12 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|                   | - Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)  | 5.542.440.000,00 | 3.094.330.000,00 | 55,83 | 0,00     | 0,00   | 50,00  |
|                   | - Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 12,00    | 6,00   | 50,00  |
| 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota  | 4.407.465.000,00 | 1.537.352.130,00 | 34,88 | 0,00     | 0,00   | 67,43  |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | 90.500.000,00    | 47.004.250,00    | 51,94 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|                   | - Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 2.650.505.000,00 | 503.768.200,00   | 19,01 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Meningkatnya Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan Gebyar Pelayanan KB  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Meningkatnya Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan TMKK   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 5.000,00 | 333,00 | 6,66   |

|                   |   |                  |                |       |        |        |        |
|-------------------|---|------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan Kampung KB</li> <li>- Meningkatnya Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan Bakti IBI</li> <li>- Meningkatnya Pelayanan MOW-MOP di Kabupaten Bekasi</li> <li>- Meningkatnya Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan TMKK</li> <li>- Meningkatnya Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan Gebyar Pelayanan KB</li> <li>- Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> </ul> | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 10,00  | 5,00   | 50,00  |
|                   |   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> </ul>  | 1.586.460.000,00 | 920.199.400,00 | 58,00 | 0,00   | 0,00   | 2,47   |
|                   |   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 81,00  | 2,00   | 2,47   |
| 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta KB yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan</li> </ul>   | 80.000.000,00    | 66.380.280,00  | 82,98 | 0,00   | 0,00   | 82,64  |
|                   |   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 121,00 | 100,00 | 82,64  |
| 2.14.03.2.04      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | 463.700.000,00   | 56.820.000,00  | 12,25 | 0,00   | 0,00   | 20,00  |

|                   |  |  |  |                                 |                          |                          |                                    |
|-------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 2.14.03.2.04.0002 | <p>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</p> <p>- Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</p>   | <p>202.500.000,00</p> <p>0,00</p>        | <p>6.120.000,00</p> <p>0,00</p>          | <p>3,02</p> <p>0,00</p>         | <p>0,00</p> <p>1,00</p>  | <p>40,00</p> <p>0,40</p> | <p>40,00</p> <p>40,00</p>          |
| 2.14.03.2.04.0006 | <p>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas</p> <p>- Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</p>  | <p>261.200.000,00</p> <p>0,00</p>        | <p>50.700.000,00</p> <p>0,00</p>         | <p>19,41</p> <p>0,00</p>        | <p>0,00</p> <p>6,00</p>  | <p>0,00</p> <p>0,00</p>  | <p>0,00</p> <p>0,00</p>            |
| 2.14.04           | <p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b></p> <p>- Cakupan Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita, (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKS</p>   | <p><b>899.835.300,00</b></p> <p>0,00</p> | <p><b>313.242.130,00</b></p> <p>0,00</p> | <p><b>34,81</b></p> <p>0,00</p> | <p>0,00</p> <p>0,00</p>  | <p>0,00</p> <p>0,00</p>  | <p><b>100,00</b></p> <p>100,00</p> |
| 2.14.04.2.01      | <p>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>   | 858.035.300,00                           | 313.242.130,00                           | 36,51                           | 0,00                     | 0,00                     | 27,52                              |
| 2.14.04.2.01.0008 | <p>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</p> <p>- Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</p> | <p>200.000.000,00</p> <p>0,00</p>        | <p>174.490.330,00</p> <p>0,00</p>        | <p>87,25</p> <p>0,00</p>        | <p>0,00</p> <p>1,00</p>  | <p>0,00</p> <p>1,00</p>  | <p>100,00</p> <p>100,00</p>        |
| 2.14.04.2.01.0014 | <p>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</p> <p>- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</p>   | <p>55.000.000,00</p> <p>0,00</p>         | <p>44.006.800,00</p> <p>0,00</p>         | <p>80,01</p> <p>0,00</p>        | <p>0,00</p> <p>23,00</p> | <p>0,00</p> <p>12,00</p> | <p>52,17</p> <p>52,17</p>          |

|                   |   |                        |                       |               |                |                 |
|-------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)<br>- <i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>  | 9.600.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00    |
| 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))<br>- <i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>  | 98.598.000,00<br>0,00  | 29.300.000,00<br>0,00 | 29,72<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00    |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))<br>- <i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>  | 300.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00    |
| 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))<br>- <i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga \$BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK6R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i> | 100.000.000,00<br>0,00 | 45.460.000,00<br>0,00 | 45,46<br>0,00 | 0,00<br>380,00 | 45,53<br>173,00 |
| 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))<br>- <i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</i>   | 57.837.300,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>0,00    |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))<br>- <i>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana \$Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan</i>   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>0,00    |

|                   |   |                           |                           |                   |                  |                  |                    |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                   | <i>Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>  |                           |                           |                   |                  |                  |                    |
| 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda<br>- <i>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk</i> | 37.000.000,00<br><br>0,00 | 19.985.000,00<br><br>0,00 | 54,01<br><br>0,00 | 0,00<br><br>8,00 | 0,00<br><br>4,00 | 50,00<br><br>50,00 |
| 2.14.04.2.02      | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | 41.800.000,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 2.14.04.2.02.0002 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)<br>- <i>Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>  | 37.000.000,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00          | 0,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>1,00 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00   |
| 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)<br>- <i>Jumlah Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i>   | 4.800.000,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>0,00          | 0,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>1,00 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00   |
|                   |   |                           |                           |                   |                  |                  |                    |
| JUMLAH            |   | 34.294.588.640,00         | 23.462.038.433,00         | 68,41             |                  |                  | 62,88              |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

| KODE | URAIAN | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN |     | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |     |
|------|--------|--------------------|----------------|-----|-----------------|-------------|-----|
|      |        |                    | (Rp.)          | (%) |                 | K           | (%) |
| 1    | 2      | 4                  | 5              | 6   | 7               | 8           | 6   |

|                   |  |                         |                         |              |       |       |               |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------|---------------|
| 2.09              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>   | 2.104.516.000,00        | 2.069.876.209,00        | 98,35        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
| 2.09.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>   | 2.104.516.000,00        | 2.069.876.209,00        | 98,35        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi</i>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 86,90 | 86,90 | 100,00        |
| 2.09.03.2.04      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                   | 2.104.516.000,00        | 2.069.876.209,00        | 98,35        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah laporan Skor PPH</i>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00  | 1,00  | 100,00        |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                          | 1.735.026.000,00        | 1.706.246.109,00        | 98,34        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00  | 1,00  | 100,00        |
| 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                  | 369.490.000,00          | 363.630.100,00          | 98,41        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00  | 1,00  | 100,00        |
|                   |  |                         |                         |              |       |       |               |
| <b>JUMLAH</b>     |  | <b>2.104.516.000,00</b> | <b>2.069.876.209,00</b> | <b>98,35</b> |       |       | <b>100,00</b> |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| KODE         | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN   |        | TARGET FISIK | REAL. FISIK |        |
|--------------|--|--------------------|------------------|--------|--------------|-------------|--------|
|              |  |                    | (Rp.)            | (%)    |              | K           | (%)    |
| 1            | 2  | 4                  | 5                | 6      | 7            | 8           | 6      |
| 2.11         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                 | 5.610.169.240,00   | 4.923.122.421,00 | 87,75  | 0,00         | 0,00        | 92,11  |
| 2.11.01      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | 655.991.000,00     | 650.680.000,00   | 99,19  | 0,00         | 0,00        | 0,00   |
|              | - <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>               | 0,00               | 0,00             | 0,00   | 44,08        | 0,00        | 0,00   |
| 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 50.000.000,00      | 50.000.000,00    | 100,00 | 0,00         | 0,00        | 100,00 |



|                   |  |                         |                         |              |             |             |             |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.11.01.2.02.0005 | <div>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</div> <div>- <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i></div>    | 25.000.000,00           | 25.000.000,00           | 100,00       | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00      |
| 2.11.01.2.02.0008 | <div>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</div> <div>- <i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i></div>   | 25.000.000,00           | 25.000.000,00           | 100,00       | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00      |
| 2.11.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 252.500.000,00          | 252.000.000,00          | 99,80        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 2.11.01.2.05.0009 | <div>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</div> <div>- <i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i></div>                           | 252.500.000,00          | 252.000.000,00          | 99,80        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 72,00       | 72,00       | 100,00      |
| 2.11.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 353.491.000,00          | 348.680.000,00          | 98,64        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 2.11.01.2.07.0011 | <div>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div> <div>- <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i></div> | 353.491.000,00          | 348.680.000,00          | 98,64        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 24,00       | 24,00       | 100,00      |
| 2.11.02           | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>1.706.200.000,00</b> | <b>1.597.008.925,00</b> | <b>93,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.11.02.2.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota   | 1.306.200.000,00        | 1.279.833.495,00        | 97,98        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 2.11.02.2.01.0002 | <div>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</div> <div>- <i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota</i></div>  | 756.200.000,00          | 744.764.035,00          | 98,49        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00      |
| 2.11.02.2.01.0003 | <div>Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</div> <div>- <i>Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan</i></div>  | 550.000.000,00          | 535.069.460,00          | 97,29        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00      |

|                   |   |                        |                        |               |              |              |                  |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.11.02.2.02      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota   | 400.000.000,00         | 317.175.430,00         | 79,29         | 0,00         | 0,00         | 100,00           |
| 2.11.02.2.02.0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang<br>- Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun   | 400.000.000,00<br>0,00 | 317.175.430,00<br>0,00 | 79,29<br>0,00 | 0,00<br>1,00 | 0,00<br>1,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.11.03           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>797.280.000,00</b>  | <b>779.184.516,00</b>  | <b>97,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  | 447.280.000,00         | 438.575.516,00         | 98,05         | 0,00         | 0,00         | 100,00           |
| 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim<br>- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 447.280.000,00<br>0,00 | 438.575.516,00<br>0,00 | 98,05<br>0,00 | 0,00<br>2,00 | 0,00<br>2,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.11.03.2.02      | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100,00           |
| 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat<br>- Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Bekasi               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.11.03.2.03      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | 350.000.000,00         | 340.609.000,00         | 97,32         | 0,00         | 0,00         | 100,00           |
| 2.11.03.2.03.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi<br>- Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan  | 350.000.000,00<br>0,00 | 340.609.000,00<br>0,00 | 97,32<br>0,00 | 0,00<br>1,00 | 0,00<br>1,00 | 100,00<br>100,00 |
| 2.11.04           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>   | <b>297.450.000,00</b>  | <b>279.748.500,00</b>  | <b>94,05</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>    |

|                   |  |                       |                       |              |             |             |             |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | - <i>Persentase Taman Keanekaragaman Hayati</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 20,00       | 20,00       | 100,00      |
| 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota   | 297.450.000,00        | 279.748.500,00        | 94,05        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati   | 297.450.000,00        | 279.748.500,00        | 94,05        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00      |
| 2.11.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>   | <b>400.000.000,00</b> | <b>347.218.310,00</b> | <b>86,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.11.06.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 400.000.000,00        | 347.218.310,00        | 86,80        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 400.000.000,00        | 347.218.310,00        | 86,80        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 50,00       | 50,00       | 100,00      |
| 2.11.08           | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | <b>120.000.000,00</b> | <b>116.782.720,00</b> | <b>97,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.11.08.2.01      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 120.000.000,00        | 116.782.720,00        | 97,32        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
| 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat  | 120.000.000,00        | 116.782.720,00        | 97,32        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - <i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 120,00      | 120,00      | 100,00      |

|                   |   |                              |                            |                   |                   |                   |                      |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.11.10           | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | 243.248.240,00               | 240.261.610,00             | 98,77             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 2.11.10.2.01      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota   | 243.248.240,00               | 240.261.610,00             | 98,77             | 0,00              | 0,00              | 100,00               |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i> | 243.248.240,00<br><br>0,00   | 240.261.610,00<br><br>0,00 | 98,77<br><br>0,00 | 0,00<br><br>50,00 | 0,00<br><br>50,00 | 100,00<br><br>100,00 |
| 2.11.11           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b><br>- <i>Persentase pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis</i>  | 1.390.000.000,00<br><br>0,00 | 912.237.840,00<br><br>0,00 | 65,63<br><br>0,00 | 0,00<br><br>30,00 | 0,00<br><br>30,00 | 100,00<br><br>100,00 |
| 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah  | 770.000.000,00               | 341.591.000,00             | 44,36             | 0,00              | 0,00              | 50,00                |
| 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota<br>- <i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>                                    | 770.000.000,00<br><br>0,00   | 341.591.000,00<br><br>0,00 | 44,36<br><br>0,00 | 0,00<br><br>4,00  | 0,00<br><br>2,00  | 50,00<br><br>50,00   |
| 2.11.11.2.03      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta  | 620.000.000,00               | 570.646.840,00             | 92,04             | 0,00              | 0,00              | 100,00               |
| 2.11.11.2.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah<br>- <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah</i>                                    | 620.000.000,00<br><br>0,00   | 570.646.840,00<br><br>0,00 | 92,04<br><br>0,00 | 0,00<br><br>69,00 | 0,00<br><br>69,00 | 100,00<br><br>100,00 |
|                   |   |                              |                            |                   |                   |                   |                      |
| <b>JUMLAH</b>     |   | <b>5.610.169.240,00</b>      | <b>4.923.122.421,00</b>    | <b>87,75</b>      |                   |                   | <b>92,11</b>         |

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bekasi

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

| KODE              | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN   |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|-------------------|--|--------------------|------------------|-------|-----------------|-------------|--------|
|                   |  |                    | (Rp.)            | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1                 | 2  | 4                  | 5                | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  | 5.214.584.870,00   | 4.440.882.933,00 | 85,16 | 0,00            | 0,00        | 74,40  |
| 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | 3.745.962.120,00   | 3.430.451.183,00 | 91,58 | 0,00            | 0,00        | 0,00   |
|                   | - Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan Sosial dan bantuan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 20,00           | 0,00        | 0,00   |
| 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial   | 3.745.962.120,00   | 3.430.451.183,00 | 91,58 | 0,00            | 0,00        | 99,40  |
|                   | - Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar   | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 2.620,00        | 2.567,00    | 97,98  |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan  | 2.147.109.000,00   | 1.983.613.144,00 | 92,39 | 0,00            | 0,00        | 97,25  |
|                   | - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 0,00               | 0,00             | 0,00  | 1.929,00        | 1.876,00    | 97,25  |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang   | 175.640.000,00     | 171.640.000,00   | 97,72 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |

|                   |  |                         |                         |              |             |             |             |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | - Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 192,00      | 192,00      | 100,00      |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu  | 480.300.000,00          | 367.575.000,00          | 76,53        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 75,00       | 75,00       | 100,00      |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   | 165.000.000,00          | 161.960.440,00          | 98,16        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 90,00       | 90,00       | 100,00      |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat                                  | 220.000.000,00          | 218.021.450,00          | 99,10        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 220,00      | 220,00      | 100,00      |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan  | 115.000.000,00          | 113.179.800,00          | 98,42        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 44,00       | 44,00       | 100,00      |
| 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   | 442.913.120,00          | 414.461.349,00          | 93,58        | 0,00        | 0,00        | 100,00      |
|                   | - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 70,00       | 70,00       | 100,00      |
| 1.06.05           | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.06.06           | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>1.468.622.750,00</b> | <b>1.010.431.750,00</b> | <b>68,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                   |  |                  |                  |       |          |          |        |
|-------------------|--|------------------|------------------|-------|----------|----------|--------|
|                   | - <i>Persentase korban dampak Bencana yang ditangani</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00   | 0,00     | 0,00   |
| 1.06.06.2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | 1.388.922.750,00 | 935.805.490,00   | 67,38 | 0,00     | 0,00     | 40,28  |
|                   | - <i>Jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten yang mendapatkan perlindungan sosial</i>                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 7.800,00 | 1.353,00 | 17,35  |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan   | 688.922.750,00   | 316.914.400,00   | 46,00 | 0,00     | 0,00     | 3,49   |
|                   | - <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 6.680,00 | 233,00   | 3,49   |
| 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | 700.000.000,00   | 618.891.090,00   | 88,41 | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                        | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1.120,00 | 1.120,00 | 100,00 |
| 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota  | 79.700.000,00    | 74.626.260,00    | 93,63 | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
|                   | - <i>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana   | 79.700.000,00    | 74.626.260,00    | 93,63 | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 75,00    | 75,00    | 100,00 |
|                   |  |                  |                  |       |          |          |        |
| JUMLAH            |  | 5.214.584.870,00 | 4.440.882.933,00 | 85,16 |          |          | 74,40  |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

| KODE | URAIAN | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN |     | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |     |
|------|--------|--------------------|----------------|-----|-----------------|-------------|-----|
|      |        |                    | (Rp.)          | (%) |                 | K           | (%) |
| 1    | 2      | 4                  | 5              | 6   | 7               | 8           | 6   |

|                   |   |                           |                           |              |                 |                 |               |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1.02              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   | <b>774.331.625.735,00</b> | <b>727.816.412.643,00</b> | <b>93,99</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <b>99,55</b>  |
| 1.02.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>366.163.687.273,00</b> | <b>331.457.932.566,00</b> | <b>90,52</b> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <b>100,00</b> |
|                   | - <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>23,40</i>    | <i>23,40</i>    | <i>100,00</i> |
| 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 690.000.000,00            | 675.962.650,00            | 97,97        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | 100,00        |
|                   | - <i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Ketentuan</i>                               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>6,00</i>     | <i>6,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 510.000.000,00            | 499.257.650,00            | 97,89        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>3,00</i>     | <i>3,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 180.000.000,00            | 176.705.000,00            | 98,17        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>3,00</i>     | <i>3,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 348.079.475.000,00        | 315.010.882.439,00        | 90,50        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | 99,49         |
|                   | - <i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i>   | <i>100,00</i> |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 347.849.475.000,00        | 314.786.577.139,00        | 90,50        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | 98,46         |
|                   | - <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>1.625,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>98,46</i>  |
| 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD   | 230.000.000,00            | 224.305.300,00            | 97,52        | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i> | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>18,00</i>    | <i>18,00</i>    | <i>100,00</i> |



|                   |   |                   |                   |       |        |        |        |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| 1.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 500.000.000,00    | 499.870.000,00    | 99,97 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Capaian Pegawai yang terlayani administrasinya kepegawaian</i>                             | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | 500.000.000,00    | 499.870.000,00    | 99,97 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 89,00  | 89,00  | 100,00 |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 2.750.000.000,00  | 2.303.180.312,00  | 83,75 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 1.300.000.000,00  | 1.057.452.312,00  | 81,34 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                         | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 6,00   | 6,00   | 100,00 |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD  | 1.450.000.000,00  | 1.245.728.000,00  | 85,91 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>                      | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                | 12.687.212.273,00 | 11.855.850.000,00 | 93,45 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas/Dinas Jabatan</i>                     | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 9.687.212.273,00  | 8.900.000.000,00  | 91,87 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan</i>                  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 44,00  | 44,00  | 100,00 |
| 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 3.000.000.000,00  | 2.955.850.000,00  | 98,53 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |

|                   |   |                |                |       |        |        |        |
|-------------------|---|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                              | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 900.000.000,00 | 716.264.200,00 | 79,58 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Tercapaiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selama 12 Bulan  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 900.000.000,00 | 716.264.200,00 | 79,58 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 257.000.000,00 | 100.548.965,00 | 39,12 | 0,00   | 0,00   | 72,50  |
|                   | - Terpenuhnya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas/ dinas jabatan yang terpelihara                               | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 100,00 | 75,00  | 75,00  |
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 257.000.000,00 | 100.548.965,00 | 39,12 | 0,00   | 0,00   | 70,00  |
|                   | - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya            | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 30,00  | 21,00  | 70,00  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 300.000.000,00 | 295.374.000,00 | 98,46 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Meningkatnya Pelayanan BLUD di FKTP   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 300.000.000,00 | 295.374.000,00 | 98,46 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |

|         |   |                           |                           |              |             |             |               |
|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|         | - Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 52,00       | 52,00       | 100,00        |
| 1.02.02 | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                      | <b>404.012.316.162,00</b> | <b>392.287.346.662,00</b> | <b>97,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109,09</b> |
|         | - Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit dan FKTP sesuai standar | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
|         | - Kabupaten/ Kota Sehat   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 2,00        | 200,00        |
|         | - Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
|         | - Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
|         | - Persentase warga negara usia 60 tahun Ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |

|                   |   |                  |                  |       |        |        |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | - <i>Persentase kasus Penyakit Menular &amp; Penyakit Tidak menular yang berhasil tertangani</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                   | - <i>Prevalensi stunting</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 12,00  | 12,00  | 100,00 |
|                   | - <i>Persentase desa yang melaksanakan STBM</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 90,00  | 90,00  | 100,00 |
|                   | - <i>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer dan sekunder sesuai standar</i>                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 85,00  | 85,00  | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Angka Kematian Ibu</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 9,00   | 9,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Angka Kematian Bayi</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | 6.228.713.344,00 | 5.529.681.400,00 | 88,78 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP di Kabupaten</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas  | 307.720.000,00   | 284.282.400,00   | 92,38 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | 3.558.200.000,00 | 2.939.769.900,00 | 82,62 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | 200.000.000,00   | 185.719.000,00   | 92,86 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

|                   |  |                            |                            |               |                   |                   |                  |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>- <i>Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>  | 225.000.000,00<br>0,00     | 183.710.000,00<br>0,00     | 81,65<br>0,00 | 0,00<br>110,00    | 0,00<br>110,00    | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit<br>- <i>Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</i> | 100.000.000,00<br>0,00     | 98.964.500,00<br>0,00      | 98,96<br>0,00 | 0,00<br>1,00      | 0,00<br>1,00      | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>- <i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>                    | 1.801.593.344,00<br>0,00   | 1.801.038.600,00<br>0,00   | 99,97<br>0,00 | 0,00<br>4,00      | 0,00<br>4,00      | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga<br>- <i>Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas</i>  | 36.200.000,00<br>0,00      | 36.197.000,00<br>0,00      | 99,99<br>0,00 | 0,00<br>46.000,00 | 0,00<br>46.000,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Pesentase Masyarakat yang Mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah</i>   | 397.263.602.818,00<br>0,00 | 386.268.690.812,00<br>0,00 | 97,23<br>0,00 | 0,00<br>100,00    | 0,00<br>100,00    | 97,77<br>100,00  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>- <i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>   | 428.000.000,00<br>0,00     | 419.696.450,00<br>0,00     | 98,06<br>0,00 | 0,00<br>80.650,00 | 0,00<br>80.650,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 192.140.000,00             | 190.069.600,00             | 98,92         | 0,00              | 0,00              | 100,00           |

|                   |   |                  |                  |       |            |            |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|
|                   | - Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 76.950,00  | 76.950,00  | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | 1.438.936.320,00 | 1.421.993.720,00 | 98,82 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 76.000,00  | 76.000,00  | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | 440.000.000,00   | 436.366.200,00   | 99,17 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 232.500,00 | 232.500,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                              | 168.000.000,00   | 160.600.000,00   | 95,60 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                     | 799.200.000,00   | 754.036.000,00   | 94,35 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar    | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | 128.000.000,00   | 126.026.000,00   | 98,46 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar       | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 253.000,00 | 253.000,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                    | 236.350.000,00   | 219.701.450,00   | 92,96 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                              | 6.717.544.100,00 | 6.589.914.200,00 | 98,10 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                        | 150.000.000,00   | 149.757.000,00   | 99,84 | 0,00       | 0,00       | 100,00 |
|                   | - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat    | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 500,00     | 500,00     | 100,00 |

|                   |  |                          |                          |               |                   |                   |                  |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis<br>- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 2.166.002.800,00<br>0,00 | 874.663.600,00<br>0,00   | 40,38<br>0,00 | 0,00<br>39.873,00 | 0,00<br>30.000,00 | 75,24<br>75,24   |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV<br>- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 600.000.000,00<br>0,00   | 570.135.850,00<br>0,00   | 95,02<br>0,00 | 0,00<br>18.516,00 | 0,00<br>18.516,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 800.000.000,00<br>0,00   | 792.619.600,00<br>0,00   | 99,08<br>0,00 | 0,00<br>5,00      | 0,00<br>5,00      | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>- Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat  | 4.879.597.620,00<br>0,00 | 4.805.642.400,00<br>0,00 | 98,48<br>0,00 | 0,00<br>1,00      | 0,00<br>1,00      | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | 90.000.000,00<br>0,00    | 89.809.080,00<br>0,00    | 99,79<br>0,00 | 0,00<br>2,00      | 0,00<br>2,00      | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | 1.152.295.000,00<br>0,00 | 1.142.572.680,00<br>0,00 | 99,16<br>0,00 | 0,00<br>3,00      | 0,00<br>3,00      | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan  | 425.679.850,00<br>0,00   | 416.760.000,00<br>0,00   | 97,90<br>0,00 | 0,00<br>1,00      | 0,00<br>1,00      | 100,00<br>100,00 |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya<br>- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  | 50.000.000,00<br>0,00    | 49.867.000,00<br>0,00    | 99,73<br>0,00 | 0,00<br>1,00      | 0,00<br>1,00      | 100,00<br>100,00 |

|                   |  |   |                    |                    |       |        |        |        |
|-------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|
|                   |  | <i>Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>   |                    |                    |       |        |        |        |
| 1.02.02.2.02.0020 |  | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | 2.097.420.000,00   | 2.041.495.700,00   | 97,33 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 3,00   | 3,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0021 |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)  | 120.000.000,00     | 119.835.000,00     | 99,86 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>                               | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0022 |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA  | 155.928.800,00     | 145.185.000,00     | 93,11 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>   | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0025 |  | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | 4.921.951.486,00   | 3.478.506.000,00   | 70,67 | 0,00   | 0,00   | 88,89  |
|                   |  | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 9,00   | 8,00   | 88,89  |
| 1.02.02.2.02.0026 |  | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | 367.122.768.842,00 | 359.408.773.082,00 | 97,90 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0028 |  | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional                             | 88.032.000,00      | 23.194.000,00      | 26,35 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Ke Laboratorium Rujukan / Nasional Yang Didistribusikan</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 1,00   | 1,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0029 |  | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | 250.000.000,00     | 238.030.750,00     | 95,21 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 1,00   | 1,00   | 100,00 |



|                   |  |                  |                  |       |        |        |        |
|-------------------|--|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | 130.000.000,00   | 129.572.000,00   | 99,67 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 17.350.000,00    | 7.150.000,00     | 41,21 | 0,00   | 0,00   | 66,67  |
|                   | - Jumlah Dokuomen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 3,00   | 2,00   | 66,67  |
| 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota   | 1.315.550.000,00 | 1.284.793.000,00 | 97,66 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 109,00 | 109,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | 150.000.000,00   | 149.664.450,00   | 99,78 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 3,00   | 3,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 32.856.000,00    | 32.261.000,00    | 98,19 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1,00   | 1,00   | 100,00 |
| 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 420.000.000,00   | 419.624.450,00   | 99,91 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 420.000.000,00   | 419.624.450,00   | 99,91 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 4,00   | 4,00   | 100,00 |

|                   |   |                                 |                                 |                      |                |                |                         |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Cakupan SPKS yang berizin dan yang dibina</i>  | 100.000.000,00<br>0,00          | 69.350.000,00<br>0,00           | 69,35<br>0,00        | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>85,00  | 89,80<br>85,00          |
| 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya<br>- <i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i> | 100.000.000,00<br>0,00          | 69.350.000,00<br>0,00           | 69,35<br>0,00        | 0,00<br>407,00 | 0,00<br>385,00 | 94,59<br>94,59          |
| 1.02.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b><br>- <i>Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat uji kompetensi</i>  | <b>1.680.422.300,00</b><br>0,00 | <b>1.627.261.200,00</b><br>0,00 | <b>96,84</b><br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | <b>100,00</b><br>100,00 |
| 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota<br>- <i>Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</i>   | 290.820.000,00<br>0,00          | 280.345.600,00<br>0,00          | 96,40<br>0,00        | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00        |
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar<br>- <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>  | 49.480.000,00<br>0,00           | 49.058.000,00<br>0,00           | 99,15<br>0,00        | 0,00<br>130,00 | 0,00<br>130,00 | 100,00<br>100,00        |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>- <i>Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>  | 241.340.000,00<br>0,00          | 231.287.600,00<br>0,00          | 95,83<br>0,00        | 0,00<br>93,00  | 0,00<br>93,00  | 100,00<br>100,00        |
| 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan</i>  | 1.389.602.300,00<br>0,00        | 1.346.915.600,00<br>0,00        | 96,93<br>0,00        | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00        |

|                   |  |                                |                                |                       |                          |                          |                            |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya   | 1.389.602.300,00<br>0,00       | 1.346.915.600,00<br>0,00       | 96,93<br>0,00         | 0,00<br>490,00           | 0,00<br>490,00           | 100,00<br>100,00           |
| 1.02.04           | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b><br>- Persentase usaha Kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan yang memenuhi standar<br>- Persentase usaha pengelolaan makanan berizin yang sesuai standar  | 375.000.000,00<br>0,00<br>0,00 | 371.895.895,00<br>0,00<br>0,00 | 99,17<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)<br>- Persentase usaha apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang patuh memenuhi komitmen perizinan  | 120.000.000,00<br>0,00         | 119.708.600,00<br>0,00         | 99,76<br>0,00         | 0,00<br>100,00           | 0,00<br>100,00           | 100,00<br>100,00           |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)<br>- Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 120.000.000,00<br>0,00         | 119.708.600,00<br>0,00         | 99,76<br>0,00         | 0,00<br>2,00             | 0,00<br>2,00             | 100,00<br>100,00           |
| 1.02.04.2.02      | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga<br>- Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian pada Usaha Produksi, Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu yang patuh memenuhi Komitmen Perizinan              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 100,00<br>100,00           |

|                   |   |                |                |       |        |        |        |
|-------------------|---|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga<br>- Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.02.04.2.03      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga<br>- Persentase usaha Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang patuh memenuhi komitmen perizinan  | 140.000.000,00 | 139.094.000,00 | 99,35 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga<br>- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 140.000.000,00 | 139.094.000,00 | 99,35 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.02.04.2.04      | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)<br>- Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang  | 80.000.000,00  | 78.782.000,00  | 98,48 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                   |  |  |  |                               |                              |                              |                                    |
|-------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                   | <i>patuh memenuhi komitmen perizinan Laik Higiene Sanitasi</i>   |  |  |                               |                              |                              |                                    |
| 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)<br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i> | 80.000.000,00<br><br>0,00                | 78.782.000,00<br><br>0,00                | 98,48<br><br>0,00             | 0,00<br><br>250,00           | 0,00<br><br>250,00           | 100,00<br><br>100,00               |
| 1.02.04.2.06      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga<br>- <i>Persentase usaha Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang patuh memenuhi komitmen perizinan</i>  | 35.000.000,00<br><br>0,00                | 34.311.295,00<br><br>0,00                | 98,03<br><br>0,00             | 0,00<br><br>100,00           | 0,00<br><br>100,00           | 100,00<br><br>100,00               |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan<br>- <i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>  | 35.000.000,00<br><br>0,00                | 34.311.295,00<br><br>0,00                | 98,03<br><br>0,00             | 0,00<br><br>35,00            | 0,00<br><br>35,00            | 100,00<br><br>100,00               |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b><br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i><br>- <i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>  | 2.100.200.000,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | 2.071.976.320,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | 98,66<br><br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>2,00<br><br>4,00 | 0,00<br><br>2,00<br><br>4,00 | 100,00<br><br>100,00<br><br>100,00 |

|                   |   |                  |                  |       |        |        |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>         | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 320.000.000,00   | 315.910.000,00   | 98,72 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Persentase desa siaga aktif</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 44,00  | 44,00  | 100,00 |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | 320.000.000,00   | 315.910.000,00   | 98,72 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>                            | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 4,00   | 4,00   | 100,00 |
| 1.02.05.2.02      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | 440.200.000,00   | 420.658.120,00   | 95,56 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</i>                             | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | 440.200.000,00   | 420.658.120,00   | 95,56 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>                    | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | 1.340.000.000,00 | 1.335.408.200,00 | 99,66 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Persentase kecamatan melaksanakan pembinaan posyandu aktif</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)          | 1.340.000.000,00 | 1.335.408.200,00 | 99,66 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>         | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |

|        |  |                    |                    |       |  |  |       |
|--------|--|--------------------|--------------------|-------|--|--|-------|
|        |  |                    |                    |       |  |  |       |
| JUMLAH |  | 774.331.625.735,00 | 727.816.412.643,00 | 93,99 |  |  | 99,55 |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

| KODE         | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.)   | REAL. KEUANGAN       |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |       |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------|-----------------|-------------|-------|
|              |  |                      | (Rp.)                | (%)   |                 | K           | (%)   |
| 1            | 2  | 4                    | 5                    | 6     | 7               | 8           | 6     |
| 1.01         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  | 1.825.595.998.896,00 | 1.448.250.797.863,00 | 79,33 | 0,00            | 0,00        | 84,35 |
| 1.01.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 1.259.380.860.346,00 | 1.011.026.926.854,00 | 80,28 | 0,00            | 0,00        | 76,25 |
|              | - Persentase keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra, dan DPA dengan Renja | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 100,00          | 80,00       | 80,00 |
|              | - Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 100,00          | 80,00       | 80,00 |
|              | - Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 100,00          | 80,00       | 80,00 |
|              | - Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 100,00          | 80,00       | 80,00 |
|              | - Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 2,00            | 1,00        | 50,00 |
|              | - Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 100,00          | 80,00       | 80,00 |
|              | - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 100,00          | 80,00       | 80,00 |
|              | - Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 100,00          | 80,00       | 80,00 |
| 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 500.291.850,00       | 223.515.000,00       | 44,68 | 0,00            | 0,00        | 77,78 |
|              | - Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 2,00            | 1,00        | 50,00 |

|                   |   |                      |                      |       |      |      |        |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------|------|------|--------|
|                   | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,</i>   |                      |                      |       |      |      |        |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 57.615.550,00        | 38.900.000,00        | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 66,67  |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 3,00 | 2,00 | 66,67  |
| 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD  | 122.285.300,00       | 73.800.000,00        | 60,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD</i>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD  | 46.264.000,00        | 35.790.000,00        | 77,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD</i>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD   | 187.217.000,00       | 47.895.000,00        | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 83,33  |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD</i> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 6,00 | 5,00 | 83,33  |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 86.910.000,00        | 27.130.000,00        | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 66,67  |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 3,00 | 2,00 | 66,67  |
| 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 1.247.131.263.000,00 | 1.002.115.724.926,00 | 80,35 | 0,00 | 0,00 | 95,00  |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 4,00 | 3,00 | 75,00  |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 1.246.710.639.000,00 | 1.001.706.044.926,00 | 80,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



|                   |  |                |                |        |          |          |        |
|-------------------|--|----------------|----------------|--------|----------|----------|--------|
|                   | - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 8.752,00 | 8.752,00 | 100,00 |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD  | 420.624.000,00 | 409.680.000,00 | 97,40  | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
|                   | - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 2,00     | 2,00     | 100,00 |
| 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD  | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
|                   | - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
| 1.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
| 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 661.500.000,00 | 661.500.000,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00     | 66,67  |
|                   | - Tersedianya Laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian  | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 1,00     | 0,00     | 0,00   |
| 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
| 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 661.500.000,00 | 661.500.000,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00     | 100,00 |

|                   |  |                  |                  |       |        |        |        |
|-------------------|--|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | - <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 2.674.727.500,00 | 1.837.472.000,00 | 68,70 | 0,00   | 0,00   | 88,13  |
|                   | - <i>Meningkatnya laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian</i>        | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 65,00  | 65,00  |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 1.609.335.000,00 | 1.141.110.000,00 | 70,91 | 0,00   | 0,00   | 90,00  |
|                   | - <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                      | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 10,00  | 9,00   | 90,00  |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 296.450.000,00   | 97.042.000,00    | 32,73 | 0,00   | 0,00   | 50,00  |
|                   | - <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 4,00   | 2,00   | 50,00  |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                           | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD   | 768.942.500,00   | 599.320.000,00   | 77,94 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>                   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1,00   | 1,00   | 100,00 |
| 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |

|                   |   |                  |                  |       |      |      |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|------|------|--------|
| 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD                               | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 8.086.940.496,00 | 5.912.598.996,00 | 73,11 | 0,00 | 0,00 | 66,67  |
|                   | - Tersedianya jasa pelayanan umum kantor  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00   |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 150.000.000,00   | 97.564.596,00    | 65,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 7.936.940.496,00 | 5.815.034.400,00 | 73,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 326.137.500,00   | 276.115.932,00   | 84,66 | 0,00 | 0,00 | 88,89  |
|                   | - Kendaraan Perorangan Dinas / Dinas Jabatan yang terpelihara   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 6,00 | 5,00 | 83,33  |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 126.137.500,00   | 77.393.742,00    | 61,36 | 0,00 | 0,00 | 83,33  |
|                   | - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya            | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 6,00 | 5,00 | 83,33  |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 200.000.000,00   | 198.722.190,00   | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|                   | - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

|         |  |                    |                    |       |        |       |        |
|---------|--|--------------------|--------------------|-------|--------|-------|--------|
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | 565.016.769.050,00 | 436.185.987.009,00 | 77,20 | 0,00   | 0,00  | 95,00  |
|         | - Persentase anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 100,00 | 85,00 | 85,00  |
|         | - Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional                     | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 2,01   | 2,01  | 100,00 |
|         | - Persentase anak putus sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan Non Formal    | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 64,70  | 64,70 | 100,00 |
|         | - Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)      | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 100,00 | 85,00 | 85,00  |
|         | - Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional                    | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 2,01   | 2,01  | 100,00 |
|         | - Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional                    | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 2,00   | 2,00  | 100,00 |
|         | - Cakupan guru yang berkualitas  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 100,00 | 85,00 | 85,00  |

|                   |   |   |                    |                    |       |          |        |        |
|-------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------|----------|--------|--------|
|                   |   | - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional                  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 2,00     | 2,00   | 100,00 |
|                   |   | - Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)     | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 62,52    | 62,52  | 100,00 |
|                   |   | - Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV               | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 60,00    | 60,00  | 100,00 |
|                   |   | - Rasio pengawas pemilik PAUD   | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 3,00     | 3,00   | 100,00 |
|                   |   | - Persentase Pendidikan Informal  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 100,00   | 85,00  | 85,00  |
| 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                  |   | 389.037.420.900,00 | 305.818.302.687,00 | 78,61 | 0,00     | 0,00   | 79,17  |
|                   |   | - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 712,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                               |   | 12.000.000.000,00  | 11.570.320.120,00  | 96,42 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | - Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia  | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 199,00   | 199,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |   | 1.000.000.000,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|                   |   | - Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 1.000,00 | 0,00   | 0,00   |

|                   |   |                            |                            |               |                  |                  |                  |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 1.671.843.500,00<br>0,00   | 1.199.066.500,00<br>0,00   | 71,72<br>0,00 | 0,00<br>1.227,00 | 0,00<br>1.227,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | 127.501.892.400,00<br>0,00 | 115.009.359.600,00<br>0,00 | 90,20<br>0,00 | 0,00<br>6.528,00 | 0,00<br>6.528,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.423.065.000,00<br>0,00   | 915.793.500,00<br>0,00     | 64,35<br>0,00 | 0,00<br>887,00   | 0,00<br>887,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>- Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah  | 450.000.000,00<br>0,00     | 396.265.000,00<br>0,00     | 88,06<br>0,00 | 0,00<br>740,00   | 0,00<br>740,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>- Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS  | 243.735.620.000,00<br>0,00 | 175.544.311.967,00<br>0,00 | 72,02<br>0,00 | 0,00<br>712,00   | 0,00<br>712,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>- Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan   | 100.000.000,00<br>0,00     | 98.210.000,00<br>0,00      | 98,21<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 100,00<br>100,00 |

|                   |  |  |                            |                            |               |                  |                  |                  |
|-------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |  | Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  |                            |                            |               |                  |                  |                  |
| 1.01.02.2.01.0039 |  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan<br>- Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan  | 50.000.000,00<br>0,00      | 48.947.000,00<br>0,00      | 97,89<br>0,00 | 0,00<br>2,00     | 0,00<br>1,00     | 50,00<br>50,00   |
| 1.01.02.2.01.0050 |  | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik<br>- Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar   | 1.105.000.000,00<br>0,00   | 1.036.029.000,00<br>0,00   | 93,76<br>0,00 | 0,00<br>212,00   | 0,00<br>212,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.02      |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 171.879.867.850,00<br>0,00 | 126.921.671.122,00<br>0,00 | 73,84<br>0,00 | 0,00<br>110,00   | 0,00<br>0,00     | 83,33<br>0,00    |
| 1.01.02.2.02.0025 |  | Pengadaan Mebel Sekolah<br>- Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia  | 9.000.000.000,00<br>0,00   | 6.805.730.640,00<br>0,00   | 75,62<br>0,00 | 0,00<br>149,00   | 0,00<br>149,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.02.0032 |  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama<br>- Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima Biaya Personil Peserta Didik   | 1.500.000.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 1.01.02.2.02.0038 |  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik  | 1.881.761.000,00<br>0,00   | 1.481.338.000,00<br>0,00   | 78,72<br>0,00 | 0,00<br>5.077,00 | 0,00<br>5.077,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.02.0039 |  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama           | 54.846.165.600,00<br>0,00  | 49.000.152.800,00<br>0,00  | 89,34<br>0,00 | 0,00<br>2.861,00 | 0,00<br>2.861,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.01.02.2.02.0040 |  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian | 679.189.000,00<br>0,00     | 669.666.000,00<br>0,00     | 98,60<br>0,00 | 0,00<br>887,00   | 0,00<br>887,00   | 100,00<br>100,00 |

|                   |  |  |                    |                   |       |          |        |        |
|-------------------|--|--|--------------------|-------------------|-------|----------|--------|--------|
|                   |  | <i>Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>   |                    |                   |       |          |        |        |
| 1.01.02.2.02.0041 |  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  | 345.740.000,00     | 337.500.000,00    | 97,62 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 405,00   | 405,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.02.0042 |  | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  | 102.539.400.000,00 | 67.734.679.682,00 | 66,06 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS</i>   | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 110,00   | 110,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.02.0043 |  | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  | 241.520.000,00     | 182.160.000,00    | 75,42 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 740,00   | 740,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.02.0051 |  | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 100.000.000,00     | 98.230.000,00     | 98,23 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i> | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1,00     | 1,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.02.0052 |  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 50.000.000,00      | 49.164.000,00     | 98,33 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>         | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1,00     | 1,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.02.0058 |  | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 696.092.250,00     | 563.050.000,00    | 80,89 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar</i>  | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 407,00   | 407,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.03      |  | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | 2.787.375.900,00   | 2.706.461.000,00  | 97,10 | 0,00     | 0,00   | 87,50  |
|                   |  | - <i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</i>   | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1.246,00 | 0,00   | 0,00   |
| 1.01.02.2.03.0012 |  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD   | 186.885.000,00     | 164.500.000,00    | 88,02 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia</i>   | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 7,00     | 7,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0013 |  | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD  | 377.865.000,00     | 374.521.000,00    | 99,12 | 0,00     | 0,00   | 100,00 |



|                   |  |   |                  |                |       |        |        |        |
|-------------------|--|---|------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|
|                   |  | - Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0015 |  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD  | 319.262.400,00   | 292.192.000,00 | 91,52 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 17,00  | 17,00  | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0016 |  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD   | 888.009.500,00   | 878.858.000,00 | 98,97 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 935,00 | 935,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0017 |  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | 271.894.000,00   | 268.149.000,00 | 98,62 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0019 |  | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD   | 193.460.000,00   | 190.310.000,00 | 98,37 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.01.02.2.03.0026 |  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  | 550.000.000,00   | 537.931.000,00 | 97,81 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |  | - Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 1,00   | 1,00   | 100,00 |
| 1.01.02.2.04      |  | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   | 1.312.104.400,00 | 739.552.200,00 | 56,36 | 0,00   | 0,00   | 87,50  |
|                   |  | - Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 1,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.01.02.2.04.0010 |  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan  | 500.000.000,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                   |  | - Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan yang menerima biaya personal peserta didik   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 310,00 | 0,00   | 0,00   |

|                   |   |                               |                               |                      |                |                |                       |
|-------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>- <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>   | 387.860.400,00<br>0,00        | 341.905.200,00<br>0,00        | 88,15<br>0,00        | 0,00<br>25,00  | 0,00<br>25,00  | 100,00<br>100,00      |
| 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>- <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i> | 137.732.000,00<br>0,00        | 136.750.000,00<br>0,00        | 99,29<br>0,00        | 0,00<br>213,00 | 0,00<br>426,00 | 200,00<br>200,00      |
| 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>- <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>  | 88.592.000,00<br>0,00         | 88.049.000,00<br>0,00         | 99,39<br>0,00        | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00      |
| 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>- <i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>  | 47.920.000,00<br>0,00         | 43.700.000,00<br>0,00         | 91,19<br>0,00        | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00      |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 100,00<br>100,00      |
| 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan<br>- <i>Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>  | 150.000.000,00<br>0,00        | 129.148.000,00<br>0,00        | 86,10<br>0,00        | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00      |
| 1.01.03           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b><br>- <i>Cakupan Kurikulum Satuan Pendidikan Yang Relevan</i>  | <b>916.297.500,00</b><br>0,00 | <b>765.268.000,00</b><br>0,00 | <b>83,52</b><br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>73,00  | <b>73,00</b><br>73,00 |

|                   |   |                       |                       |              |             |             |               |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar   | 713.597.500,00        | 604.974.000,00        | 84,78        | 0,00        | 0,00        | 91,07         |
|                   | - <i>Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1.011,00    | 650,00      | 64,29         |
| 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar  | 46.198.000,00         | 45.892.000,00         | 99,34        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar  | 268.664.000,00        | 268.159.000,00        | 99,81        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya</i>                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 495,00      | 495,00      | 100,00        |
| 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar  | 398.735.500,00        | 290.923.000,00        | 72,96        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun</i>                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 1.01.03.2.02      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                     | 202.700.000,00        | 160.294.000,00        | 79,08        | 0,00        | 0,00        | 50,00         |
|                   | - <i>Pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</i>                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 4,00        | 0,00        | 0,00          |
| 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                      | 202.700.000,00        | 160.294.000,00        | 79,08        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang tersusun</i>                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 1.01.04           | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>   | <b>282.072.000,00</b> | <b>272.616.000,00</b> | <b>96,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - <i>Presentase pemenuhan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan</i> | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00        |

|                   |   |                            |                            |                   |                    |                    |                      |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br><br>- <i>Persentase Satuan Pendidikan Yang Dihitung / Dipetakan Dan Ditata Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>                               | 282.072.000,00<br><br>0,00 | 272.616.000,00<br><br>0,00 | 96,65<br><br>0,00 | 0,00<br><br>100,00 | 0,00<br><br>100,00 | 100,00<br><br>100,00 |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br><br>- <i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>       | 132.470.500,00<br><br>0,00 | 127.070.500,00<br><br>0,00 | 95,92<br><br>0,00 | 0,00<br><br>1,00   | 0,00<br><br>1,00   | 100,00<br><br>100,00 |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>- <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> | 149.601.500,00<br><br>0,00 | 145.545.500,00<br><br>0,00 | 97,29<br><br>0,00 | 0,00<br><br>1,00   | 0,00<br><br>1,00   | 100,00<br><br>100,00 |
|                   |   |                            |                            |                   |                    |                    |                      |
| JUMLAH            |   | 1.825.595.998.896,00       | 1.448.250.797.863,00       | 79,33             |                    |                    | 84,35                |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

| KODE | URAIAN | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN |     | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |     |
|------|--------|--------------------|----------------|-----|-----------------|-------------|-----|
|      |        |                    | (Rp.)          | (%) |                 | K           | (%) |
| 1    | 2      | 4                  | 5              | 6   | 7               | 8           | 6   |

|                   |  |                           |                           |              |              |              |              |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.03              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>  | <b>286.513.876.928,00</b> | <b>278.940.994.744,00</b> | <b>97,36</b> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <b>62,81</b> |
| 1.03.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>33.573.408.480,00</b>  | <b>28.601.685.217,00</b>  | <b>85,19</b> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <b>0,00</b>  |
| 1.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 721.485.000,00            | 648.939.756,00            | 89,95        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | 40,15        |
|                   | - Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>11,00</i> | <i>7,00</i>  | <i>63,64</i> |
| 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 201.920.000,00            | 196.919.910,00            | 97,52        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | 63,64        |
|                   | - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>11,00</i> | <i>7,00</i>  | <i>63,64</i> |
| 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD  | 429.425.000,00            | 386.629.846,00            | 90,03        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | 33,33        |
|                   | - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>6,00</i>  | <i>2,00</i>  | <i>33,33</i> |
| 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 90.140.000,00             | 65.390.000,00             | 72,54        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | 0,00         |
|                   | - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>1,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 22.654.252.000,00         | 19.345.390.623,00         | 85,39        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | 88,08        |
|                   | - Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>4,00</i>  | <i>3,00</i>  | <i>75,00</i> |
| 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 22.428.504.000,00         | 19.120.022.933,00         | 85,25        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | 77,32        |
|                   | - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>  | <i>97,00</i> | <i>75,00</i> | <i>77,32</i> |

|                   |   |  |                          |                          |               |                |               |                  |
|-------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.03.01.2.02.0003 |   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD<br>- <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD</i>   | 104.210.000,00<br>0,00   | 104.099.720,00<br>0,00   | 99,89<br>0,00 | 0,00<br>2,00   | 0,00<br>2,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.03.01.2.02.0007 |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD<br>- <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i> | 121.538.000,00<br>0,00   | 121.267.970,00<br>0,00   | 99,78<br>0,00 | 0,00<br>2,00   | 0,00<br>2,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - <i>Terkelolanya Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>   | 945.703.200,00<br>0,00   | 752.571.050,00<br>0,00   | 79,58<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 68,18<br>100,00  |
| 1.03.01.2.05.0003 |   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian<br>- <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>   | 945.703.200,00<br>0,00   | 752.571.050,00<br>0,00   | 79,58<br>0,00 | 0,00<br>11,00  | 0,00<br>4,00  | 36,36<br>36,36   |
| 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah        | - <i>Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 12 bulan</i>  | 1.989.619.600,00<br>0,00 | 1.908.117.735,00<br>0,00 | 95,90<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>75,00 | 43,57<br>75,00   |
| 1.03.01.2.06.0002 |   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>  | 1.339.239.600,00<br>0,00 | 1.300.302.915,00<br>0,00 | 97,09<br>0,00 | 0,00<br>42,00  | 0,00<br>39,00 | 92,86<br>92,86   |
| 1.03.01.2.06.0005 |   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>- <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>  | 50.000.000,00<br>0,00    | 49.791.000,00<br>0,00    | 99,58<br>0,00 | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00     |

|                   |   |                          |                          |               |               |               |                |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD<br>- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>  | 500.380.000,00<br>0,00   | 461.719.980,00<br>0,00   | 92,27<br>0,00 | 0,00<br>12,00 | 0,00<br>6,00  | 50,00<br>50,00 |
| 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD<br>- <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>  | 100.000.000,00<br>0,00   | 96.303.840,00<br>0,00    | 96,30<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   |
| 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>- <i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun</i>  | 968.672.000,00<br>0,00   | 895.210.000,00<br>0,00   | 92,42<br>0,00 | 0,00<br>24,00 | 0,00<br>20,00 | 31,48<br>83,33 |
| 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel<br>- <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>  | 350.000.000,00<br>0,00   | 345.370.000,00<br>0,00   | 98,68<br>0,00 | 0,00<br>25,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   |
| 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>- <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i> | 618.672.000,00<br>0,00   | 549.840.000,00<br>0,00   | 88,87<br>0,00 | 0,00<br>18,00 | 0,00<br>2,00  | 11,11<br>11,11 |
| 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>- <i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun</i>  | 3.839.067.600,00<br>0,00 | 2.713.989.562,00<br>0,00 | 70,69<br>0,00 | 0,00<br>4,00  | 0,00<br>2,00  | 55,00<br>50,00 |
| 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                              | 2.575.782.000,00<br>0,00 | 1.602.623.332,00<br>0,00 | 62,22<br>0,00 | 0,00<br>4,00  | 0,00<br>3,00  | 75,00<br>75,00 |
| 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>  | 1.263.285.600,00<br>0,00 | 1.111.366.230,00<br>0,00 | 87,97<br>0,00 | 0,00<br>5,00  | 0,00<br>2,00  | 40,00<br>40,00 |
| 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>- <i>Jumlah barang milik daerah yang dipeliharaan dalam satu tahun</i>   | 2.454.609.080,00<br>0,00 | 2.337.466.491,00<br>0,00 | 95,23<br>0,00 | 0,00<br>32,00 | 0,00<br>16,00 | 48,06<br>50,00 |

|                   |   |  |  |  |   |   |   |
|-------------------|---|--|--|--|---|---|---|
| 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>- <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>                          | 182.193.500,00<br>0,00                                   | 160.425.660,00<br>0,00                                   | 88,05<br>0,00                                | 0,00<br>15,00                               | 0,00<br>3,00                                | 20,00<br>20,00                                      |
| 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>- <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   | 1.130.000.000,00<br>0,00                                 | 1.122.629.399,00<br>0,00                                 | 99,35<br>0,00                                | 0,00<br>18,00                               | 0,00<br>17,00                               | 94,44<br>94,44                                      |
| 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>- <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>   | 1.142.415.580,00<br>0,00                                 | 1.054.411.432,00<br>0,00                                 | 92,30<br>0,00                                | 0,00<br>18,00                               | 0,00<br>5,00                                | 27,78<br>27,78                                      |
| 1.03.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b><br>- <i>Persentase Penanganan Banjir</i><br><br>- <i>Persentase Penanganan kekeringan</i><br><br>- <i>Meningkatnya pengembangan sistem irigasi yang luasnya dibawah 10000 Ha dalam 1 daerah kabupaten/kota</i> | <b>17.787.350.092,00</b><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | <b>17.678.776.696,00</b><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | <b>99,39</b><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | <b>100,00</b><br>100,00<br><br>100,00<br><br>100,00 |
| 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Upaya Penanganan Banjir dan kekeringan</i>  | 17.614.370.092,00<br>0,00                                | 17.505.796.696,00<br>0,00                                | 99,38<br>0,00                                | 0,00<br>6,00                                | 0,00<br>4,00                                | 31,33<br>66,67                                      |
| 1.03.02.2.01.0119 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku<br>- <i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun</i>  | 5.476.470.000,00<br>0,00                                 | 5.453.715.000,00<br>0,00                                 | 99,58<br>0,00                                | 0,00<br>25,00                               | 0,00<br>12,00                               | 48,00<br>48,00                                      |



|                   |  |                          |                          |                |               |              |                  |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya<br>- <i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>   | 994.000.000,00<br>0,00   | 982.577.000,00<br>0,00   | 98,85<br>0,00  | 0,00<br>10,00 | 0,00<br>4,00 | 40,00<br>40,00   |
| 1.03.02.2.01.0124 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi<br>- <i>Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun</i>   | 6.895.000.000,00<br>0,00 | 6.880.686.600,00<br>0,00 | 99,79<br>0,00  | 0,00<br>3,00  | 0,00<br>1,00 | 33,33<br>33,33   |
| 1.03.02.2.01.0127 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku<br>- <i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun</i>   | 2.406.400.092,00<br>0,00 | 2.371.390.765,00<br>0,00 | 98,55<br>0,00  | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya<br>- <i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun</i> | 1.842.500.000,00<br>0,00 | 1.817.427.331,00<br>0,00 | 98,64<br>0,00  | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 1.03.02.2.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Dokumen sistem irigasi yang luasnya dibawah 1000 HA</i>   | 172.980.000,00<br>0,00   | 172.980.000,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.03.02.2.02.0031 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa<br>- <i>Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi</i>  | 172.980.000,00<br>0,00   | 172.980.000,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>1,00  | 0,00<br>1,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.03.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | <b>9.846.113.957,00</b>  | <b>9.770.915.562,00</b>  | <b>99,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>    |

|                   |   |                         |                         |              |          |        |               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------|--------|---------------|
|                   | - <i>Presentase Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan</i>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 100,00        |
| 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                      | 9.846.113.957,00        | 9.770.915.562,00        | 99,24        | 0,00     | 0,00   | 36,29         |
|                   | - <i>Jumlah sambungan rumah terpasang</i>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 100,00        |
| 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                   | 222.000.000,00          | 217.363.310,00          | 97,91        | 0,00     | 0,00   | 0,00          |
|                   | - <i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 80,00    | 0,00   | 0,00          |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | 350.820.000,00          | 347.540.722,00          | 99,07        | 0,00     | 0,00   | 0,00          |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00     | 0,00   | 0,00          |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan   | 9.273.293.957,00        | 9.206.011.530,00        | 99,27        | 0,00     | 0,00   | 45,15         |
|                   | - <i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1.329,00 | 600,00 | 45,15         |
| 1.03.06           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   | <b>2.951.876.000,00</b> | <b>2.836.178.023,00</b> | <b>96,08</b> | 0,00     | 0,00   | <b>100,00</b> |
|                   | - <i>Persentase Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota</i>                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 100,00        |
| 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                | 2.951.876.000,00        | 2.836.178.023,00        | 96,08        | 0,00     | 0,00   | 48,64         |
|                   | - <i>Panjang sistem drainase yang terhubung langsung dengan</i>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 100,00        |

|                   |   |                           |                           |              |             |             |              |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | <i>sungai dalam daerah kabupaten/kota</i>   |                           |                           |              |             |             |              |
| 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan  | 2.754.876.000,00          | 2.640.277.023,00          | 95,84        | 0,00        | 0,00        | 45,93        |
|                   | - <i>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan</i>                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 17.417,00   | 8.000,00    | 45,93        |
| 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan  | 197.000.000,00            | 195.901.000,00            | 99,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
|                   | - <i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 3.667,00    | 0,00        | 0,00         |
| 1.03.10           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  | <b>222.355.128.399,00</b> | <b>220.053.439.246,00</b> | <b>98,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,81</b> |
|                   | - <i>Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap</i>                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 87,71       | 84,91       | 96,81        |
| 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  | 222.355.128.399,00        | 220.053.439.246,00        | 98,96        | 0,00        | 0,00        | 92,29        |
|                   | - <i>Panjang drainase jalan dalam kondisi baik</i>  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|                   | - <i>Panjang jalan dalam kondisi baik</i>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|                   | - <i>Panjang pedestrian jalan dalam kondisi baik</i>                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan   | 707.000.000,00            | 703.756.083,00            | 99,54        | 0,00        | 0,00        | 90,00        |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</i>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 4,00        | 3,60        | 90,00        |
| 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                       | 18.850.419.505,00         | 18.117.224.382,00         | 96,11        | 0,00        | 0,00        | 93,92        |
|                   | - <i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i> | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 87,00       | 81,71       | 93,92        |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan  | 12.994.972.000,00         | 12.900.756.599,00         | 99,27        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |

|                   |   |                    |                    |       |        |        |        |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | - Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala    | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 13,00  | 13,00  | 100,00 |
| 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                    | 6.123.537.670,00   | 5.980.829.960,00   | 97,67 | 0,00   | 0,00   | 85,00  |
|                   | - Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar    | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 3,80   | 3,23   | 85,00  |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan                              | 173.625.591.864,00 | 173.279.097.352,00 | 99,80 | 0,00   | 0,00   | 84,00  |
|                   | - Jumlah Jembatan yang Dibangun                   | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 400,00 | 336,00 | 84,00  |
| 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                     | 3.483.000.000,00   | 3.420.885.170,00   | 98,22 | 0,00   | 0,00   | 70,00  |
|                   | - Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 947,00 | 662,90 | 70,00  |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                          | 6.570.607.360,00   | 5.650.889.700,00   | 86,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin      | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 20,00  | 20,00  | 100,00 |
|                   |   |                    |                    |       |        |        |        |
| JUMLAH            |   | 286.513.876.928,00 | 278.940.994.744,00 | 97,36 |        |        | 62,81  |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

| KODE | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN    |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|------|--|--------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------|--------|
|      |  |                    | (Rp.)             | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1    | 2  | 4                  | 5                 | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 83.921.872.279,00  | 83.360.083.774,00 | 99,33 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |

|                   |   |                                   |                                   |                       |                          |                          |                            |
|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.03.05           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b><br>- <i>Presentase peningkatan jumlah penduduk bebas BABS</i>   | 19.482.470.000,00<br>0,00         | 19.465.876.630,00<br>0,00         | 99,91<br>0,00         | 0,00<br>86,48            | 0,00<br>86,48            | 100,00<br>100,00           |
| 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Pembangunan SPALD-S</i>  | 19.482.470.000,00<br>0,00         | 19.465.876.630,00<br>0,00         | 99,91<br>0,00         | 0,00<br>1.385,00         | 0,00<br>1.385,00         | 100,00<br>100,00           |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat<br>- <i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>  | 18.732.470.000,00<br>0,00         | 18.716.526.000,00<br>0,00         | 99,91<br>0,00         | 0,00<br>1.385,00         | 0,00<br>1.385,00         | 100,00<br>100,00           |
| 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)<br>- <i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>                                  | 750.000.000,00<br>0,00            | 749.350.630,00<br>0,00            | 99,91<br>0,00         | 0,00<br>16,00            | 0,00<br>16,00            | 100,00<br>100,00           |
| 1.03.06           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b><br>- <i>Persentase panjang drainase desa yang terbangun</i>   | 18.551.814.600,00<br>0,00         | 18.414.860.921,00<br>0,00         | 99,26<br>0,00         | 0,00<br>16,23            | 0,00<br>16,23            | 100,00<br>100,00           |
| 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan</i><br>- <i>Jumlah Dokumen Monev Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman</i> | 18.551.814.600,00<br>0,00<br>0,00 | 18.414.860.921,00<br>0,00<br>0,00 | 99,26<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>9.302,50<br>1,00 | 0,00<br>9.302,50<br>1,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan<br>- <i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>  | 18.551.814.600,00<br>0,00         | 18.414.860.921,00<br>0,00         | 99,26<br>0,00         | 0,00<br>9.302,50         | 0,00<br>9.302,50         | 100,00<br>100,00           |
| 1.03.10           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b><br>- <i>Persentase panjang jalan desa yang terbangun</i>   | 45.887.587.679,00<br>0,00         | 45.479.346.223,00<br>0,00         | 99,11<br>0,00         | 0,00<br>76,49            | 0,00<br>76,49            | 100,00<br>100,00           |
| 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota<br>- <i>panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun</i>   | 45.887.587.679,00<br>0,00         | 45.479.346.223,00<br>0,00         | 99,11<br>0,00         | 0,00<br>18.831,00        | 0,00<br>18.831,00        | 100,00<br>100,00           |

|                   |   |                           |                           |              |             |             |               |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - jumlah dokumen money pembangunan jalan lingkungan permukiman  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan   | 45.887.587.679,00         | 45.479.346.223,00         | 99,11        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Panjang Jalan yang Dibangun   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 18,30       | 18,30       | 100,00        |
| 1.04              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | <b>254.993.670.526,00</b> | <b>240.640.601.436,00</b> | <b>94,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,54</b>  |
| 1.04.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>34.452.454.488,00</b>  | <b>31.152.394.557,00</b>  | <b>90,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Indeks Reformasi Birokrasi  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 84,00       | 84,00       | 100,00        |
| 1.04.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.395.066.400,00          | 976.967.595,00            | 70,03        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 37,00       | 37,00       | 100,00        |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 435.021.200,00            | 185.539.250,00            | 42,65        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 4,00        | 4,00        | 100,00        |
| 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD  | 23.160.000,00             | 22.908.500,00             | 98,91        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD  | 9.920.000,00              | 9.536.000,00              | 96,13        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD  | 20.000.000,00             | 19.425.000,00             | 97,13        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PD   | 20.000.000,00             | 19.572.000,00             | 97,86        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD                                 | 749.365.200,00            | 619.953.795,00            | 82,73        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |

|                   |   |                   |                   |       |        |        |        |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | - <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 19,00  | 19,00  | 100,00 |
| 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 137.600.000,00    | 100.033.050,00    | 72,70 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 4,00   | 4,00   | 100,00 |
| 1.04.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 19.371.161.000,00 | 16.743.944.117,00 | 86,44 | 0,00   | 0,00   | 92,86  |
|                   | - <i>Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 21,00  | 15,00  | 71,43  |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 19.016.551.000,00 | 16.392.036.567,00 | 86,20 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 101,00 | 101,00 | 100,00 |
| 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD  | 223.310.000,00    | 221.982.550,00    | 99,41 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 17,00  | 17,00  | 100,00 |
| 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD   | 131.300.000,00    | 129.925.000,00    | 98,95 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i>                     | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 4,00   | 4,00   | 100,00 |
| 1.04.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 2.827.364.660,00  | 2.791.368.195,00  | 98,73 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 26,00  | 26,00  | 100,00 |
| 1.04.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 742.929.660,00    | 707.083.195,00    | 95,17 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 12,00  | 12,00  | 100,00 |
| 1.04.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 50.000.000,00     | 49.850.000,00     | 99,70 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 12,00  | 12,00  | 100,00 |

|                   |   |                          |                          |                |                |                |                  |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>- <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 1.416.435.000,00<br>0,00 | 1.416.435.000,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>- <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | 618.000.000,00<br>0,00   | 618.000.000,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>70,00  | 0,00<br>70,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>- <i>Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan</i>   | 8.908.063.000,00<br>0,00 | 8.777.732.950,00<br>0,00 | 98,54<br>0,00  | 0,00<br>52,00  | 0,00<br>52,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                                       | 6.964.223.000,00<br>0,00 | 6.847.442.250,00<br>0,00 | 98,32<br>0,00  | 0,00<br>44,00  | 0,00<br>44,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD<br>- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>                              | 1.943.840.000,00<br>0,00 | 1.930.290.700,00<br>0,00 | 99,30<br>0,00  | 0,00<br>12,00  | 0,00<br>12,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>- <i>Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan</i>      | 970.360.340,00<br>0,00   | 905.057.350,00<br>0,00   | 93,27<br>0,00  | 0,00<br>12,00  | 0,00<br>12,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 560.000.000,00<br>0,00   | 521.429.900,00<br>0,00   | 93,11<br>0,00  | 0,00<br>45,00  | 0,00<br>45,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                | 100.000.000,00<br>0,00   | 76.280.000,00<br>0,00    | 76,28<br>0,00  | 0,00<br>3,00   | 0,00<br>3,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>  | 310.360.340,00<br>0,00   | 307.347.450,00<br>0,00   | 99,03<br>0,00  | 0,00<br>5,00   | 0,00<br>5,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.04.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>- <i>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun</i>                    | 980.439.088,00<br>0,00   | 957.324.350,00<br>0,00   | 97,64<br>0,00  | 0,00<br>142,00 | 0,00<br>142,00 | 100,00<br>100,00 |



|                   |  |   |   |                                      |                                    |                                    |   |
|-------------------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>- <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>                       | 426.492.500,00<br>0,00                          | 413.168.600,00<br>0,00                          | 96,88<br>0,00                        | 0,00<br>30,00                      | 0,00<br>30,00                      | 100,00<br>100,00                            |
| 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>- <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>  | 203.946.588,00<br>0,00                          | 195.826.500,00<br>0,00                          | 96,02<br>0,00                        | 0,00<br>107,00                     | 0,00<br>107,00                     | 100,00<br>100,00                            |
| 1.04.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>- <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>  | 350.000.000,00<br>0,00                          | 348.329.250,00<br>0,00                          | 99,52<br>0,00                        | 0,00<br>1,00                       | 0,00<br>1,00                       | 100,00<br>100,00                            |
| 1.04.02           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b><br>- <i>Persentase rumah korban bencana yang ditangani</i><br>- <i>Persentase rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang ditangani</i><br>- <i>Persentase penerbitan dokumen pertelaan rumah susun</i> | <b>4.420.821.250,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>2.401.871.939,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>54,33</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 1.04.02.2.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>                           | 150.000.000,00<br>0,00                          | 114.386.000,00<br>0,00                          | 76,26<br>0,00                        | 0,00<br>12,00                      | 0,00<br>12,00                      | 100,00<br>100,00                            |
| 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana<br>- <i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>   | 100.000.000,00<br>0,00                          | 97.386.000,00<br>0,00                           | 97,39<br>0,00                        | 0,00<br>3,00                       | 0,00<br>3,00                       | 100,00<br>100,00                            |
| 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi</i>   | 50.000.000,00<br>0,00                           | 17.000.000,00<br>0,00                           | 34,00<br>0,00                        | 0,00<br>3,00                       | 0,00<br>3,00                       | 100,00<br>100,00                            |

|                   |  |                                  |                                  |                       |                       |                       |                          |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                   | <i>Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</i>  |                                  |                                  |                       |                       |                       |                          |
| 1.04.02.2.02      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah peserta TIM Satgas, TIM Pendamping dan Fasilitator yang terlatih</i>  | 635.060.000,00<br>0,00           | 304.135.000,00<br>0,00           | 47,89<br>0,00         | 0,00<br>200,00        | 0,00<br>200,00        | 100,00<br>100,00         |
| 1.04.02.2.02.0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator<br>- <i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>   | 635.060.000,00<br>0,00           | 304.135.000,00<br>0,00           | 47,89<br>0,00         | 0,00<br>200,00        | 0,00<br>200,00        | 100,00<br>100,00         |
| 1.04.02.2.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i><br>- <i>Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i> | 2.685.761.250,00<br>0,00<br>0,00 | 1.465.945.606,00<br>0,00<br>0,00 | 54,58<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>64,00<br>1,00 | 0,00<br>36,00<br>1,00 | 64,93<br>56,25<br>100,00 |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana<br>- <i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>  | 600.000.000,00<br>0,00           | 220.000.000,00<br>0,00           | 36,67<br>0,00         | 0,00<br>30,00         | 0,00<br>10,00         | 33,33<br>33,33           |
| 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana<br>- <i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>   | 800.000.000,00<br>0,00           | 760.000.000,00<br>0,00           | 95,00<br>0,00         | 0,00<br>20,00         | 0,00<br>20,00         | 100,00<br>100,00         |
| 1.04.02.2.03.0007 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah</i>   | 497.781.250,00<br>0,00           | 485.945.606,00<br>0,00           | 97,62<br>0,00         | 0,00<br>3,00          | 0,00<br>3,00          | 100,00<br>100,00         |
| 1.04.02.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>   | 787.980.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>3,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             |
| 1.04.02.2.06      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan   | 900.000.000,00                   | 497.855.333,00                   | 55,32                 | 0,00                  | 0,00                  | 100,00                   |

|                   |  |                         |                         |              |       |       |               |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------|---------------|
|                   | - <i>Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan</i>                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 5,00  | 5,00  | 100,00        |
| 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                    | 900.000.000,00          | 497.855.333,00          | 55,32        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00  | 1,00  | 100,00        |
| 1.04.02.2.07      | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)   | 50.000.000,00           | 19.550.000,00           | 39,10        | 0,00  | 0,00  | 66,67         |
|                   | - <i>Jumlah dokumen penerbitan SKGB</i>  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 4,00  | 4,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah dokumen pengawasan pengendalian perumahan</i>  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00  | 0,00  | 0,00          |
| 1.04.02.2.07.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)                               | 50.000.000,00           | 19.550.000,00           | 39,10        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 4,00  | 4,00  | 100,00        |
| 1.04.03           | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | <b>4.712.190.000,00</b> | <b>4.414.108.330,00</b> | <b>93,67</b> | 0,00  | 0,00  | <b>100,00</b> |
|                   | - <i>persentase penanganan kawasan kumuh yang belum terselesaikan</i>  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 6,36  | 6,36  | 100,00        |
| 1.04.03.2.03      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                 | 4.712.190.000,00        | 4.414.108.330,00        | 93,67        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Tersedianya dokumen penangan permukiman kumuh, DED kawasan kumuh dan luas kawasan kumuh yang tertangani</i>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00  | 1,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah dokumen monev penanganan kawasan kumuh</i>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1,00  | 1,00  | 100,00        |
| 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh  | 500.000.000,00          | 491.069.500,00          | 98,21        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00  | 2,00  | 100,00        |
| 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh   | 4.212.190.000,00        | 3.923.038.830,00        | 93,14        | 0,00  | 0,00  | 100,00        |
|                   | - <i>Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar</i>  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 12,00 | 12,00 | 100,00        |

|                   |  |  |  |   |   |   |  |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 1.04.04           | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b><br>- <i>Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>  | 44.697.400.000,00<br>0,00                                      | 43.089.102.700,00<br>0,00                                      | 96,40<br>0,00                                     | 0,00<br>4,30  | 0,00<br>4,30  | 100,00<br>100,00   |
| 1.04.04.2.01      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah lokasi pencegahan kawasan kumuh</i><br>- <i>Jumlah dokumen monev pencegahan kawasan kumuh</i>  | 44.697.400.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 43.089.102.700,00<br>0,00<br>0,00                              | 96,40<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>133,00<br>133,00                              | 0,00<br>133,00<br>133,00                              | 100,00<br>100,00<br>100,00                                   |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha<br>- <i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i> | 44.697.400.000,00<br>0,00                                      | 43.089.102.700,00<br>0,00                                      | 96,40<br>0,00                                     | 0,00<br>2.020,00                                      | 0,00<br>2.020,00                                      | 100,00<br>100,00   |
| 1.04.05           | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b><br>- <i>persentase PSU yang diserahterimakan</i><br>- <i>persentase pemenuhan jalan perumahan</i><br>- <i>persentase PJUL yang dibangun</i><br><br>- <i>Persentase taman yang dibangun</i><br>- <i>persentase pemenuhan drainase di perumahan</i>   | 166.710.804.788,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00 | 159.583.123.910,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00 | 95,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>15,50<br>16,50<br>38,61<br><br>28,00<br>14,85 | 0,00<br>15,50<br>16,50<br>38,61<br><br>28,00<br>14,85 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br><br>100,00<br>100,00 |
| 1.04.05.2.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan<br>- <i>jumlah dokumen monev penyediaan PSU</i><br>- <i>Jumlah Taman lingkungan yang direvitalisasi</i><br>- <i>Panjang Drainase lingkungan perumahan yang ditingkatkan</i><br>- <i>Panjang Jalan lingkungan perumahan yang ditingkatkan</i>  | 166.710.804.788,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 159.583.123.910,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 95,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>1,00<br>2.664,00<br>1.992,00<br>6.550,00      | 0,00<br>1,00<br>2.664,00<br>1.992,00<br>6.550,00      | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00               |

|                   |   |   |                          |                         |              |             |             |               |
|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian PSU</li> <li>- jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan</li> <li>- jumlah dokumen PSU perumahan yang sudah dimanfaatkan</li> <li>- Jumlah PJUL yang dibangun</li> <li>- jumlah psu yang sudah diserahkan</li> <li>- Jumlah Taman Lingkungan yang dibangun</li> </ul> | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   |   |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   |   |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 5,00        | 5,00        | 100,00        |
|                   |   |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 860,00      | 860,00      | 100,00        |
|                   |   |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 5,00        | 5,00        | 100,00        |
|                   |   |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 2.128,00    | 2.128,00    | 100,00        |
| 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan  |   | 2.900.000.000,00         | 2.726.816.932,00        | 94,03        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</li> </ul>   |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 7,00        | 7,00        | 100,00        |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian  |   | 160.240.804.788,00       | 153.405.607.943,00      | 95,73        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</li> </ul>               |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 150,00      | 150,00      | 100,00        |
| 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan  |   | 3.420.000.000,00         | 3.301.719.035,00        | 96,54        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</li> </ul> |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 4,00        | 4,00        | 100,00        |
| 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang   |   | 150.000.000,00           | 148.980.000,00          | 99,32        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang</li> </ul>                                      |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 2.10              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>  |   | <b>66.934.360.078,00</b> | <b>3.715.913.393,00</b> | <b>5,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2.10.04           | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>  |   | <b>299.440.000,00</b>    | <b>225.727.049,00</b>   | <b>75,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- persentase Penyelesaian Potensi Sengketa Tanah milik pemerintah Daerah</li> </ul>  |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 29,00       | 29,00       | 100,00        |
| 2.10.04.2.01      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota   |   | 299.440.000,00           | 225.727.049,00          | 75,38        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penyelesaian Potensi Sengketa Tanah milik Pemerintah Daerah</li> </ul>  |   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 6,00        | 6,00        | 100,00        |

|                   |  |                                 |                                 |                      |                |                |                         |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 2.10.04.2.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>  | 199.440.000,00<br>0,00          | 126.311.009,00<br>0,00          | 63,33<br>0,00        | 0,00<br>2,00   | 0,00<br>2,00   | 100,00<br>100,00        |
| 2.10.04.2.01.0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>  | 100.000.000,00<br>0,00          | 99.416.040,00<br>0,00           | 99,42<br>0,00        | 0,00<br>2,00   | 0,00<br>2,00   | 100,00<br>100,00        |
| 2.10.05           | <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b><br>- <i>Persentase pemenuhan data masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</i>  | <b>100.000.000,00</b><br>0,00   | <b>99.662.118,00</b><br>0,00    | <b>99,66</b><br>0,00 | 0,00<br>52,00  | 0,00<br>52,00  | <b>100,00</b><br>100,00 |
| 2.10.05.2.01      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>jumlah dokumen Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/ota</i>  | 100.000.000,00<br>0,00          | 99.662.118,00<br>0,00           | 99,66<br>0,00        | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00        |
| 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>- <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | 100.000.000,00<br>0,00          | 99.662.118,00<br>0,00           | 99,66<br>0,00        | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00        |
| 2.10.08           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b><br>- <i>Persentase pengelolaan tanah kosong untuk TPU</i>  | <b>3.036.803.500,00</b><br>0,00 | <b>2.866.892.412,00</b><br>0,00 | <b>94,40</b><br>0,00 | 0,00<br>25,92  | 0,00<br>25,92  | <b>100,00</b><br>100,00 |
| 2.10.08.2.02      | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong<br>- <i>Luas tanah kosong yang dikelola untuk TPU</i>   | 3.036.803.500,00<br>0,00        | 2.866.892.412,00<br>0,00        | 94,40<br>0,00        | 0,00<br>121,97 | 0,00<br>121,97 | 100,00<br>100,00        |

|                   |   |                           |                           |              |             |             |               |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | - jumlah dokumen perencanaan penataan TPU   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   | - jumlah dokumen monev penataan TPU   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 2.10.08.2.02.0002 | Pemanfaatan Tanah Kosong  | 3.036.803.500,00          | 2.866.892.412,00          | 94,40        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 3,00        | 3,00        | 100,00        |
| 2.10.10           | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>   | <b>63.498.116.578,00</b>  | <b>523.631.814,00</b>     | <b>0,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - persentase pemenuhan target tahunan penyediaan lahan untuk kepentingan umum                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 40,50       | 40,50       | 100,00        |
|                   | - persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 58,25       | 58,25       | 100,00        |
| 2.10.10.2.01      | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                      | 63.498.116.578,00         | 523.631.814,00            | 0,82         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Luas Lahan yang disediakan   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 42.200,00   | 42.200,00   | 100,00        |
|                   | - jumlah dokumen monev pengadaan tanah untuk jalan  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah dokumen penilaian ganti rugi tanah untuk jalan   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah dokumen hasil pengadaan tanah untuk jalan  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   | - jumlah dokumen penilaian ganti rugi tanah untuk kepentingan umum                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah dokumen hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   | - Luas lahan untuk kepentingan umum dalam 1 tahun yang tersedia   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 49.411,00   | 49.411,00   | 100,00        |
|                   | - Jumlah dokumen monev pengadaan tanah untuk kepentingan umum   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
| 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah  | 63.498.116.578,00         | 523.631.814,00            | 0,82         | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00        |
|                   |   |                           |                           |              |             |             |               |
| <b>JUMLAH</b>     |   | <b>405.849.902.883,00</b> | <b>327.716.598.603,00</b> | <b>80,75</b> |             |             | <b>98,51</b>  |

| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : |  |                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |       |                 |             |        |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------|-----------------|-------------|--------|
| KODE                          | URAIAN   | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN          |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|                               |  |                    | (Rp.)                   | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1                             | 2  | 4                  | 5                       | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 1.05                          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                        | 28.632.272.597,00  | 25.365.774.278,00       | 88,59 | 0,00            | 0,00        | 95,70  |
| 1.05.01                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 19.753.033.887,00  | 16.867.598.380,00       | 85,39 | 0,00            | 0,00        | 54,42  |
|                               | - Indeks Reformasi Birokrasi<br>Perangkat Daerah   | 0,00               | 0,00                    | 0,00  | 74,00           | 40,27       | 54,42  |
| 1.05.01.2.01                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | 306.000.000,00     | 292.099.100,00          | 95,46 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Presentase Keselarasan Renstra<br>Dengan Rencana Pembangunan<br>Daerah, Renja dengan Renstra<br>dan DPA dengan Renja | 0,00               | 0,00                    | 0,00  | 100,00          | 100,00      | 100,00 |
| 1.05.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   | 156.000.000,00     | 145.535.100,00          | 93,29 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   | 0,00               | 0,00                    | 0,00  | 9,00            | 9,00        | 100,00 |
| 1.05.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 150.000.000,00     | 146.564.000,00          | 97,71 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | 0,00               | 0,00                    | 0,00  | 2,00            | 2,00        | 100,00 |
| 1.05.01.2.02                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 15.610.443.000,00  | 13.562.484.925,00       | 86,88 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Presentase Terpenuhi<br>Ketersediaan Laporan Keuangan<br>Perangkat Daerah  | 0,00               | 0,00                    | 0,00  | 100,00          | 100,00      | 100,00 |
| 1.05.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 15.560.443.000,00  | 13.519.166.925,00       | 86,88 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                               | - Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN   | 0,00               | 0,00                    | 0,00  | 62,00           | 62,00       | 100,00 |



|                   |  |                        |                        |               |                |                |                  |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD<br>- <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i> | 50.000.000,00<br>0,00  | 43.318.000,00<br>0,00  | 86,64<br>0,00 | 0,00<br>2,00   | 0,00<br>2,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>- <i>Presentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian</i>   | 295.000.000,00<br>0,00 | 294.051.000,00<br>0,00 | 99,68<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya<br>- <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>  | 295.000.000,00<br>0,00 | 294.051.000,00<br>0,00 | 99,68<br>0,00 | 0,00<br>4,00   | 0,00<br>4,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>- <i>Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Terpenuhi</i>  | 480.000.000,00<br>0,00 | 421.500.174,00<br>0,00 | 87,81<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>90,00  | 95,17<br>90,00   |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>- <i>Jumlah Layanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>  | 25.000.000,00<br>0,00  | 24.981.000,00<br>0,00  | 99,92<br>0,00 | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- <i>Jumlah Layanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>  | 95.000.000,00<br>0,00  | 91.003.000,00<br>0,00  | 95,79<br>0,00 | 0,00<br>8,00   | 0,00<br>8,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>- <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>  | 60.000.000,00<br>0,00  | 45.230.000,00<br>0,00  | 75,38<br>0,00 | 0,00<br>4,00   | 0,00<br>3,70   | 92,50<br>92,50   |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 75.000.000,00          | 59.560.800,00          | 79,41         | 0,00           | 0,00           | 93,33            |

|                   |   |                  |                  |       |        |        |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | - <i>Jumlah Layanan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                            | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 3,00   | 2,80   | 93,33  |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD  | 225.000.000,00   | 200.725.374,00   | 89,21 | 0,00   | 0,00   | 95,16  |
|                   | - <i>Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>                      | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 62,00  | 59,00  | 95,16  |
| 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                | 190.000.000,00   | 182.546.000,00   | 96,08 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan</i>           | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 190.000.000,00   | 182.546.000,00   | 96,08 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 10,00  | 10,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.235.031.760,00 | 1.042.710.019,00 | 84,43 | 0,00   | 0,00   | 91,67  |
|                   | - <i>Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Terpenuhi</i>                  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 95,00  | 95,00  |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 105.800.000,00   | 56.652.453,00    | 53,55 | 0,00   | 0,00   | 80,00  |
|                   | - <i>Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 1,00   | 0,80   | 80,00  |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.129.231.760,00 | 986.057.566,00   | 87,32 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 3,00   | 3,00   | 100,00 |
| 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 1.636.559.127,00 | 1.072.207.162,00 | 65,52 | 0,00   | 0,00   | 93,05  |
|                   | - <i>Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</i>                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 100,00 | 90,00  | 90,00  |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan                           | 100.000.000,00   | 65.081.602,00    | 65,08 | 0,00   | 0,00   | 80,00  |

|                   |   |                         |                         |              |             |             |               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                         |                         |              |             |             |               |
|                   | - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 7,00        | 5,60        | 80,00         |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.316.320.427,00        | 801.131.760,00          | 60,86        | 0,00        | 0,00        | 94,29         |
|                   | - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 35,00       | 33,00       | 94,29         |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 40.238.700,00           | 31.552.800,00           | 78,41        | 0,00        | 0,00        | 94,00         |
|                   | - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 5,00        | 4,70        | 94,00         |
| 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 100.000.000,00          | 99.038.000,00           | 99,04        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2,00        | 2,00        | 100,00        |
| 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 80.000.000,00           | 75.403.000,00           | 94,25        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|                   | - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 59,00       | 59,00       | 100,00        |
| 1.05.04           | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                | <b>8.879.238.710,00</b> | <b>8.498.175.898,00</b> | <b>95,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                   | - Meningkatnya Waktu tanggap penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 82,00       | 82,00       | 100,00        |
|                   | - Meningkatnya jumlah bangunan yang terproteksi terhadap bahaya kebakaran                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 82,00       | 82,00       | 100,00        |

|                   |   |                  |                  |       |       |       |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|-------|-------|--------|
|                   | - Pencapaian ketepatan waktu petugas pada setiap kejadian   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| 1.05.04.2.01      | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                       | 8.606.317.710,00 | 8.270.845.498,00 | 96,10 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Jenis Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 5,00  | 5,00  | 100,00 |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 7.841.651.710,00 | 7.549.972.498,00 | 96,28 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                               | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran  | 350.000.000,00   | 315.584.000,00   | 90,17 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran        | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  | 50.000.000,00    | 49.805.000,00    | 99,61 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri   | 329.017.000,00   | 319.835.000,00   | 97,21 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait      | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 62,00 | 62,00 | 100,00 |

|                   |  |                        |                        |                |                |                |                  |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.05.04.2.01.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga<br>- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga  | 35.649.000,00<br>0,00  | 35.649.000,00<br>0,00  | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>25,00  | 0,00<br>25,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.04.2.02      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran<br>- Jumlah Laporan Hasil Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran  | 172.921.000,00<br>0,00 | 129.430.000,00<br>0,00 | 74,85<br>0,00  | 0,00<br>2,00   | 0,00<br>2,00   | 88,33<br>100,00  |
| 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran<br>- Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran       | 57.921.000,00<br>0,00  | 55.430.000,00<br>0,00  | 95,70<br>0,00  | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>1,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran<br>- Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 115.000.000,00<br>0,00 | 74.000.000,00<br>0,00  | 64,35<br>0,00  | 0,00<br>1,00   | 0,00<br>0,65   | 65,00<br>65,00   |
| 1.05.04.2.03      | Investigasi Kejadian Kebakaran<br>- Laporan Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Penelitian dan Pengujian   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.04.2.04      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran<br>- Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran                                      | 100.000.000,00<br>0,00 | 97.900.400,00<br>0,00  | 97,90<br>0,00  | 0,00<br>320,00 | 0,00<br>320,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat   | 100.000.000,00         | 97.900.400,00          | 97,90          | 0,00           | 0,00           | 100,00           |

|        |  |                   |                   |       |        |        |        |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
|        | - Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
|        |  |                   |                   |       |        |        |        |
| JUMLAH |  | 28.632.272.597,00 | 25.365.774.278,00 | 88,59 |        |        | 95,70  |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| KODE              | URAIAN  | PAGU DANA<br>(Rp.) | REAL. KEUANGAN    |       | TARGET<br>FISIK | REAL. FISIK |        |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------|--------|
|                   |   |                    | (Rp.)             | (%)   |                 | K           | (%)    |
| 1                 | 2   | 4                  | 5                 | 6     | 7               | 8           | 6      |
| 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 34.770.413.373,00  | 32.052.149.415,00 | 92,18 | 0,00            | 0,00        | 96,38  |
| 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 19.269.652.148,00  | 17.353.977.870,00 | 90,06 | 0,00            | 0,00        | 92,93  |
|                   | - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 49,50           | 46,00       | 92,93  |
| 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 490.287.680,00     | 411.960.500,00    | 84,02 | 0,00            | 0,00        | 97,12  |
|                   | - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 13,00           | 10,00       | 76,92  |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 81.300.000,00      | 80.865.000,00     | 99,46 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 2,00            | 2,00        | 100,00 |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD  | 20.000.000,00      | 9.100.000,00      | 45,50 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen RKA -PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD           | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 1,00            | 1,00        | 100,00 |
| 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD  | 20.000.000,00      | 10.665.000,00     | 53,33 | 0,00            | 0,00        | 100,00 |

|                   |  |   |                   |                   |       |       |       |        |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|                   |  | - <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.01.0004 |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD  | 20.000.000,00     | 1.081.200,00      | 5,41  | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.01.0005 |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PD   | 20.000.000,00     | 3.230.500,00      | 16,15 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.01.0006 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD   | 196.487.680,00    | 183.963.100,00    | 93,63 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 4,00  | 4,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.01.0007 |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 132.500.000,00    | 123.055.700,00    | 92,87 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 3,00  | 3,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.02      |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 15.862.969.680,00 | 14.232.154.316,00 | 89,72 | 0,00  | 0,00  | 98,75  |
|                   |  | - <i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 32,00 | 30,00 | 93,75  |
| 1.05.01.2.02.0001 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 15.650.947.000,00 | 14.022.559.519,00 | 89,60 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   |  | - <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 1.05.01.2.02.0003 |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD  | 134.627.680,00    | 133.310.097,00    | 99,02 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |

|                   |   |   |                |                |        |        |        |        |
|-------------------|---|---|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                   |   | - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD</i>  | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 12,00  | 12,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.02.0005 |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD   | 27.420.000,00  | 27.419.900,00  | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | - <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i>                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.05.01.2.02.0007 |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD   | 49.975.000,00  | 48.864.800,00  | 97,78  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | - <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i> | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 18,00  | 18,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |   | 812.139.000,00 | 766.001.142,00 | 94,32  | 0,00   | 0,00   | 98,13  |
|                   |   | - <i>Jumlah Dokumen Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 2,00   | 2,00   | 100,00 |
| 1.05.01.2.05.0002 |   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | 446.490.000,00 | 433.600.942,00 | 97,11  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | - <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 186,00 | 186,00 | 100,00 |
| 1.05.01.2.05.0005 |   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 165.280.000,00 | 162.708.000,00 | 98,44  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   |   | - <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 72,00  | 72,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.05.0009 |   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | 200.369.000,00 | 169.692.200,00 | 84,69  | 0,00   | 0,00   | 92,54  |
|                   |   | - <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>  | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 670,00 | 620,00 | 92,54  |
| 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah        |   | 914.561.500,00 | 800.688.625,00 | 87,55  | 0,00   | 0,00   | 95,71  |



|                   |   |                |                |       |       |       |        |
|-------------------|---|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
|                   | - Tersedianya bahan penunjang administrasi perkantoran                          | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 78,00 | 75,00 | 96,15  |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 102.250.000,00 | 101.659.300,00 | 99,42 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 4,00  | 4,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 50.000.000,00  | 49.914.200,00  | 99,83 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 2,00  | 2,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 76.905.000,00  | 71.381.700,00  | 92,82 | 0,00  | 0,00  | 86,21  |
|                   | - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 29,00 | 25,00 | 86,21  |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 41.443.500,00  | 39.664.000,00  | 95,71 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 4,00  | 4,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 28.550.000,00  | 28.537.500,00  | 99,96 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD                              | 605.413.000,00 | 499.631.925,00 | 82,53 | 0,00  | 0,00  | 83,33  |
|                   | - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD             | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 12,00 | 10,00 | 83,33  |
| 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD   | 10.000.000,00  | 9.900.000,00   | 99,00 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD                            | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 3,00  | 3,00  | 100,00 |
| 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 150.780.448,00 | 132.500.000,00 | 87,88 | 0,00  | 0,00  | 100,00 |
|                   | - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 2,00  | 2,00  | 100,00 |

|                   |  |                        |                        |                |               |               |                  |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>- <i>Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</i>   | 150.780.448,00<br>0,00 | 132.500.000,00<br>0,00 | 87,88<br>0,00  | 0,00<br>2,00  | 0,00<br>2,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>- <i>Tersedianya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | 541.743.840,00<br>0,00 | 525.600.000,00<br>0,00 | 97,02<br>0,00  | 0,00<br>22,00 | 0,00<br>16,00 | 81,82<br>72,73   |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>   | 49.500.000,00<br>0,00  | 36.000.000,00<br>0,00  | 72,73<br>0,00  | 0,00<br>22,00 | 0,00<br>16,00 | 72,73<br>72,73   |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>   | 492.243.840,00<br>0,00 | 489.600.000,00<br>0,00 | 99,46<br>0,00  | 0,00<br>12,00 | 0,00<br>12,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>- <i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>  | 497.170.000,00<br>0,00 | 485.073.287,00<br>0,00 | 97,57<br>0,00  | 0,00<br>73,00 | 0,00<br>73,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>- <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | 65.400.000,00<br>0,00  | 65.400.000,00<br>0,00  | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>6,00  | 0,00<br>6,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 282.500.000,00         | 271.467.100,00         | 96,09          | 0,00          | 0,00          | 100,00           |

|                   |   |                          |                          |              |             |             |              |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 38,00       | 38,00       | 100,00       |
| 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 100.000.000,00           | 98.936.187,00            | 98,94        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|                   | - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1,00        | 1,00        | 100,00       |
| 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 49.270.000,00            | 49.270.000,00            | 100,00       | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
|                   | - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 28,00       | 28,00       | 100,00       |
| 1.05.02           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>15.500.761.225,00</b> | <b>14.698.171.545,00</b> | <b>94,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,72</b> |
|                   | - Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 22,50       | 22,50       | 100,00       |
|                   | - Rasio Linmas Per RT   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 7,90        | 6,90        | 87,34        |
|                   | - Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satpol PP   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 22,50       | 21,50       | 95,56        |
|                   | - Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 30,00       | 30,00       | 100,00       |
| 1.05.02.2.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                       | 11.001.234.945,00        | 10.636.879.165,00        | 96,69        | 0,00        | 0,00        | 98,33        |
|                   | - Jumlah Laporan Hasil Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 254,00      | 254,00      | 100,00       |
| 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 647.050.000,00           | 569.340.930,00           | 87,99        | 0,00        | 0,00        | 92,23        |

|                   |   |                  |                  |       |        |        |        |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>                             | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 103,00 | 95,00  | 92,23  |
| 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | 285.148.000,00   | 243.570.000,00   | 85,42 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 3,00   | 3,00   | 100,00 |
| 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia                          | 1.372.223.040,00 | 1.331.468.856,00 | 97,03 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 509.062.425,00   | 499.703.600,00   | 98,16 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>  | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 42,00  | 42,00  | 100,00 |
| 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan               | 7.247.928.480,00 | 7.126.111.312,00 | 98,32 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
|                   | - <i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 36,00  | 36,00  | 100,00 |

|                   |  |                          |                          |               |                |                |                  |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa<br>- <i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i> | 939.823.000,00<br>0,00   | 866.684.467,00<br>0,00   | 92,22<br>0,00 | 0,00<br>77,00  | 0,00<br>74,00  | 96,10<br>96,10   |
| 1.05.02.2.02      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota<br>- <i>Tersedianya Laporan Hasil Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</i>  | 3.437.158.600,00<br>0,00 | 3.048.932.780,00<br>0,00 | 88,71<br>0,00 | 0,00<br>66,00  | 0,00<br>59,00  | 92,35<br>89,39   |
| 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>- <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>   | 2.059.337.600,00<br>0,00 | 1.935.225.000,00<br>0,00 | 93,97<br>0,00 | 0,00<br>28,00  | 0,00<br>28,00  | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah<br>- <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>  | 788.421.000,00<br>0,00   | 616.539.830,00<br>0,00   | 78,20<br>0,00 | 0,00<br>35,00  | 0,00<br>28,00  | 80,00<br>80,00   |
| 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>- <i>Tersedianya Laporan hasil Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati dan Walikota</i>  | 589.400.000,00<br>0,00   | 497.167.950,00<br>0,00   | 84,35<br>0,00 | 0,00<br>3,00   | 0,00<br>3,00   | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.02.2.03      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota<br>- <i>Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</i>  | 1.062.367.680,00<br>0,00 | 1.012.359.600,00<br>0,00 | 95,29<br>0,00 | 0,00<br>174,00 | 0,00<br>174,00 | 100,00<br>100,00 |
| 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS   | 1.062.367.680,00         | 1.012.359.600,00         | 95,29         | 0,00           | 0,00           | 100,00           |

|        |  |                   |                   |       |        |        |        |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
|        | - Tersedianya laporan Hasil<br>Pembinaan Penyidik Pegawai<br>Negeri Sipil ( PPNS )<br>kabupaten/Kota | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 174,00 | 174,00 | 100,00 |
|        |  |                   |                   |       |        |        |        |
| JUMLAH |  | 34.770.413.373,00 | 32.052.149.415,00 | 92,18 |        |        | 96,38  |

3.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD berdasarkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan terhadap pengakuan capaian kinerja fisik berupa keluaran yang dihasilkan (output) dan realisasi serapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil penilaian tersebut secara agregat menunjukkan capaian kinerja bidang urusan yang mencakup masing-masing program dan kegiatan tersebut. Pada periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, dengan penilaian capaian kinerja merujuk pada rumusan kriteria penilaian seperti disajikan pada di bawah ini.

Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RKPD pada Triwulan IV Tahun 2024

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 91,00 >                          | Sangat Tinggi (ST)                   |
| 2   | 76,00 < 90,00                    | Tinggi (T)                           |
| 3   | 66,00 < 75,00                    | Sedang (S)                           |
| 4   | 51,00 < 65,00                    | Rendah (R)                           |
| 5   | < 50,00                          | Sangat Rendah (SR)                   |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penerapan jenjang kriteria penilaian kinerja sedemikian dalam menetapkan status hasil capaian suatu program/kegiatan dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil "Sangat Tinggi (ST)", yaitu apabila proporsi capaian > 91,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja;
- (2) Hasil "Tinggi (T)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 76,00 sampai kurang dari 90,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi target;
- (3) Hasil "Sedang (S)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 66,00 sampai kurang dari 75,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi persyaratan minimal;
- (4) Hasil "Rendah (R)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 51,00 sampai kurang dari 65,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja belum cukup untuk memenuhi persyaratan minimal; dan



- (5) Hasil "Sangat Rendah (SR)", yaitu apabila kondisi capaian kurang dari 50,00. Rentang sedemikian menunjukkan capaian realisasi kinerja tidak memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan rumusan rencana program pembangunan tahun 2024, alokasi setiap urusan/bidang urusan dirinci atas program. Kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran yang harus dievaluasi kinerjanya berdasarkan rencana capaian target pada setiap triwulan sepanjang rentang waktu tahun berjalan. Rekapitulasi hasil evaluasi atas pelaksanaan program Triwulan IV Tahun 2024 yang secara garis besar disajikan berdasarkan bidang urusan dimaksudkan untuk menunjukkan realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan program secara umum.

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2024, untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kabupaten Bekasi, capaian kinerja fisik sebesar 93,26% dengan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 90,74%. Capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut terdiri dari Urusan Wajib pelayanan dasar sebesar 92,77%, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar 90,54%, Urusan Pilihan sebesar 88,52%, Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 93,24%, Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar 91,43%, dan Pemerintahan Umum Kewilayahan sebesar 93,63%.

Sedangkan untuk capaian realisasi kinerja fisik terdiri dari Urusan Wajib pelayanan dasar sebesar 89,45%, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar 95,76%, Urusan Pilihan sebesar 87,53%, Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 90,21%, Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar 96,45%, dan Pemerintahan Umum Kewilayahan sebesar 84,92%.

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan program menurut bidang urusan sampai dengan akhir Triwulan IV 2024, hasil evaluasi secara umum menunjukkan rerata capaian kinerja fisik "sangat tinggi" (93,26%) dan rerata kinerja penyerapan anggaran "sangat tinggi" (90,74%).

Berdasarkan kondisi diatas dapat diketahui bahwa rerata capaian kinerja fisik lebih tinggi dari capaian kinerja penyerapan anggaran dimana capaian fisik lebih tinggi sebesar 2,52% dari capaian kinerja penyerapan anggaran. Capaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran tersebut mengalami kenaikan pesat pada Triwulan IV jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan pada masing-masing perangkat daerah yang masih dalam proses pada triwulan sebelumnya telah selesai dilaksanakan.





Untuk melihat implikasi langsung maupun tidak langsung dari pencapaian kinerja, diperlukan perhitungan secara tersendiri melalui evaluasi pelaksanaan dan output pada setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam suatu program. Dengan demikian, kontribusi setiap sub kegiatan dan kegiatan akan dapat diperhitungkan berdasarkan nilai kinerjanya dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator program. Realisasi kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 1 Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV ini.

Rekapitulasi hasil evaluasi program yang disusun berdasarkan Kelompok disajikan untuk menunjukkan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program yang ditunjukkan oleh masing-masing Bidang Urusan (lihat Tabel 3.6). Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah se-Kabupaten Bekasi berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Menurut Bidang Urusan

| No | Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD                              | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | % Keuangan | Predikat (Keuangan) | % Fisik | Predikat (Fisik) |
|----|--|----------------------|----------------------|------------|---------------------|---------|------------------|
|    | URUSAN WAJIB   |                      |                      |            |                     |         |                  |
|    | Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar             | 4.851.663.484.411,00 | 4.500.949.234.066,00 | 92,77%     | ST                  | 89,45%  | T                |
| 1  | PENDIDIKAN   | 2.205.204.109.067,00 | 2.008.744.145.601,00 | 91,09%     | ST                  | 78,88%  | T                |
| 2  | KESEHATAN  | 1.297.986.568.113,00 | 1.189.288.171.976,00 | 91,63%     | ST                  | 91,92%  | T                |
| 3  | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 981.337.632.774,00   | 958.528.980.287,00   | 97,68%     | ST                  | 90,26%  | T                |
| 4  | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                        | 259.823.670.526,00   | 247.293.364.726,00   | 95,18%     | ST                  | 95,54%  | ST               |
| 5  | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 83.112.578.446,00    | 75.088.162.633,00    | 90,35%     | T                   | 97,36%  | ST               |
| 6  | SOSIAL   | 24.198.925.485,00    | 22.006.408.843,00    | 90,94%     | ST                  | 82,74%  | T                |
|    | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar                               | 823.119.496.352,00   | 745.288.510.142,00   | 90,54%     | T                   | 95,76%  | ST               |
| 1  | TENAGA KERJA   | 47.550.106.579,00    | 44.005.726.629,00    | 92,55%     | ST                  | 96,79%  | ST               |
| 2  | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   | 15.089.807.000,00    | 12.597.502.841,00    | 83,48%     | T                   | 100,00% | ST               |
| 3  | PANGAN   | 20.878.133.145,00    | 18.458.401.734,00    | 88,41%     | T                   | 99,20%  | ST               |
| 4  | PERTANAHAN   | 66.934.360.078,00    | 49.896.329.552,00    | 74,55%     | S                   | 100,00% | ST               |
| 5  | LINGKUNGAN HIDUP   | 147.847.245.449,00   | 130.641.280.676,00   | 88,36%     | T                   | 84,35%  | T                |
| 6  | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 | 36.776.599.969,00    | 32.924.809.405,00    | 89,53%     | T                   | 100,00% | ST               |
| 7  | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                               | 26.482.401.179,00    | 24.583.539.087,00    | 92,83%     | ST                  | 99,18%  | ST               |
| 8  | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                   | 47.730.508.640,00    | 41.369.802.944,00    | 86,67%     | T                   | 97,50%  | ST               |
| 9  | PERHUBUNGAN  | 133.148.543.806,00   | 128.988.570.166,00   | 96,88%     | ST                  | 97,76%  | ST               |
| 10 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                     | 60.154.721.365,00    | 55.528.639.413,00    | 92,31%     | ST                  | 95,38%  | ST               |
| 11 | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                              | 21.179.274.027,00    | 19.671.550.166,00    | 92,88%     | ST                  | 123,34% | ST               |

| No | Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD         | Pagu (Rp)                   | Realisasi (Rp)              | % Keuangan    | Predikat (Keuangan) | % Fisik       | Predikat (Fisik) |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| 12 | PENANAMAN MODAL                           | 28.864.709.603,00           | 24.656.042.279,00           | 85,42%        | T                   | 64,86%        | R                |
| 13 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 125.763.190.322,00          | 122.240.080.711,00          | 97,20%        | ST                  | 97,34%        | ST               |
| 14 | STATISTIK                                 | 1.559.894.720,00            | 1.520.753.039,00            | 97,49%        | ST                  | 71,25%        | S                |
| 15 | KEBUDAYAAN                                | 23.115.108.539,00           | 20.690.860.910,00           | 89,51%        | T                   | 100,00%       | ST               |
| 16 | PERPUSTAKAAN                              | 2.586.585.750,00            | 2.515.472.497,00            | 97,25%        | T                   | 100,00%       | ST               |
| 17 | KEARSIPAN                                 | 16.036.851.061,00           | 13.608.578.573,00           | 84,86%        | T                   | 100,00%       | ST               |
| 18 | PERSANDIAN                                | 1.421.455.120,00            | 1.390.569.520,00            | 97,83%        | ST                  | 96,67%        | ST               |
|    | <b>URUSAN PILIHAN</b>                     | <b>172.530.178.898,00</b>   | <b>152.721.956.985,00</b>   | <b>88,52%</b> | <b>T</b>            | <b>87,53%</b> | <b>T</b>         |
| 1  | KELAUTAN DAN PERIKANAN                    | 24.131.396.555,00           | 21.442.527.119,00           | 88,86%        | T                   | 100,00%       | ST               |
| 2  | PARIWISATA                                | 20.372.832.034,00           | 18.758.554.975,00           | 92,08%        | ST                  | 99,21%        | ST               |
| 3  | PERTANIAN                                 | 61.987.424.427,00           | 56.353.752.314,00           | 90,91%        | ST                  | 97,70%        | ST               |
| 4  | PERDAGANGAN                               | 51.760.522.851,00           | 43.693.993.959,00           | 84,42%        | T                   | 72,37%        | S                |
| 5  | PERINDUSTRIAN                             | 14.257.603.031,00           | 12.456.468.618,00           | 87,37%        | T                   | 55,87%        | R                |
| 6  | TRANSMIGRASI                              | 20.400.000,00               | 16.660.000,00               | 81,67%        | T                   | 100,00%       | ST               |
|    | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b> | <b>1.183.690.649.027,00</b> | <b>1.103.683.447.142,00</b> | <b>93,24%</b> | <b>ST</b>           | <b>90,21%</b> | <b>T</b>         |
| 1  | PERENCANAAN                               | 29.762.474.226,00           | 26.244.317.484,00           | 88,18%        | T                   | 66,76%        | S                |
| 2  | KEUANGAN                                  | 1.058.939.322.707,00        | 993.047.010.075,00          | 93,78%        | ST                  | 91,12%        | ST               |
| 3  | KEPEGAWAIAN                               | 23.155.414.887,00           | 21.831.443.625,00           | 94,28%        | ST                  | 97,03%        | ST               |
| 4  | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN               | 14.175.117.607,00           | 12.806.920.075,00           | 90,35%        | T                   | 100,00%       | ST               |
| 5  | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                  | 11.861.118.000,00           | 11.638.844.000,00           | 98,13%        | ST                  | 100,00%       | ST               |
| 6  | INSPEKTORAT DAERAH                        | 45.797.201.600,00           | 38.114.911.883,00           | 83,23%        | T                   | 86,32%        | T                |

| No | Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD  | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | % Keuangan | Predikat (Keuangan) | % Fisik | Predikat (Fisik) |
|----|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|---------|------------------|
|    | PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 538.231.446.708,00   | 492.098.142.439,00   | 91,43%     | ST                  | 96,45%  | ST               |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH                 | 286.051.208.054,00   | 271.915.130.091,00   | 95,06%     | ST                  | 99,13%  | ST               |
| 2  | SEKRETARIAT DPRD                   | 129.507.747.732,00   | 99.104.668.087,00    | 76,52%     | T                   | 90,21%  | T                |
| 3  | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK        | 122.672.490.922,00   | 121.078.344.261,00   | 98,70%     | ST                  | 100,00% | ST               |
|    | PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN      | 242.045.286.660,00   | 226.625.846.113,00   | 93,63%     | ST                  | 84,92%  | T                |
| 1  | KECAMATAN                          | 242.045.286.660,00   | 226.625.846.113,00   | 93,63%     | ST                  | 84,92%  | T                |
|    | TOTAL                              | 7.811.280.542.056,00 | 7.087.761.241.314,00 | 90,74%     | ST                  | 93,26%  | ST               |

Sumber : SIMPPD, Bappeda 2024

### **3.5. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN NASIONAL**

#### **3.5.1. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tersebut dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, yang merupakan Agenda Pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun sasaran dari masing- masing PN tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



Tabel 3.7 Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L   | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |   | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024                     | PERATURAN PRESIDEN                  |   | KABUPATEN/KOTA                                       |         |          |                 |                   |                                |    |
|---------|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |   |                                  |   |   |                                     | KEGIATAN<br>PRIORITAS               | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                       | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2   | 3                                |   | 4   | 5                                   | 6                                   | 7   | 8  | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |
| PN<br>1 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1                                | Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif | 19,2                                | 1                                   | Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan    | Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW)     |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |   |                                  |   | Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (juta kilo liter)      | 17,4                                | 2                                   | Peningkatan pasokan bahan bakar nabati                  | Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (Juta kilo liter) |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |   |                                  |   |   |                                     | 3                                   | Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)             |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |   |                                  |   |   |                                     |                                     |   | penurunan Intensitas energi final (SBM/Rp Miliar)    |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |   |                                  |   |   |                                     | 4                                   | Peningkatan pemenuhan energi domestik                   | Domestic Market Obligation (DMO) Batubara (Juta Ton) |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |   |                                  |   |   |                                     |                                     |   | Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)            |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |   |                                  |   | 5   | Pengembangan industri pendukung EBT | TKDN sektor pembangkit EBT (Persen) |   |  | -       | -        | -               |                   |                                |    |
|         |   | 2                                | Peningkatan kuantitas/ ketahanan  | Produktivitas air (water                                  | 3                                   | 1                                   | Pemantapan Kawasan berfungsi                            | Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung               |         |          | -               | -                 | -                              |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL | INDIKATOR                       | TARGE<br>T 2024            | PERATURAN PRESIDEN    |           |   | KABUPATEN/KOTA  |   |   |  |  |                 |                 |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|---|---|---|---|--|--|-----------------|-----------------|
|         |                               |                                  |                                 |                            | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024             |                 |                 |
| 1       | 2                             | 3                                |                                 | 4                          | 5                     | 6         | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12   | 13              | 14              |
|         |                               |                                  | air untuk mendukung pertumbuhan | productivity)<br>(kg/m3)g) | 5                     |           | Lindung<br>(kumulatif)  | (kumulatif) (Juta ha)   |   |   |  |  |                 |                 |
|         |                               |                                  |                                 |                            |                       | 2         | Pengelolaan hutan berkelanjutan                                       | Luas kawasan hutan produksi (Juta Ha)                                       |   |   | -  | -  | -               |                 |
|         |                               |                                  |                                 |                            |                       | 3         | Penyediaan air untuk pertanian  | Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare)                        |   |   | -  | -  | -               |                 |
|         |                               |                                  |                                 |                            |                       |           |   | Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare) | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                          | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 4.847.721.411   | 7.562.111.994   |
|         |                               |                                  |                                 |                            |                       | 4         | Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas                           | Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik)       | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)               | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | -  | 128.465.000.000 | 112.195.729.674 |
|         |                               |                                  |                                 |                            |                       | 5         | Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistem | Peningkatan tutupan hutan (Hektar)  |   |   | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota  | -  | -               |                 |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR                                       | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA  |  |   |  |               |                         |                 |
|------|--------------------|----------------------------|--|---|-------------|--------------------|--|---|--|---|--|---------------|-------------------------|-----------------|
|      |                    |                            |  |   |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN   | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |                 |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4   | 5           | 6                  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11   | 12            | 13                      | 14              |
|      |                    | 3                          |  |   |             |                    | Nya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau                        |   |  |   |  |               |                         |                 |
|      |                    |                            |  |   |             | 6                  | Pengembangan waduk multiguna   | Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)(m3) | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilitas Ekonomi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                         | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | -             | 128.465.000.000         | 112.195.729.674 |
|      |                    |                            | Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan | Nilai Tukar Petani (NTP)                        | 105,00–108  | 1                  | Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan | Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/ta hun)   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                         | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                  | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil      | -             | 200.000.000             | 195.526.750     |
|      |                    |                            |  | Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) | 2100        |                    |  | Konsumsi daging (kg/kapita/ta hun)  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                         | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi           | -             | 1.889.626.000           | 2.138.760.209   |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA  |   |   |  |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|---|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7         | 8   | 9   | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  | Angka<br>Kecukupan<br>Protein (AKP)<br>(gram/kapita/ha<br>ri) | 57              |                       |           | Konsumsi sayur<br>dan buah<br>(gram/kapita/tahu<br>n)   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Peningkatan<br>Diversifikasi<br>dan<br>Ketahanan<br>Pangan<br>Masyarakat | Pelaksanaan<br>Pencapaian<br>Target<br>Konsumsi<br>Pangan<br>Perkapita/Tahun<br>sesuai dengan<br>Angka<br>Kecukupan Gizi | -                 | 1.889.626.00<br>0              | 2.138.760.20<br>9 |
|         |                               |                                  |  | Prevalence of<br>Undernourishm<br>ent (PoU) (%)               | 5               |                       |           | Konsumsi protein<br>asal ternak<br>(gram/kapita/hari)   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Peningkatan<br>Diversifikasi<br>dan<br>Ketahanan<br>Pangan<br>Masyarakat | Pelaksanaan<br>Pencapaian<br>Target<br>Konsumsi<br>Pangan<br>Perkapita/Tahun<br>sesuai dengan<br>Angka<br>Kecukupan Gizi | -                 | 1.889.626.00<br>0              | 2.138.760.20<br>9 |
|         |                               |                                  |  | Food Insecurity<br>Experience<br>Scale (FIES)<br>(%)          | 4               |                       |           | Akses terhadap<br>beras<br>biofortifikasi dan<br>fortifikasi bagi<br>keluarga yang<br>kurang mampu<br>dan kurang gizi<br>(% Penerima<br>BPNT) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Penanganan<br>Kerawanan<br>Pangan  | Penyusunan<br>Peta Kerentanan<br>dan Ketahanan<br>Pangan<br>Kecamatan  | -                 | 250.000.000                    | 247.270.580       |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |           | Persentase pangan<br>segar yang<br>memenuhi syarat<br>keamanan pangan<br>(%)  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengawasan<br>Keamanan<br>Pangan   | Pelaksanaan<br>Pengawasan<br>Keamanan<br>Pangan Segar<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota  | -                 | 1.283.750.00<br>0              | 1.097.951.71<br>0 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |   | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024  | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA                                  |   |   |  |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|-----------------------|---|---|---|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |   |  |  | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                  | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |   | 4  | 5  | 6                     | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |   |  |  |                       |   | Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Peningkatan<br>Diversifikasi<br>dan<br>Ketahanan<br>Pangan<br>Masyarakat | Pengelolaan<br>dan<br>Keseimbangan<br>Cadangan<br>Pangan<br>Kabupaten/Kota | -                 | 2.015.000.00<br>0              | 2.052.244.46<br>0 |
|         |                               |                                  |   |  |  |                       |   | Persentase pangsa pangan organik** (Persentase) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Peningkatan<br>Diversifikasi<br>dan<br>Ketahanan<br>Pangan<br>Masyarakat | Pengelolaan<br>dan<br>Keseimbangan<br>Cadangan<br>Pangan<br>Kabupaten/Kota | -                 | 2.015.000.00<br>0              | 2.052.244.46<br>0 |
|         |                               |                                  |   |  |  | 2                     | Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan | Penggunaan Benih Bersertifikat (Persen)         |   |   | -  | -                 | -                              |                   |
|         |                               |                                  |   |  |  |                       |   | Ketersediaan Beras (Juta ton)                   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Penyediaan<br>dan<br>Pengembang<br>an Sarana<br>Pertanian                | Pengawasan<br>Penggunaan<br>Sarana<br>Pertanian                            | -                 | 3.740.712.36<br>2              | 6.545.167.85<br>6 |
|         |                               |                                  |   |  |  |                       |   | Ketersediaan Protein Hewani (Juta ton)          |   |   |  |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |   |  |  |                       |   | Produksi jagung (Juta ton)                      |   |   |  |                   |                                |                   |
|         |                               | Produksi daging (Juta ton)       | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Penyediaan<br>dan<br>Pengembang<br>an Sarana<br>Pertanian | Peningkatan<br>Mutu dan<br>Peredaran<br>Benih/Bibit<br>Ternak dan<br>Tanaman Pakan | -                     | 480.299.749   | 390.476.866                                     |   |   |  |                   |                                |                   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |   |   |   |                   |                                |               |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN                                 | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                | 13                             | 14            |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |   |   |   | Ternak serta Pakan                              |                   |                                |               |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Produksi umbi-umbian (Juta ton)   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Penyediaan<br>dan<br>Pengembang<br>an Sarana<br>Pertanian    | Pengawasan<br>Penggunaan<br>Sarana<br>Pertanian | -                 | 3.740.712.362                  | 6.545.167.856 |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 3                     | Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar | Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Penyuluhan<br>Pertanian                                      | Pelaksanaan<br>Penyuluhan<br>Pertanian          | -                 | 3.103.692.400                  | 2.497.383.814 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga kerja/tahun)                       |   |   |   |                   |                                |               |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 4                     | Peningkatan berkelanjutan produktivitas sumber daya pertanian,  | Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Penyediaan<br>dan<br>Pengembang<br>an Prasarana<br>Pertanian | Pengembangan Prasarana Pertanian                | -                 | 890.000.000                    | 836.791.620   |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR   | TARGET 2024                                     | PERATURAN PRESIDEN |  |  | KABUPATEN/KOTA                           |  |   |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|---|---|--------------------|--|--|--|--|---|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |   |   | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM                                  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11  | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    |                            |   |   |                    | dan digitalisasi pertanian, dan digitalisasi pertanian | Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) (Varietas unggul baru dan galur) | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               | -             | 170.000.000             | 155.240.650   |
|      |                    |                            |   |   |                    |  | Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (Akses)              | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | -             | 936.000.000             | 1.227.012.750 |
|      |                    |                            |   |   | 5                  | Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional         | Global food security index   |  |  | -   | -             | -                       |               |
|      |                    | 4                          | Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan | Konservasi kawasan kelautan (14.5.1a) (juta ha) | 30                 | 1  | Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan  | Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit)         |  |   | -             | -                       | -             |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |  |                                       |  |                   |                                |               |  |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------|--|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                           | PROGRAM                                  | KEGIATAN                              | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |  |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8  | 9  | 10                                    | 11   | 12                | 13                             | 14            |  |
|         |                               |                                  |  | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1)a) (%) | ≤80             |                       | (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut                 | Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP (WPP)        |  |                                       |  |                   |                                |               |  |
|         |                               |                                  |  | Produksi perikanan (juta ton)   | 32,75           |                       |   | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ) |  |                                       |  |                   |                                |               |  |
|         |                               |                                  |  | Produksi garam (juta ton)   | 2               | 2                     | Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan  |  |  |                                       | -  | -                 | -                              |               |  |
|         |                               |                                  |  | Nilai Tukar Nelayan   | 107–110         | 3                     | Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan | Produksi ikan (Juta ton)                                 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | -                 | 710.000.000                    | 1.904.627.120 |  |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   |  | Peningkatan Kualitas Sumber              | Program Pengelolaan                   | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   | -                 | 1.175.000.000                  | 785.679.620   |  |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA  |   |  |  |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|---|---|--|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                        | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN                            | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Daya<br>Manusia                                       | Perikanan<br>Budidaya   |  |  |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengelolaan<br>Perikanan<br>Budidaya   | Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan   | -  | 3.591.323.01<br>7 | 3.835.727.34<br>0              |                   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |   | Penerbitan<br>Tanda    Daftar<br>Usaha    Pengolahan<br>Hasil Perikanan<br>bagi      Usaha<br>Skala     Mikro<br>dan Kecil | -  | -                 |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Produksi rumput<br>laut (Juta ton)                    | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia   | Program<br>Pengelolaan<br>Perikanan<br>Budidaya  | Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan       | -                 | 3.591.323.01<br>7              | 3.835.727.34<br>0 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Produksi garam<br>(Juta ton)                          | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia   | Program<br>Pengelolaan<br>Perikanan<br>Budidaya  | Pemberdayaan<br>Pembudi Daya<br>Ikan Kecil | -                 | 1.175.000.00<br>0              | 785.679.620       |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | 4   | Peningkatan<br>fasilitas<br>usaha,<br>pembiayaan,<br>dan akses<br>perlindunga<br>n usaha<br>kelautan dan<br>perikanan |  |  | -                 | -                              | -                 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |   | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |         |          |                 |                   |                                |    |  |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-----------------------|--|--|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|--|
|         |                               |                                  |   |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                                 | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |  |
| 1       | 2                             | 3                                |   | 4   | 5               | 6                     | 7  | 8  | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |  |
|         |                               |                                  |   |   |                 |                       | skala kecil<br>serta akses<br>terhadap<br>pengelolaan<br>sumber daya   |  |         |          |                 |                   |                                |    |  |
|         |                               |                                  |   |   |                 | 5                     | Peningkatan<br>SDM dan<br>riset<br>kemaritiman<br>dan kelautan<br>serta<br>database<br>kelautan dan<br>perikanan |  |         | -        | -               | -                 |                                |    |  |
|         |                               | 5                                | Penguatan<br>kewirausaha<br>an, Usah<br>Mikro, Kecil<br>Menengah<br>(UMKM),<br>dan koperasi | Rasio Kredit<br>UMKM<br>Terhadap Total<br>Kredit<br>Perbankan (%)<br>(8.10.1) | 22              | 1                     | Peningkatan<br>kemitraan<br>usaha antara<br>Usaha<br>Mikro Kecil<br>dan Usaha<br>Menengah<br>Besar               |  |         | -        | -               | -                 |                                |    |  |
|         |                               |                                  |   | Pertumbuhan<br>wirausaha (%)  | 2,9             | 2                     | Peningkatan<br>kapasitas<br>usaha dan<br>akses<br>pembiayaan<br>bagi<br>wirausaha                                | Proporsi IKM<br>dengan<br>pinjaman/kredit<br>(9.3.2*) (Persen) |         |          | -               | -                 | -                              |    |  |
|         |                               |                                  |   | Kontribusi<br>koperasi<br>terhadap PDB<br>(%)                                 | 5,5             |                       | Proporsi<br>penyaluran kredit<br>usaha rakyat<br>(KUR) sektor<br>produksi (Persen)                               |  |         | -        | -               | -                 |                                |    |  |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |   |   |  |                   |                                |               |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|--|--|---|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM                                       | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7  | 8  | 9   | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14            |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 3                     | Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi | jumlah koperasi moderen yang dikembang kan (unit)  | Peningkata n Daya Saing dan Kesempata n Kerja | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n                             | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | -                 | 1.000.000.000                  | 990.260.000   |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 4                     | Peningkatan penciptaan start- up dan peluang usaha     | Pertumbuhan jumlah wirausaha (Persen)  | Peningkata n Daya Saing dan Kesempata n Kerja | Program Pemberdaya an Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | -                 | 5.425.000.000                  | 5.222.059.847 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  | Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Kumulatif) | Peningkata n Daya Saing dan Kesempata n Kerja | Program Perencanaan dan Pembanguna n Industri                             | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  | -                 | 2.630.000.000                  | 2.233.420.846 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) (Persen)         |   |   |  |                   |                                |               |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |   |  |   |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|---|---|---|--|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9   | 10   | 11  | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   | Penumbuhan<br>startup (unit)  | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja | Program<br>Pemberdaya<br>an Usaha<br>Menengah,<br>Usaha Kecil,<br>dan Usaha<br>Mikro<br>(UMKM) | Pemberdayaan<br>Usaha Mikro<br>yang Dilakukan<br>melalui<br>Pendataan,<br>Kemitraan,<br>Kemudahan<br>Perizinan,<br>Penguatan<br>Kelembagaan<br>dan Koordinasi<br>dengan Para<br>Pemangku<br>Kepentingan | -                 | 5.425.000.00<br>0              | 5.222.059.84<br>7 |
|         |                               |                                  |  |   |                 | 5                     | Peningkatan<br>nilai tambah<br>usaha sosial   | Kontribusi usaha<br>sosial (Persen<br>PDB)                                  |   |  | -   | -                 | -                              |                   |
|         |                               | 6                                | Peningkatan<br>nilai tambah,<br>lapangan<br>kerja, dan<br>investasi di<br>sektor rill,<br>dan<br>industrialisas<br>i | Pertumbuhan<br>PDB industri<br>pengolahan<br>nonmigas (%) | 5,80–<br>6,20   | 1                     | Peningkatan<br>industri<br>pengolahan<br>berbasis<br>pertanian,<br>kemaritiman<br>, dan non<br>argo yang<br>terintegrasi<br>hulu- hilir | Pertumbuhan<br>PDB subsektor<br>industri makanan<br>dan minuman<br>(Persen) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia     | Program<br>Penggunaan<br>dan<br>Pemasaran<br>Produk<br>Dalam<br>Negeri                         | Pelaksanaan<br>Promosi,<br>Pemasaran dan<br>Peningkatan<br>Penggunaan<br>Produk Dalam<br>Negeri   | -                 | 615.475.249                    |                   |
|         |                               |                                  |  | Kontribusi PDB<br>industri<br>pengolahan<br>nonmigas (%)  | 17,90–<br>18,2  |                       |   | Kontribusi PDB<br>Industri<br>Pengolahan(9 .2.1<br>*) (Persen)              |   |  | Penyusunan dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri<br>Kabupaten/Kota  | -                 | 2.630.000.00<br>0              |                   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA   |  |  |   |                   |                                |               |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|--|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                         | PROGRAM                                  | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7         | 8  | 9  | 10   | 11  | 12                | 13                             | 14            |
|         |                               |                                  |  | Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)                                  | 1.347,00        |                       |           | Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (Persen) |  |  | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | -                 | 2.630.000.000                  |               |
|         |                               |                                  |  | Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)                           | 22,5            |                       |           | Pertumbuhan PDB perkebunan (Persen)                    | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                              | -                 | 3.740.712.362                  | 6.545.167.856 |
|         |                               |                                  |  | Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2)a (%) | 15,7            |                       |           | Peningkatan produksi kakao (Persen)                    | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |   |                   |                                |               |
|         |                               |                                  |  | Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2)a (juta orang)                           | 22,08           |                       |           | Peningkatan produksi kopi (Persen)                     | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |   |                   |                                |               |
|         |                               |                                  |  | Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)                               | 22,74           |                       |           | Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)             | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |   |                   |                                |               |
|         |                               |                                  |  | Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)                                  | 1.450–1650      |                       |           | Pertumbuhan PDB hortikultura (Persen)                  | Peningkatan Kualitas Sumber              | Program Penyediaan dan Pengembangan                  |   |                   |                                |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |   |  |  |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---|---|---|--|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |  | 662,7–<br>731,1 |                       |   |   | Daya<br>Manusia                                       | an Sarana<br>Pertanian   |  |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  | Nilai Realisasi<br>PMA dan<br>PMDN industri<br>pengolahan<br>(triliun rupiah)          |                 |                       |   | Peningkatan<br>produksi buah-<br>buahan (Persen)  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Penyediaan<br>dan<br>Pengembang<br>an Sarana<br>Pertanian |  |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   | Peningkatan<br>produksi sayuran<br>(Persen)   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Penyediaan<br>dan<br>Pengembang<br>an                     |  |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  | Pertumbuhan<br>PDB pertanian,<br>peternakan,<br>perburuan dan<br>jasa pertanian<br>(%) | 3,60–<br>3,80   | 2                     | Peningkatan<br>industrialisa<br>si berbasis<br>hilirisasi<br>sumber<br>daya alam,<br>termasuk<br>melalui<br>pengembang<br>an smelter<br>dan kawasan<br>industri<br>terutama di<br>luar Jawa | Jumlah Kawasan<br>Industri (KI) yang<br>difasilitasi di luar<br>Jawa (KI-KEK<br>Industri) |   |  | Penyusunan dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri<br>Kabupaten/Kota | -                 | 2.630.000.00<br>0              | 2.233.420.84<br>6 |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   |   |   |  |  |                   |                                |                   |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGET 2024   | PERATURAN PRESIDEN |   | KABUPATEN/KOTA   |   |  |   |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|---|--------------------|---|--|---|--|---|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |  |           |   | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM                                     | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN                                     | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4         | 5   | 6                  | 7   | 8  | 9   | 10   | 11  | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    |                            |  |           |   | 3                  | Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok | Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya (Destinasi) | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | -             | 1.400.000.000           | 1.794.679.448 |
|      |                    |                            |  |           | Revitalisasi destinasi Bali (Destinasi)                                     |                    |   |  |   |  |   |               |                         |               |
|      |                    |                            |  |           | Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas (Unit) |                    |   |  |   |  |   |               |                         |               |
|      |                    |                            |  |           | Destinasi wisata berbasis Geopark (Destinasi)                               |                    |   |  |   |  |   |               |                         |               |
|      |                    |                            |  |           |   |                    | Destinasi wisata bahari (Destinasi)   |  |   |  |   |               |                         |               |
|      |                    |                            |  |           |   | 4                  | Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital  | Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (Persen)                                   | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif          | -             | 793.696.000             | 770.164.200   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA   |   |  |  |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--|---|--|--|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                                 | PROGRAM                                       | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN                        | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8  | 9   | 10   | 11                                     | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi (Kab/kota         | Peningkata n Daya Saing dan Kesempata n Kerja | Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindunga n Hak Kekayaan Intelektual | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | -                 | 793.696.000                    |    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Jumlah kab/kota kreatif yang dikembang kan(Kab/ kota)          | Peningkata n Daya Saing dan Kesempata n Kerja | Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindunga n Hak Kekayaan Intelektual | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | -                 | 793.696.000                    |    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikem bangkan (Lokasi) | Peningkata n Daya Saing dan Kesempata n Kerja | Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindunga n Hak Kekayaan Intelektual | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | -                 | 793.696.000                    |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |   |  |   |                 |                   |                                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|---|---|--|---|-----------------|-------------------|--------------------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS |   | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                            | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9   | 10   | 11  | 12              | 13                | 14                             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Revitalisasi ruang kreatif (Unit)   | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja | Program<br>Pengembang<br>an Ekonomi<br>Kreatif<br>Melalui<br>Pemanfaatan<br>dan<br>Perlindunga<br>n Hak<br>Kekayaan<br>Intelektual | Pengembangan<br>Ekosistem<br>Ekonomi<br>Kreatif | -               | 793.696.000       |                                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Skema pembiayaan berbasis HKI (Skema)   | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja | Program<br>Pengembang<br>an Ekonomi<br>Kreatif<br>Melalui<br>Pemanfaatan<br>dan<br>Perlindunga<br>n Hak<br>Kekayaan<br>Intelektual | Pengembangan<br>Ekosistem<br>Ekonomi<br>Kreatif | -               | 793.696.000       |                                |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 5                     | Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan | Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EODB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha jumlah prosedur |   |  | -   | -               | -                 |                                |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA  |   |  |  |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|---|---|--|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | dan waktu<br>(Ranking EoDB)   |   |  |  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Nilai Realisasi<br>PMA dan PMDN<br>(Rp triliun)                           | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja | Program<br>Pengendalia<br>n<br>Pelaksanaan<br>Penanaman<br>Modal | Pengendalian<br>Pelaksanaan<br>Penanaman<br>Modal yang<br>menjadi<br>Kewenangan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                              | -                 | 315.000.000                    | 304.320.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Kontribusi PMDN<br>terhadap total<br>realisasi PMA dan<br>PMDN (Persen)   |   |  |  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Nilai realisasi<br>PMA dan PMDN<br>industri<br>pengolahan (Rp<br>Triliun) | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja | Program<br>Pengembang<br>an Iklim<br>Penanaman<br>Modal          | Penetapan<br>Pemberian<br>Fasilitas/Insentif<br>Dibidang<br>Penanaman<br>Modal yang<br>Menjadi<br>Kewenangan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | -                              |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Kontribusi<br>realisasi investasi<br>luar Jawa (Persen)                   |   |  |  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan                         | Program<br>Pengembang<br>an Iklim                                | Pembuatan Peta<br>Potensi Investasi<br>Kabupaten/Kota  | -                 | 283.500.000                    | 251.953.500 |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR                               | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA  |  |                                   |   |               |                         |             |
|------|--------------------|----------------------------|--|---|-------------|--------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------|-------------------------|-------------|
|      |                    |                            |  |   |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN   | PROGRAM  | KEGIATAN                          | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |             |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4                                       | 5           | 6                  | 7  | 8   | 9  | 10                                | 11  | 12            | 13                      | 14          |
|      |                    |                            |  |   |             |                    |  |   | Kesempatan Kerja   | Penanaman Modal                   |   |               |                         |             |
|      |                    |                            |  |   |             |                    |  | Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D) | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota             | -             | 1.680.000.000           | 382.856.304 |
|      |                    |                            |  |   |             | 6                  | Pengembangan industri halal  | Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)        |  |                                   | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | -             | 2.630.000.000           |             |
|      |                    | 7                          | Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tinggi dan | Neraca perdagangan barang (US\$ miliar) | 47,2–49,5   | 1                  | Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa | Pertumbuhan ekspor pertanian (Persen)                               | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja                        | Program Pengembangan Ekspor       | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -             | 700.000.000             | 948.004.245 |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL                               | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           |   | KABUPATEN/KOTA |          |                 |                   |                                |    |  |
|---------|-------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------|---|----------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|--|
|         |                               |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM        | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |  |
| 1       | 2                             | 3  | 4  | 5               | 6                     | 7         | 8   | 9              | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |  |
|         |                               | penguatan<br>Tingkat<br>Kandungan<br>Dalam<br>Negeri<br>(TKDN) | Pertumbuhan<br>ekspor nonmigas<br>(%)                                  | 9,8             |                       |           | Ekspor hasil<br>pertanian<br>(US\$ juta)  |                |          |                 |                   |                                |    |  |
|         |                               |  | Jumlah<br>wisatawan<br>mancanegara<br>(8.9.1a) (juta<br>kunjungan)     | 9,5–14,3        |                       |           | Ekspor hasil<br>perikanan (USD<br>miliar)   |                |          |                 |                   |                                |    |  |
|         |                               |  | Jumlah<br>kunjungan<br>wisatawan<br>nusantara (juta<br>perjalanan)h)   | 1.250–<br>1500  |                       |           | Kontribusi ekspor<br>industri<br>pengolahan<br>(Persen)   |                |          |                 |                   |                                |    |  |
|         |                               |  | Pertumbuhan<br>ekspor produk<br>industri<br>berteknologi<br>tinggi (%) | 11,5            |                       |           | Kontribusi<br>ekspor produk<br>industri<br>berteknologi<br>tinggi (komputer,<br>instrumen, ilmiah,<br>mesin listrik,<br>dirgantara)<br>(Persen) |                |          |                 |                   |                                |    |  |
|         |                               |  |  |                 |                       |           | Pertumbuhan<br>ekspor non migas<br>(Persen)   |                |          |                 |                   |                                |    |  |
|         |                               |  |  |                 |                       |           | Rasio ekspor jasa<br>terhadap PDB<br>(Persen)   |                |          |                 |                   |                                |    |  |
|         |                               |  |  |                 |                       |           | Nilai ekspor<br>produk industri<br>kehutanan (USD<br>miliar)  |                |          |                 |                   |                                |    |  |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |   |                             |  |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                                     | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM                                     | KEGIATAN                    | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7   | 8  | 9   | 10                          | 11   | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 2                     | Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor | Jumlah negara tujuan ekspor (Negara)   | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Pengembangan Ekspor | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | -                 | 700.000.000                    | 948.004.245 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (Persen) |   |                             |  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional (Persen)                                |   |                             |  |                   |                                |             |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |   | KABUPATEN/KOTA   |   |  |   |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|-------------|--------------------|---|--|---|--|---|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |  |           |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM                                     | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4         | 5           | 6                  | 7   | 8  | 9   | 10   | 11  | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    |                            |  |           |             | 3                  | Pengelolaan Impor   | Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)                     | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia    | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | -             | 615.475.249             | 237.914.217   |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |   | Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN (Produk per tahun)                    | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                  | -             | -                       |               |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |   | Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b) (Juta perjalanan)                                 | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                       | -             | 1.102.361.000           | 3.372.712.283 |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |   |  | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                               | -             | 1.400.000.000           | 1.794.679.448 |
|      |                    |                            |  |           |             | 4                  | Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk | Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Persen) | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia    | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | -             | 615.475.249             |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |  |   |  |                   |                                |                     |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|--|--|--|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                     |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14                  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       | melalui<br>Pengadaan<br>Pemerintah<br>yang Efektif   |  |  |   |  |                   |                                |                     |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 5                     | Peningkatan<br>Partisipasi<br>dalam<br>Jaringan<br>Produksi<br>Global  | Jumlah sektor<br>prioritas yang<br>difasilitasi<br>investasi dalam<br>jaringan produksi<br>global (Sektor) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah                    | Penunjang<br>Urusan<br>Kewenangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah | -                 | 993.446.663.<br>476            | 851.267.134.<br>138 |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 6                     | Peningkatan<br>Citra dan<br>Diversifikas<br>i Pemasaran<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Prioritas dan<br>Destinasi<br>Branding,<br>dan Produk<br>Kreatif | Jumlah wisatawan<br>mancanegara<br>(8.9.1(a)) (Juta<br>orang)  | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja                              | Program<br>Peningkatan<br>Daya Tarik<br>Destinasi<br>Pariwisata | Pengelolaan<br>Daya Tarik<br>Wisata<br>Kabupaten/Kota                  | -                 | -                              |                     |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  |  | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja                              | Program<br>Peningkatan<br>Daya Tarik<br>Destinasi<br>Pariwisata | Pengelolaan<br>Kawasan<br>Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota    | -                 | 1.102.361.00<br>0              | 3.372.712.28<br>3   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  |  | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja                              | Program<br>Peningkatan<br>Daya Tarik<br>Destinasi<br>Pariwisata | Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota               | -                 | 1.400.000.00<br>0              | 1.794.679.44<br>8   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |   |                                    |   |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|---|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN                           | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9   | 10                                 | 11  | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD miliar)   | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja | Program<br>Pengembang<br>an Ekspor | Penyelenggaraa<br>n Promosi<br>Dagang melalui<br>Pameran<br>Dagang dan<br>Misi Dagang<br>bagi Produk<br>Ekspor<br>Unggulan yang<br>terdapat pada 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | 700.000.000                    | 948.004.245 |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 7                     | Peningkatan<br>efektifitas<br><i>Prefential<br/>Trade<br/>Agreement</i><br>(PTA) / <i>Free<br/>Trade<br/>Agreement</i><br>(FTA)/ <i>Com<br/>p rehensive<br/>Economic<br/>Partnership<br/>Agreement</i><br>(CEPA)<br>dan<br>diplomasi<br>ekonomi | Jumlah negara<br>akreditasi yang<br>mencapai target<br>peningkatan nilai<br>perdagangan<br>dengan Indonesia<br>(Negara) |   |                                    | -   | -                 | -                              |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       | Jumlah negara<br>akreditasi yang<br>mencapai target<br>peningkatan<br>jumlah wisatawan<br>mancanegara ke<br>Indonesia<br>(Negara)   |   |   |                                    | -   | -                 | -                              |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       | Jumlah ratifikasi<br>perjanjian<br>kerjasama<br>ekonomi<br>internasional<br>(Ratifikasi)  |   |   |                                    | -   | -                 | -                              |             |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |  |  |   |  |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                                       | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9  | 10   | 11  | 12   | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   | Jumlah promosi<br><i>Tourism, Trade<br/>and Investment</i><br>(TTI) terintegrasi<br>(Promosi<br>terintegrasi) | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja                              | Program<br>Pengembang<br>an Ekspor                 | Penyelenggaraa<br>n Promosi<br>Dagang melalui<br>Pameran<br>Dagang dan<br>Misi Dagang<br>bagi Produk<br>Ekspor<br>Unggulan yang<br>terdapat pada 1<br>melalui<br>Pameran<br>Dagang dan<br>Misi Dagang<br>bagi Produk<br>Ekspor<br>Unggulan yang<br>terdapat pada 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | -  | 700.000.000                    |    |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   | PTA/FTA/CEPA<br>yang disepakati   |  |  |   |  |                                |    |
|         |                               | 8                                | Penguatan<br>Pilar<br>Pertumbuha<br>n dan Daya<br>Saing<br>Ekonomi | Tingkat inflasi<br>pangan<br>bergejolak (%)      | 3,0-5,0         | 1                     | Peningkatan<br>Pendalaman<br>Sektor<br>Keuangan | Rasio M2/PDB<br>(Persen)  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Perekonomia<br>n dan<br>Pembanguna<br>n | Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Perekonomian  | -  | 1.160.000.00<br>0              |    |
|         |                               |                                  |  | Kontribusi<br>sektor jasa<br>keuangan/PDB<br>(%) | 4,57–<br>4,58   |                       |   | Jumlah ATM per<br>100.000<br>penduduk<br>(8.10.1*) (Unit)   |  |  | Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah   | Koordinasi,<br>Pelaksanaan<br>Kerja Sama<br>dan<br>Pemantauan<br>Transaksi<br>Non Tunai<br>dengan<br>Lembaga<br>Keuangan<br>Bank dan | -                              |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR                                    | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |   |   |  |   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|--|---|---|--|---|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7  | 8  | 9   | 10  | 11   | 12  | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |  |  |   |   |  | Lembaga<br>Keuangan<br>Bukan Bank   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Rasio Uang<br>Beredar<br>M2/PDB (%)          | 50,5–<br>51,2   |                       | Jumlah Kantor<br>Bank per 100.000<br>penduduk<br>(8.10.2*) (Unit)        | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Perekonomian<br>dan SDA<br>(Sumber Daya<br>Alam) | -  | 1.747.566.78<br>1   | 1.319.850.90<br>0              |    |
|         |                               |                                  |  | Skor logistic<br>performance<br>index (skor) | 3,5             | 2                     | Optimalisasi<br>Pemanfaata<br>n Teknologi<br>Digital dan<br>Industry 4.0 | Kontribusi<br>ekonomi digital<br>(Persen)  | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja                             | Program<br>Pengendalia<br>n Izin Usaha<br>Industri                                      | Penerbitan Izin<br>Usaha Industri<br>(IUI), Izin<br>Perluasan Usaha<br>Industri (IPUI),<br>Izin Usaha<br>Kawasan<br>Industri (IUKI)<br>dan Izin<br>Perluasan<br>Kawasan<br>Industri (IPKI)<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Perizinan di<br>Bidang Industri<br>dalam Lingkup<br>IUI, IPUI,<br>IUKI dan IPKI<br>Kewenangan<br>Kabupaten/<br>Kota | 650.000.000                    |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA  |         |          |  |  |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|---|---------|----------|--|--|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                                    | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN                                  | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7  | 8   | 9       | 10       | 11   | 12   | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  | Peringkat travel and tourism development index (peringkat)j)                       | NA              |                       |  | Nilai transaksi <i>e-commerce</i> (Rp triliun)                    |         |          | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | -                              |    |
|         |                               |                                  |  | Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%) | 100             |                       |  | Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (Orang) |         |          | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif    | -  | -                              |    |
|         |                               |                                  |  | Imbal hasil (yield) surat berharga negara (%)                                      | menurun         | 3                     | Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga | Skor <i>Logistic Performance Index</i>                            |         |          | -  | -  | -                              |    |
|         |                               |                                  |  | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat (%)                         | 34,94           |                       |  | Tingkat inflasi (Persen)  |         |          | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian               | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian   | 920.000.000                    |    |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |   |   |  |   |                                |               |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---|--|---|---|--|---|--------------------------------|---------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12  | 13                             | 14            |
|         |                               |                                  |  | Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (database) | 11              | 4                     | Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)             | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -   | 1.000.000.000                  | 936.453.177   |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       | Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1) (Lokasi)         |  |   |   |  |   |                                |               |
|         |                               |                                  |  |  |                 | 5                     | Reformasi Fiskal  | Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (Persen)   |   |   | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah   | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 795.000.000                    | 700.458.243   |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   | Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ( <i>core tax administration system</i> ) (Persen) |   |   | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah        | 1.310.023.500                  | 1.280.930.770 |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   | Imbal hasil (yield) surat berharga negara (Persen)   |   |   | -  | -   | -                              |               |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   |  |   |   |  |   |                                |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |         |  |  |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|---------|--|--|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7   | 8  | 9       | 10   | 11   | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Meningkat (Persen)   |  |         | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan | 150.000.000       | 22.088.000                     |    |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 6                     | Peningkatan Ketersediaa n dan Kualitas Data dan Informasi Perkembang an Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritima n, Pariwisata, ekonomi Kreatif, dan ekonomi Digital , Pariwisata, ekonomi Kreatif, dan ekonomi Digital | Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (Data base) |         |  | -  | -                 | -                              |    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       | Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (Data base)  |  |         |  |  |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       | Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (Data base)   |  |         |  |  |                   |                                |    |
|         | JUMLAH PN 1                   |                                  |  |           |                 |                       |   |  |         |  |  | 1.389.526.305.842 | 1.168.253.760.717              |    |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL   | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |                               | INDIKATOR   | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |                                | KABUPATEN/KOTA      |   |                             |   |  |                         |               |
|------|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---|--|-------------------------|---------------|
|      |  |                            |                               |   |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR                      | PRIORITAS KABUPATEN | PROGRAM                                     | KEGIATAN                    | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024  | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2  | 3                          |                               | 4   | 5           | 6                  | 7                              | 8                   | 9   | 10                          | 11  | 12   | 13                      | 14            |
| PN 2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 1                          | Pembangunan Wilayah Jawa-Bali | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun) | 5,2–5,5     | 1                  | Pengembangan Kawasan Strategis |                     | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia    | Program Kawasan Permukiman  | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                       | 5.000.000.000           |               |
|      |  |                            |                               |   |             |                    |                                |                     |   |                             |   | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh          | 4.500.000.000           | 3.923.038.830 |
|      |  |                            |                               |   |             |                    |                                |                     |   |                             |   | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh      | 500.000.000             | 491.069.500   |
|      |  |                            |                               | IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai minimum) | 73,65–82,57 | 2                  | Pengembangan Sektor Unggulan   |                     | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Pengembangan Ekspor | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | 300.000.000             |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                                | KABUPATEN/KOTA                 |   |  |  |  |                                |                 |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|-----------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                      | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM   | KEGIATAN                                       | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                 |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7                              | 8                              | 9   | 10   | 11   | 12   | 13                             | 14              |
|         |                               |                                  |  | Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%) | 7,00–7,50       | 3                     | Pengembangan Kawasan Perkotaan |                                | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 33.000.000.000                 | 43.103.124.700  |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |                                |                                | Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah | Program Penyelenggaraan Jalan                  | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  | 6.000.000.000                  | 15.423.952.402  |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |                                |                                |   |  |  | Pengelolaan Leger Jalan  | 250.000.000                    | 703.756.083     |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |                                |                                |   |  |  | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | 1.100.000.000                  | 3.420.885.170   |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |                                |                                |   |  |  | Pembangunan Jalan  | 143.899.448.450                | 174.090.398.241 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA  |  |  |                 |   |                                |                 |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|---|--|--|-----------------|---|--------------------------------|-----------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                          | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                 |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8   | 9  | 10   | 11              | 12  | 13                             | 14              |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                    | 6.196.417.500                  | 5.980.829.960   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Rekonstruksi Jalan  | 158.790.249.060                | 173.539.703.816 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Pemeliharaan Berkala Jalan  | 20.000.000.000                 | 12.900.756.599  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Pemeliharaan Rutin Jalan  | 20.000.000.000                 | 5.650.889.700   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Pembangunan Jembatan  | 185.000.000.000                | 173.279.097.352 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Rehabilitasi Jembatan   | 4.000.000.000                  | 1.378.392.783   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                  | 11.755.595.505                 |                 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah | Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |                 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 200.000.000                    | 192.517.290     |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota               | 300.000.000                    | 698.215.000     |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |   |  |  |                 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan                            | 37.040.000.000                 | 72.441.046.376  |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |           | KABUPATEN/KOTA      |         |          |  |   |                         |             |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|-------------|--------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--|---|-------------------------|-------------|
|      |                    |                            |  |           |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORITAS KABUPATEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024   | REALISASI ANGGARAN 2024 |             |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4         | 5           | 6                  | 7         | 8                   | 9       | 10       | 11   | 12  | 13                      | 14          |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |           |                     |         |          | Kabupaten/Kota   |   |                         |             |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |           |                     |         |          | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                    | 500.000.000   | 468.288.705             |             |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |           |                     |         |          | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                 | 1.500.000.000   | 22.616.051.578          |             |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |           |                     |         |          | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                            | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)  | 100.000.000             | 93.548.136  |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |           |                     |         |          | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C              | 501.600.000   | 503.857.200             |             |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |           |                     |         |          | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan | 396.000.000             | 359.764.400 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |   |   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|---|---|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11  | 12  | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |   | Kabupaten/Kot<br>a  |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          | Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                   | Penyediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor              | 100.000.000                    | 233.451.173       |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |   | Peningkatan<br>Kapasitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor | 997.600.000                    | 996.530.500       |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |   | Penyediaan<br>Bukti Lulus Uji<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                      | 1.750.000.00<br>0              | 1.054.100.00<br>0 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          | Pemeliharaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian<br>Berkala | 200.000.000   | 295.772.793                    |                   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA |                                |         |  |  |                   |                                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|----------------|--------------------------------|---------|--|--|-------------------|--------------------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS |   | INDIKATOR      | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7 | 8              | 9                              | 10      | 11   | 12   | 13                | 14                             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                |                                |         |  | Kendaraan Bermotor   |                   |                                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                |                                |         |  | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 50.000.000        | 45.426.000                     |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                |                                |         | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                      | 200.000.000       | 195.631.950                    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                |                                |         |  | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 500.000.000       | 2.647.440.000                  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                |                                |         |  | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa  | 75.000.000        | 74.615.000                     |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |                 |   |  |                   |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|-------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024   |                   |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11              | 12  | 13   | 14                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Lalu Lintas<br>untuk Jaringan<br>Jalan<br>Kabupaten/Kot<br>a  |  |                   |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Pengawasan<br>dan<br>Pengendalian<br>Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>untuk Jalan<br>Kabupaten/Kot<br>a | 7.397.000.00<br>0  | 7.110.157.28<br>0 |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Forum Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>Kabupaten/Kot<br>a  | 100.000.000  | 96.026.000        |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Persetujuan<br>Hasil Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas<br>(Andalalin)<br>untuk Jalan<br>Kabupaten/Kota            | Pengawasan<br>Pelaksanaan<br>Rekomendasi<br>Andalalin  | 75.000.000        | 23.600.000  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Audit dan<br>Inspeksi<br>Keselamatan<br>LLAJ di Jalan   | Pelaksanaan<br>Inspeksi, Audit<br>dan<br>Pemantauan<br>Pemenuhan<br>Persyaratan<br>Penyelenggara | 50.000.000        | 174.202.000 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |  |  |   |            |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|--|--|---|------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024  |            |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11   | 12   | 13  | 14         |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |  | an Kompetensi<br>Pengemudi<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Kabupaten/Kot<br>a  |   |            |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |  | Penyediaan<br>Angkutan<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>Orang dan/atau<br>Barang Antar<br>Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Pengendalian<br>dan<br>Pengawasan<br>Ketersediaan<br>Angkutan<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>Orang<br>dan/atau<br>Barang Antar<br>Kota dalam 1<br>(Satu)<br>Kabupaten/Kot<br>a | 50.000.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          | Penetapan<br>Rencana Umum<br>Jaringan Trayek<br>Perkotaan dalam<br>1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Pelaksanaan<br>Penyusunan<br>Rencana<br>Umum<br>Jaringan<br>Trayek<br>Perkotaan<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a          | 75.000.000  | 71.206.500 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA                 |   |  |  |  |                                |            |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |            |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7   | 8                              | 9   | 10   | 11   | 12   | 13                             | 14         |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 4                     | Pengemban<br>gan Daerah<br>Tertinggal,<br>Kawasan<br>Perbatasan,<br>Perdesaan,<br>dan<br>Transmigras<br>i |                                | Peningkata<br>n Daya<br>Saing dan<br>Kesempata<br>n Kerja               | Program<br>Pembanguna<br>n Kawasan<br>Transmigrasi | Penataan<br>Persebaran<br>Penduduk yang<br>Berasal dari 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Kerja Sama<br>Pembangunan<br>Transmigrasi<br>yang Berasal<br>dari 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a | 522.000.000                    |            |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                                |   |  |  | Pemindahan<br>dan<br>Penempatan<br>Transmigran<br>yang Berasal<br>dari 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a                              | 150.000.000                    |            |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                                |   |  |  | Penyuluhan<br>Transmigrasi   | 150.000.000                    | 16.660.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                                |   |  |  | Pelatihan<br>Transmigrasi  | 100.000.000                    |            |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                                | Peningkata<br>n Infrastrukturu<br>r dan<br>Konektivitas<br>Antarwilayah | Program<br>Penyelenggara<br>an Jalan               | Penyelenggara<br>an Jalan<br>Kabupaten/Kota  | Pembebasan<br>Lahan/Tanah<br>untuk<br>Penyelenggara<br>an Jalan  | 93.300.000.000                 |            |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                                |   |  |  | Pembangunan<br>Jalan Strategis<br>Desa   | 34.035.561.679                 |            |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                                |   |  |  |  |                                | 5          |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                    | KABUPATEN/KOTA                 |   |                      |                      |   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR          | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM                                     | KEGIATAN             | SUBKEGIAT<br>AN      | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7                  | 8                              | 9   | 10                   | 11                   | 12  | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       | Keuangan<br>Daerah |                                | Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Pendapatan<br>Daerah | Pendapatan<br>Daerah | Analisa dan<br>Pengembangan<br>Pajak Daerah,<br>serta<br>Penyusunan<br>Kebijakan<br>Pajak Daerah                          | 490.000.000                    | 471.000.000       |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                    |                                |   |                      |                      | Penyuluhan<br>dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan<br>Pajak Daerah  | 650.000.000                    | 522.315.000       |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                    |                                |   |                      |                      | Penyediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengelolaan<br>Pajak Daerah  | 1.310.023.50<br>0              | 1.280.930.77<br>0 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                    |                                |   |                      |                      | Pendataan dan<br>Pendaftaran<br>Objek Pajak<br>Daerah   | 266.669.900                    | 250.243.990       |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                    |                                |   |                      |                      | Pengolahan,<br>Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan<br>Basis Data<br>Pajak Daerah   | 795.000.000                    | 700.458.243       |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                    |                                |   |                      |                      | Penilaian Pajak<br>Bumi dan<br>Bangunan<br>Perdesaan dan<br>Perkotaan<br>(PBBP2) serta<br>Bea Perolehan<br>Hak atas Tanah | 297.550.000                    | 211.522.186       |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |                 |   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11              | 12  | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | dan Bangunan<br>(BPHTB)   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Penetapan<br>Wajib Pajak<br>Daerah  | 286.000.000                    | 271.123.138 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Pelayanan dan<br>Konsultasi<br>Pajak Daerah   | 259.105.000                    | 250.675.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Penagihan<br>Pajak Daerah   | 728.945.000                    | 930.076.850 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Penyelesaian<br>Keberatan<br>Pajak Daerah   | 78.900.000                     | 68.760.000  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Pengendalian,<br>Pemeriksaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pajak Daerah                     | 223.221.000                    | 206.055.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Pajak Daerah<br>dan Retribusi<br>Daerah | 144.000.000                    | 237.358.500 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah<br>Daerah                                  | 150.000.000                    | 147.442.000 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |  |  |   |  |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM  | KEGIATAN                                     | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9  | 10   | 11  | 12   | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Rencana<br>Anggaran<br>Daerah | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>KUA dan<br>PPAS                              | 127.300.000                    | 99.564.000  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |  |  |   | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Perubahan<br>KUA dan<br>Perubahan<br>PPAS | 150.000.000                    | 87.408.000  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |  |  |   | Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi<br>RKA- SKPD                     | 217.000.000                    | 199.090.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |  |  |   | Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi<br>Perubahan<br>RKA- SKPD        | 150.000.000                    | 133.011.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |  |  |   | Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi<br>DPA- SKPD                     | 250.000.000                    | 234.335.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |  |  |   | Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi<br>Perubahan<br>DPA-SKPD         | 250.000.000                    | 167.384.000 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |  |   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|--|---|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN                                  | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11   | 12  | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 140.360.000                    | 117.600.800 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 222.600.000                    | 177.233.400 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 720.000.000                    | 164.947.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi Anggaran Belanja Daerah  | 25.000.000                     | 341.006.000 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |                 |  |                                |              |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--------------------------------|--------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |              |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11              | 12   | 13                             | 14           |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Kas Daerah  | 32.000.000                     | 31.768.250 9 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Penatausahaan<br>Pembiayaan<br>Daerah  | 400.000.000                    | 608.118.490  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Koordinasi,<br>Fasilitasi,<br>Asistensi,<br>Sinkronisasi,<br>Supervisi,<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pengelolaan<br>Dana<br>Perimbangan<br>dan Dana<br>Transfer<br>Lainnya | 150.000.000                    | 22.088.000   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Rekonsiliasi<br>Data<br>Penerimaan<br>dan<br>Pengeluaran<br>Kas serta<br>Pemungutan<br>dan<br>Pemotongan<br>atas SP2D<br>dengan Instansi<br>Terkait                            | 49.150.000                     | 60.970.000   |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |                 |   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11              | 12  | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Penyusunan<br>Petunjuk<br>Teknis<br>Administrasi<br>Keuangan yang<br>Berkaitan<br>dengan<br>Penerimaan<br>dan<br>Pengeluaran<br>Kas serta<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pertanggungja<br>waban Sub<br>Kegiatan | 60.000.000                     | 0           |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Pembinaan<br>Penatausahaan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kot<br>a  | 67.428.903                     | 245.000.000 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan<br>Keuangan<br>Daerah   | 100.000.000                    | 56.283.500  |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |                 |  |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11              | 12   | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Konsolidasi<br>Laporan<br>Keuangan<br>SKPD, BLUD<br>dan Laporan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah  | 55.000.000                     | 537.651.250 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                |         |          |                 | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Rancangan<br>Peraturan<br>Daerah<br>tentang<br>Pertanggungja<br>waban<br>Pelaksanaan<br>APBD<br>Kabupaten/Kot<br>a dan<br>Rancangan<br>Peraturan<br>Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran<br>Pertanggungja<br>waban<br>Pelaksanaan<br>APBD<br>Kabupaten/Kot<br>a | 60.000.000                     | 52.500.000  |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL  | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA      |         |          |   |   |                         |                   |
|------|---|----------------------------|--|---|-------------|--------------------|--|---------------------|---------|----------|---|---|-------------------------|-------------------|
|      |   |                            |  |   |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR                                    | PRIORITAS KABUPATEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024   | REALISASI ANGGARAN 2024 |                   |
| 1    | 2   | 3                          |  | 4   | 5           | 6                  | 7  | 8                   | 9       | 10       | 11  | 12  | 13                      | 14                |
|      |   |                            |  |   |             |                    |  |                     |         |          |   | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 100.000.000             |                   |
|      |   |                            |  |   |             |                    |  |                     |         |          | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | 637.108.776.398         | 544.841.189.298   |
|      |   |                            |  |   |             |                    |  |                     |         |          |   | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | 100.000.000.000         | 13.931.224.840    |
|      |   |                            |  |   |             |                    |  |                     |         |          |   | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota  | 256.337.887.078         | 292.494.720.000   |
|      | JUMLAH PN 2   |                            |  |   |             |                    |  |                     |         |          |   |   | 1.783.324.888.973       | 1.585.755.968.922 |
| PN 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 1                          | Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan | Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%) | 100         | 1                  | Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan |                     |         |          | -   | -   | -                       |                   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L       | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA  |         |          |                 |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|--|---|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                                     |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                                   | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7  | 8   | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |
|         | Berkualitas<br>dan Berdaya<br>Saing |                                  |  | Persentase provinsi/kabupat<br>en/kota yang memanfaatkan<br>sistem perencanaan,<br>penganggaran dan monitoring<br>evaluasi unit terpadu dalam<br>proses penyusunan program-<br>program penanggulangan<br>kemiskinan (%) | 100             | 2                     | Integrasi<br>Sistem<br>Administras<br>i Kependudu<br>kan |   |         | -        | -               | -                 |                                |    |
|         |                                     |                                  |  | Persentase daerah yang<br>aktif melakukan pemutakhiran<br>data terpadu penanggulangan<br>kemiskinan (%)   | 100             | 3                     | Pendamping<br>an dan<br>Layanan<br>Terpadu               | Persentase daerah<br>yang menyelenggar<br>akan layanan terpadu<br>penanggulan gan<br>kemiskinan (%)         |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |                                     |                                  |  | Persentase kepemilikan<br>akta kelahiran pada penduduk<br>0–17 tahun (%)  | 100             |                       |  | Presentase daerah<br>yang aktif melakukan<br>pemutakhiran data terpadu<br>penanggula ngan<br>kemiskinan (%) |         |          |                 |                   |                                |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |   |  |  |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---|---|---|--|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  | Persentase kementerian/lem<br>baga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%) | 50              |                       |   | Persentase Provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program- program penanggulangan kemiskinan    |   |  |  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |  |                 | 4                     | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk | Persentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudu kan (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota) | Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | -                 | 250.000.000                    | 365.740.000 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |  |   |  |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|---|---|--|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9  | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   | Persentase<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi,<br>Kab/Kota yang<br>melaksanakan dan<br>memanfaat kan<br>analisis<br>kependudu kan<br>dan informasi<br>kependudu kan<br>(termasuk hasil<br>Pendataan<br>Keluarga) -<br>(Persen<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi,<br>kabupaten dan<br>Kota) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependuduk<br>an | Penyelenggaraa<br>n Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan | -                 | 481.506.000                    | 449.592.000 |
|         |                               | 2                                | Penguatan<br>pelaksanaan<br>perlindungan<br>sosial | Persentase<br>cakupan<br>kepesertaan<br>Jaminan<br>Kesehatan<br>Nasional (JKN)<br>(%) | 98              | 1                     | Sistem<br>jaminan<br>sosial<br>nasional           |   |  |   | -  | -                 | -                              |             |
|         |                               |                                  |  | Tingkat<br>kemiskinan<br>penduduk<br>penyangang<br>disabilitas (%)                    | 11              | 2                     | Bantuan<br>sosial dan<br>subsidi tepat<br>sasaran | Penyaluran<br>Bantuan keluarga<br>untuk kesehatan<br>dan pendidikan   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                  | Program<br>Perlindunga<br>n dan<br>Jaminan<br>Sosial                    | Pengelolaan<br>Data Fakir<br>Miskin Cakupan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota      | -                 | 1.361.660.00<br>0              |             |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                       | KABUPATEN/KOTA  |   |  |   |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--|---|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR             | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM                                   | KEGIATAN                                 | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7                     | 8   | 9   | 10                                       | 11  | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  | Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)  | <10,00          |                       |                       | Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah                         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | -                 | 1.361.660.000                  |    |
|         |                               |                                  |  | Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (%)   | 20              |                       |                       | Penyaluran Bantuan LPG 3 Kg   | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | -                 | 1.361.660.000                  |    |
|         |                               |                                  |  | Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan S osial (BPJS) Ketenagakerjaa n: Pekerja formal (%); Pekerja informal (%) | 74,57; 25,94    |                       |                       | Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA                             | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | -                 | 1.361.660.000                  |    |
|         |                               |                                  |  | Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaa n (juta pekerja)   | 20              | 3                     | Perlindunga n Sosial  | Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif                                | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | -                 | 1.361.660.000                  |    |
|         |                               |                                  |  |  |                 | 4                     | Kesejahtera an Sosial | Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%) | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | -                 | 1.361.660.000                  |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |   | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |  |  |  |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-----------------------|---|--|--|--|--|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |   |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN                          | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |   | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8  | 9  | 10   | 11                                       | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |   |   |                 |                       | Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                  | Program<br>Rehabilitasi<br>Sosial                  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | -  | 3.694.329.000     | 3.430.451.183                  |    |
|         |                               |                                  |   |   |                 |                       | Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan prinsip- prinsip kab/kota inklusif                               | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Perekonomia<br>n dan<br>Pembanguna<br>n | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian   | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 920.000.000       |                                |    |
|         |                               | 3                                | Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta | Persentase persalinan di fasyankes (%)  | 95              | 1                     | Peningakata<br>n kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi                       | Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan                          |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | 440.000.000       | 436.366.200                    |    |
|         |                               |                                  |   | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%) | 63,41           |                       |   | Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)          |  |  | -  | -                 | -                              |    |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                                      | KABUPATEN/KOTA  |  |   |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                            | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                                  | PROGRAM                                  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024                                      | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024                         |  |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7                                    | 8   | 9  | 10  | 11   | 12   | 13   | 14   |
|         |                               |                                  |  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)  | 7,4             | 2                     | Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir        | 120.000.000  | 1.421.993.720  |
|         |                               |                                  |  | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan) | 18              |                       |                                      | Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)                 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil              | 428.000.000  | 419.696.450  |
|         |                               |                                  |  | Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)  | 90              |                       |                                      | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita         | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                 | 440.000.000  |  |
|         |                               |                                  |  | Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)   | 0,18            |                       |                                      | 3   | Peningkatan Pengendalian Penyakit        | Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)    | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |           | KABUPATEN/KOTA      |   |  |   |  |  |               |
|------|--------------------|----------------------------|--|--|-------------|--------------------|-----------|---------------------|---|--|---|--|--|---------------|
|      |                    |                            |  |  |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORITAS KABUPATEN | PROGRAM   | KEGIATAN                                 | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024  | REALISASI ANGGARAN 2024                                    |               |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4  | 5           | 6                  | 7         | 8                   | 9   | 10                                       | 11  | 12   | 13   | 14            |
|      |                    |                            |  |  |             |                    |           |                     |   | Kesehatan Masyarakat                     | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |  |               |
|      |                    |                            |  | Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%) | 90          |                    |           |                     | Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate) | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 1.000.000.000 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA                 |         |  |  |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|--|--------------------------------|---------|--|--|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7  | 8                              | 9       | 10   | 11   | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  | Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten/kota) | 95              |                       | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria  |                                |         | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 230.000.000       | 3.478.506.000                  |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)  | 420             |                       | Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko |                                |         | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 230.000.000       |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kabupaten/kota)    | 514             |                       | Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta  |                                |         | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 230.000.000       |                                |    |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |           | KABUPATEN/KOTA  |   |   |  |  |   |   |
|------|--------------------|----------------------------|--|---|-------------|--------------------|-----------|---|---|---|--|--|---|---|
|      |                    |                            |  |   |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORITAS KABUPATEN   | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024  | REALISASI ANGGARAN 2024                           |   |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4   | 5           | 6                  | 7         | 8   | 9   | 10  | 11   | 12   | 13  | 14  |
|      |                    |                            |  | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)                            | 100         |                    |           | Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi                             |   |   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular               | 230.000.000                                       |   |
|      |                    |                            |  | Persentase rumah sakit terakreditasi (%)  | 100         |                    |           | Jumlah desa endemis <i>schistosomiasis</i> yang mencapai eliminasi                            | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia          | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular               | 230.000.000                                       |   |
|      |                    |                            |  | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)                       | 83          |                    |           | Jumlah kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) |   |   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular               | 230.000.000                                       |   |
|      |                    |                            |  | Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%) | 90          |                    |           | Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)                              |   |   | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 480.000.000                                       | 420.658.120   |
|      |                    |                            |  | Persentase obat memenuhi syarat (%)   | 97          |                    |           | 4   | Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | Jumlah kabupaten/ kota sehat  |  |  | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR                                       | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |         |          |   |   |                                |            |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|--|--|---------|----------|---|---|--------------------------------|------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |            |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7  | 8  | 9       | 10       | 11  | 12  | 13                             | 14         |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |  |  |         |          | Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Bersih dan<br>Sehat   |                                |            |
|         |                               |                                  |  | Persentase<br>makanan<br>memenuhi<br>syarat (%) | 88              | 5                     | Penguatan<br>Sistem<br>Kesehatan<br>dan<br>Pengawasan<br>Obat dan<br>Makanan | Persentase<br>puskesmas tanpa<br>dokter  |         |          | Perencanaan<br>Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan<br>Sumberdaya<br>Manusia<br>Kesehatan untuk<br>UKP dan UKM<br>di Wilayah<br>Kabupaten/Kota  | Pemenuhan<br>Kebutuhan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan<br>Sesuai Standar             | 49.480.000                     | 49.058.000 |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |  | Persentase<br>puskesmas<br>dengan jenis<br>tenaga kesehatan<br>sesuai standar  |         |          | Perencanaan<br>Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan<br>Sumberdaya<br>Manusia<br>Kesehatan untuk<br>UKP dan UKM<br>di Wilayah<br>Kabupaten/Kota  | Pemenuhan<br>Kebutuhan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan<br>sesuai Standar             | 49.480.000                     |            |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |  | Persentase RSUD<br>kabupaten/<br>kota yang memiliki 4<br>dokter spesialis<br>dasar dan 3 dokter<br>spesialis lainnya |         |          | Perencanaan<br>Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan<br>Sumber daya<br>Manusia<br>Kesehatan untuk<br>UKP dan UKM<br>di Wilayah<br>Kabupaten/Kota | Perencanaan<br>dan Distribusi<br>serta<br>Pemerataan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan | -                              |            |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA  |   |   |  |   |                                |                     |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|---|---|---|--|---|--------------------------------|---------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                     |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13                             | 14                  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi                            | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kot<br>a  | 1.455.000.00<br>0              | 1.284.793.00<br>0   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Persentase rumah sakit terakreditasi  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -   | 100.000.000                    | 69.350.000          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial                                  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | -   | 279.386.107.<br>487            | 386.268.690.<br>812 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Jumlah kabupaten/ kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot<br>a | -                              |                     |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA                     |   |   |  |                 |                   |                                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|------------------------------------|---|---|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS |   | INDIKATOR                          | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                        | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7 | 8                                  | 9   | 10  | 11   | 12              | 13                | 14                             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Persentase obat memenuhi syarat    | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Sediaan<br>Farmasi,<br>Alat<br>Kesehatan<br>dan<br>Makanan<br>Minuman  | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | -               | 120.000.000       | 119.708.600                    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Persentase makanan memenuhi syarat | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Sediaan<br>Farmasi,<br>Alat<br>Kesehatan<br>dan<br>Makanan<br>Minuman  | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan  | -               | 140.000.000       |                                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |                                    | Kesehatan dan Makanan Minuman                         | Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |  |                 |                   |                                |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |   | INDIKATOR   | TARGET 2024      | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA   |  |                                |   |               |                         |                 |
|------|--------------------|----------------------------|---|---|------------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|
|      |                    |                            |   |   |                  | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM                                  | KEGIATAN                       | SUBKEGIATAN                                     | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |                 |
| 1    | 2                  | 3                          |   | 4   | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9  | 10                             | 11  | 12            | 13                      | 14              |
|      |                    | 4                          | Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA /Sederajat; Pendidikan tinggi | 0,83; 0,43       | 1                  | Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran | Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): Membaca, Matematika dan Sains Test AKSI (Persen): Membaca, Matematika dan Sains | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | -             | 658.482.063.580         | 195.389.561.775 |
|      |                    |                            |   | Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Membaca; Matematika; Sains                           | 34,10; 30,90; 44 |                    |  |  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -             | 299.830.777.401         | 73.417.121.500  |
|      |                    |                            |   | Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%): Literasi; Numerasi                         | 61,20; 43,54     |                    |  |  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | -             | 2.826.262.000           |                 |



| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGET 2024         | PERATURAN PRESIDEN |   | KABUPATEN/KOTA  |  |                                |   |               |                         |                 |
|------|--------------------|----------------------------|--|---|---------------------|--------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|
|      |                    |                            |  |   |                     | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR                                   | PRIORITAS KABUPATEN   | PROGRAM                                  | KEGIATAN                       | SUBKEGIATAN                                     | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |                 |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4   | 5                   | 6                  | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11  | 12            | 13                      | 14              |
|      |                    |                            |  | Tingkat penyelesaian pendidikan (%): SD/MI/Sederajat; SMP/MTs/Sederajat; SMA/SMK/MA/Sederajat | 98,94; 93,33; 71,71 |                    |   | Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen) | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | -             | 658.482.063.580         | 195.389.561.775 |
|      |                    |                            |  | Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)        | 64,38               |                    |   |   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -             | 299.830.777.401         | 73.417.121.500  |
|      |                    |                            |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)                                      | 32,28               |                    |   |   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | -             | 2.826.262.000           |                 |
|      |                    |                            |  |   |                     | 2                  | Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun | Angka Partisipasi Kasar (Persen) Pendidikan Tinggi                                    |  |                                |   | -             | -                       | -               |
|      |                    |                            |  |   |                     |                    |   | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi           |  |                                | -   | -             | -                       |                 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |   |                                      |   |   |                                |                     |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM   | KEGIATAN                             | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                     |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7   | 8  | 9   | 10                                   | 11  | 12  | 13                             | 14                  |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 3                     | Peningkatan<br>Pengelolaan<br>dan<br>Penempatan<br>Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidika<br>n |  |   |                                      | -   | -   | -                              |                     |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 4                     | Penjaminan<br>Mutu<br>Pendidikan  | Persentase satuan<br>pendidikan<br>berakreditasi<br>minimal B:<br>SD/MI,<br>SMP/MTS,<br>SMA/MA | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengelolaan<br>Pendidikan | Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar                  | -   | 658.482.063.<br>580            | 195.389.561.<br>775 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengelolaan<br>Pendidikan | Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | -   | 299.830.777.<br>401            | 73.417.121.5<br>00  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengelolaan<br>Pendidikan | Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Anak Usia Dini<br>(PAUD)       | -   | 2.826.262.00<br>0              |                     |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Perguruan Tinggi<br>Terakreditasi A  |   |                                      | Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat         | Pelaksanaan<br>Kebijakan,<br>Evaluasi, dan<br>Capaian<br>Kinerja Terkait<br>Kesejahteraan<br>Sosial | 10.765.000.0<br>00             |                     |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA                            |   |   |  |   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|---|---|---|--|---|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN            | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |  |                 | 5                     | Peningkatan<br>Tata Kelola<br>Pendidikan   |   |   |   | Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat  | Pelaksanaan<br>Kebijakan,<br>Evaluasi, dan<br>Capaian<br>Kinerja Terkait<br>Kesejahteraan<br>Sosial | 10.765.000.0<br>00             |             |
|         |                               | 5                                | Peningkatan<br>kualitas<br>anak,<br>perempuan,<br>dan pemuda | Persentase<br>perempuan umur<br>20–24 tahun<br>yang menikah<br>sebelum 18<br>tahun (%)                       | 8,74            | 1                     | Pemenuhan<br>Hak dan<br>Perlindunga<br>n Anak  | Pemenuhan hak<br>dan Perlindungan<br>Anak | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pemenuhan<br>Hak Anak<br>(Pha)                                     | Penguatan dan<br>Pengembangan<br>Lembaga<br>Penyedia<br>Layanan<br>Peningkatan<br>Kualitas Hidup<br>Anak<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota           | -   | 295.069.200                    | 242.234.610 |
|         |                               |                                  |  | Prevalensi anak<br>usia 13–17<br>tahun yang<br>pernah<br>mengalami<br>kekerasan<br>sepanjang<br>hidupnya (%) | menurun         | 2                     | Peningkatan<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>Pemberdaya<br>an dan<br>Perlindunga<br>n Perempuan |   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengarusuta<br>maan<br>Gender dan<br>Pemberdaya<br>an<br>Perempuan | Pelembagaan<br>Pengarusutamaa<br>n Gender (PUG)<br>pada Lembaga<br>Pemerintah<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                      | -   | 270.000.000                    | 166.107.360 |
|         |                               |                                  |  | Indeks<br>Pemberdayaan<br>Gender (IDG)   | 79,16-<br>81,21 |                       |  |   | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengarusuta<br>maan<br>Gender dan<br>Pemberdaya<br>an<br>Perempuan | Pemberdayaan<br>Perempuan<br>Bidang Politik,<br>Hukum, Sosial,<br>dan Ekonomi<br>pada Organisasi<br>Kemasyarakatan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | -   | 169.450.000                    | 132.339.000 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                 | KABUPATEN/KOTA                 |   |   |  |                   |                                |               |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR       | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM                                   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7               | 8                              | 9   | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14            |
|         |                               |                                  |  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan   | 55              |                       |                 |                                | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengarusuta maan Gender dan Pemberdaya an Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | -                 | 456.918.500                    | 397.892.720   |
|         |                               |                                  |  | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir                               | menurun         | 3                     | Kualitas Pemuda |                                | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Kepemudaan       | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | -                 | 4.100.000.000                  | 3.248.600.297 |
|         |                               |                                  |  | Persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%) | 82,58           |                       |                 |                                | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Kepemudaan       | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                 | 850.000.000                    | 1.808.697.550 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |                 |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  | Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)  | 6,72            |                       |           |                                |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)                          | 0,55            |                       |           |                                |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun (%) | 6,87            |                       |           |                                |         |          |                 |                   |                                |    |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |                        | INDIKATOR  | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |                                       | KABUPATEN/KOTA  |   |  |  |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |                        |  |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR                             | PRIORITAS KABUPATEN   | PROGRAM                                     | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          |                        | 4  | 5           | 6                  | 7                                     | 8   | 9   | 10   | 11   | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    | 6                          | Pengentasan kemiskinan | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%) | 50          | 1                  | Akselerasi penguatan ekonomi keluarga | Penyelenggaraan bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan ultra mikro bagi penduduk (KK) | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | -             | 5.425.000.000           | 5.222.059.847 |
|      |                    |                            |                        | Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)   | 300.120     | 2                  | Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial | Desa yang mengembangkan keperantaraan usaha   | Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,   | -             | 5.425.000.000           |               |
|      |                    |                            |                        |  |             |                    |                                       | Pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya   |   |  | Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan  |               |                         |               |
|      |                    |                            |                        |  |             |                    |                                       | Pengembangan kewirausahaan sosial   |   |  |  |               |                         |               |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL  | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGET 2024                              | PERATURAN PRESIDEN                           |                   | KABUPATEN/KOTA   |   |  |   |                                |  |    |               |
|------|---|----------------------------|--|-----------|--|--|-------------------|--|---|--|---|--------------------------------|--|----|---------------|
|      |   |                            |  |           |  | KEGIATAN PRIORITAS                           | INDIKATOR         | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024                  | REALISASI ANGGARAN 2024                      |    |               |
| 1    | 2   | 3                          |  | 4         | 5  | 6  | 7                 | 8  | 9   | 10   | 11  | 12                             | 13   | 14 |               |
|      |   |                            |  |           |  | 3  | Reforma Agraria   | Luas bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agrari  |   |  | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -                              | -  |    |               |
|      |   |                            |  |           |  |  |                   | Jumlah kelompok masyarakat penerima tanah objek reforma agrarian (TORA) yang memperoleh objek reforma agrarian (TORA) yang memperoleh pemberdayaan |   |  |   |                                |  |    |               |
|      |   |                            |  |           |  | 4  | Perhutanan Sosial | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (HA)  |   |  |   | -                              | -  | -  |               |
|      |   |                            |  | 7         | Peningkatan produktivitas dan daya saing | Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang) | 2,8               | 1  | Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri | Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | -  | 2.507.933.800 |
|      | Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%) | 40,95                      |  |           |  | PT Vokasi berakreditasi A                    |                   |  |   |  |   |                                |  |    |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA  |         |          |                 |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7         | 8   | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  | Persentase<br>lulusan PT yang<br>langsung bekerja<br>dalam jangka<br>waktu 1 tahun<br>setelah<br>kelulusan (%)          | 61,71           |                       |           | Jumlah lulusan<br>pendidikan<br>menengah vokasi<br>(orang)                        |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah prototipe<br>dari perguruan<br>tinggi (prototipe)  | 243             |                       |           | Jumlah lulusan<br>pendidikan tinggi<br>vokasi (orang)                             |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah produk<br>inovasi dari<br>tenant<br>Perusahaan<br>Pemula Berbasis<br>Teknologi<br>(PPBT) yang<br>dibina (produk) | 600             |                       |           | Jumlah lulusan<br>pelatihan vokasi<br>(orang)<br>(Pelaksanaan<br>Kartu Pra-Kerja) |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah inovasi<br>yang<br>dimanfaatkan<br>industri/badan<br>usaha (inovasi)   | 210             |                       |           | Jumlah<br>pemagangan<br>dalam negeri<br>(orang)                                   |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah<br>permohonan<br>paten yang<br>memenuhi<br>syarat<br>administrasi<br>formalitas KI<br>domestik (paten)           | 3.000           |                       |           | Jumlah<br>pemagangan luar<br>negeri (orang)                                       |         |          |                 |                   |                                |    |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |         |          |                 |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|--|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7  | 8  | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  | Jumlah paten granted (domestik) (paten)  | 1.000           | 2                     | Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas              | Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |                               |                                  |  | Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)                                     | 20              |                       |  | Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional  |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)  | 138             |                       |  | Jumlah sitasi di jurnal internasional  |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)   | 10              |                       |  | Jumlah KI yang didaftarkan   |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan: Berbasis perguruan tinggi (unit); Berbasis nonperguruan tinggi (unit) | 8; 5            | 3                     | Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan Penciptaan Inovasi | Peringkat <i>Global Innovation Index</i>   |         |          | -               | -                 | -                              |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                   |  | KABUPATEN/KOTA  |  |  |                 |                    |                                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|-------------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS |                   | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                        | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7                 | 8  | 9   | 10   | 11   | 12              | 13                 | 14                             |
|         |                               |                                  |  | Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)  | 40              |                       |                   | Jumlah paten yang diberikan (resident)   |   |  |  |                 |                    |                                |
|         |                               |                                  |  | Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya alam (teknologi); Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi) | 24; 35          | 4                     | Prestasi Olahraga | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program Pengembang<br>an Kapasitas<br>Daya Saing<br>Keolahragaa<br>n | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                         | -               | 1.100.000.00<br>0  | 1.555.321.12<br>0              |
|         |                               |                                  |  | Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games   | 3               |                       |                   | Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>                             | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program Pengembang<br>an Kapasitas<br>Daya Saing                     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | -               | 11.300.000.0<br>00 | 54.093.226.6<br>76             |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL                         | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGET 2024                                      | PERATURAN PRESIDEN |  |  | KABUPATEN/KOTA                           |                                |                                      |             |                   |                         |
|------|--|----------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
|      |  |                            |  |  |  | KEGIATAN PRIORITAS |  | INDIKATOR                                    | PRIORITAS KABUPATEN                      | PROGRAM                        | KEGIATAN                             | SUBKEGIATAN | ANGGARAN 2024     | REALISASI ANGGARAN 2024 |
| 1    | 2  | 3                          |  | 4  | 5  | 6                  | 7  | 8  | 9  | 10                             | 11                                   | 12          | 13                | 14                      |
|      |  |                            |  | Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games | 3  |                    | Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i><br>Peringkat pada Asian Games<br>Peringkat pada Asian Para Games |  | Keolahragaan                             |                                |                                      |             |                   |                         |
|      | JUMLAH PN 3                                |                            |  |  |  |                    |  |  |  |                                |                                      |             | 3.237.030.542.930 | 1.273.685.484.740       |
| PN 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1                          | Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas Bangsa yang maju, modern, dan berkarakter | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)   | 79,38  | 1                  | Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | -           | 658.482.063.580   | 195.389.561.775         |
|      |  |                            |  |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                    |  |  |  |                                |                                      |             |                   |                         |
|      |  |                            | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)   | 78,08  | Pengelolaan Pendidikan Khusus                    |                    |  |  |  |                                |                                      |             |                   |                         |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA   |  |  |  |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|--|---|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |  |   |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4   | 5           | 6                  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    |                            |  | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)         | 66,39       |                    |  | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                           | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan         | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | -             | 4.100.000.000           | 3.248.600.297 |
|      |                    |                            |  | Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)         | 73,65       | 2                  | Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif |  | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Penataan Organisasi  | -             | 1.179.200.000           | 1.018.170.000 |
|      |                    |                            |  | Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai)           | 75,01       |                    |  |  | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Kepegawaian Daerah                                   | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN   | -             | 3.572.113.787           | 2.621.143.000 |
|      |                    |                            |  | Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai) | 79,42       |                    |  |  | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan                  | Program Kepegawaian Daerah                                   | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | -             | 1.156.522.000           | 1.459.157.500 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA                 |   |   |  |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|--------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7  | 8                              | 9   | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |  |                                | Pelayanan<br>Publik                                   |   |  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  | Nilai Dimensi<br>Persatuan<br>Indonesia (nilai)  | 79,07           | 3                     | Revolusi<br>mental<br>dalam<br>sistem sosial<br>untuk<br>memperkuat<br>ketahanan,<br>kualitas dan<br>peran<br>keluarga<br>dan<br>masyarakat<br>dalam<br>pembentuka<br>n karakter |                                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengarusuta<br>maan<br>Gender dan<br>Pemberdaya<br>an<br>Perempuan | Pelembagaan<br>Pengarusutamaa<br>n Gender (PUG)<br>pada Lembaga<br>Pemerintah<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota  | -                 | 270.000.000                    | 166.107.360 |
|         |                               |                                  |  | Nilai Dimensi<br>Kerakyatan yang<br>Dipimpin oleh<br>Hikmat<br>Kebijaksanaan<br>dalam<br>Permusyawaratan/<br>Perwakilan<br>(nilai) | 75,43           |                       |  |                                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Keluarga                                | Penguatan dan<br>Pengembangan<br>Lembaga<br>Penyedia<br>Layanan<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Keluarga dalam<br>Mewujudkan<br>KG dan Hak<br>Anak yang<br>Wilayah<br>Kerjanya dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | 821.690.600                    | 731.726.760 |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA      |   |   |  |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|--|---|-------------|--------------------|--|---------------------|---|---|--|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |  |   |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4   | 5           | 6                  | 7  | 8                   | 9   | 10  | 11   | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    |                            |  | Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai) | 72,72       | 4                  | Penguatan pusat- pusat perubahan gerakan revolusi mental   |                     | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | -             | 1.958.800.000           | 2.149.045.731 |
|      |                    |                            |  | Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)                                  | 10          | 5                  | Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila   |                     | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | -             | 2.696.644.162           | 4.260.892.283 |
|      |                    |                            |  | Indeks Karakter Remaja (nilai)                                      | 69,92       | 6                  | Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme |                     | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | -             | 2.696.644.162           |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR                             | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA                 |   |   |  |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |                                       |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM   | KEGIATAN                                  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4                                     | 5               | 6                     | 7   | 8                              | 9   | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |                                       |                 |                       | e dan patriotisme   |                                |   |   |  |                   |                                |             |
|         |                               | 2                                | Meningkatka<br>n Pemajuan<br>dan<br>Pelestarian<br>Kebudayaan<br>untuk<br>memperkuat<br>karakter dan<br>mempertegu<br>h jati diri<br>bangsa,<br>meningkatka<br>n<br>kesejahteraa<br>n rakyat,<br>dan<br>mempengaru<br>hi arah<br>perkembang<br>an peradaban<br>dunia | Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)  | 57,6            | 1                     | Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal  |                                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengembang<br>an<br>Kebudayaan | Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | 955.000.000                    | 828.362.980 |
|         |                               |                                  |  | Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai) | 39,01           | 2                     | Pengemban<br>gan dan<br>Pemanfaata<br>n Kekayaan<br>Budaya<br>untuk<br>memperkuat<br>karakter<br>bangsa dan<br>kesejahteraa<br>n rakyat |                                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengembang<br>an<br>Kebudayaan | Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | 955.000.000                    | 828.362.980 |
|         |                               |                                  |  | Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)  | 50              | 3                     | Perlindunga<br>n Hak<br>Kebudayaan<br>dan Ekspresi<br>Budaya<br>untuk<br>memperkuat<br>kebudayaan<br>yang<br>inklusif                   |                                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia | Program<br>Pengembang<br>an<br>Kebudayaan | Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | 955.000.000                    | 828.362.980 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |   | INDIKATOR                          | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA                 |  |   |   |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|---|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |   |                                    |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |   | 4                                  | 5               | 6                     | 7  | 8                              | 9  | 10  | 11  | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |   |                                    |                 | 4                     | Pengemban<br>gan<br>Diplomasi<br>Budaya<br>untuk<br>memperkuat<br>pengaruh<br>Indonesia<br>dalam<br>perkemba<br>ngan<br>peradaban<br>dunia                   |                                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                    | Program<br>Pengembang<br>an<br>Kebudayaan   | Pelestarian<br>Kesenian<br>Tradisional<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota               | -                 | 1.679.918.00<br>0              | 1.676.668.98<br>6 |
|         |                               |                                  |   |                                    |                 | 5                     | Pengemba<br>ngan tata<br>kelola<br>pembanguna<br>n<br>kebudayaan   |                                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                    | Program<br>Pengembang<br>an<br>Kebudayaan   | Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                            | -                 | 955.000.000                    | 828.362.980       |
|         |                               | 3                                | Memperkuat<br>moderasi<br>beragama<br>untuk<br>mengukuhka<br>n toleransi,<br>kerukunan<br>dan harmoni<br>sosial | Nilai Dimensi<br>Toleransi (nilai) | 73,39           | 1                     | Penguatan<br>cara<br>pandang,<br>sikap dan<br>praktik<br>beragama<br>dalam<br>perspektif<br>jalan tengah<br>untuk<br>memantap<br>kan<br>persaudara<br>an dan |                                | Peningkata<br>n<br>Kondusivit<br>as Wilayah<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Ekonomi | Program<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembang<br>an<br>Ketahanan<br>Ekonomi,<br>Sosial, dan<br>Budaya | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya | -                 | 720.000.000                    | 1.015.031.41<br>5 |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA                 |  |   |   |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|---|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7  | 8                              | 9  | 10  | 11  | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       | kebersamaa<br>n di<br>kalangan<br>umat<br>beragama             |                                |  |   |   |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  | Nilai      Dimensi<br>Kerja      Sama<br>(nilai) | 76,96           | 3                     | Penyelarasa<br>n relasi<br>agama dan<br>budaya                 |                                | Peningkata<br>n<br>Kondusivit<br>as Wilayah<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Ekonomi | Program<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembang<br>an<br>Ketahanan<br>Ekonomi,<br>Sosial, dan<br>Budaya | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya | -                 | 720.000.000                    | 1.015.031.41<br>6 |
|         |                               |                                  |  |  |                 | 4                     | Peningkatan<br>kualitas<br>pelayanan<br>kehidupan<br>beragama  |                                | Peningkata<br>n<br>Kondusivit<br>as Wilayah<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Ekonomi | Program<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembang<br>an<br>Ketahanan<br>Ekonomi,<br>Sosial, dan<br>Budaya | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi Sosial<br>dan Budaya  | -                 | 720.000.000                    | 1.015.031.41<br>7 |
|         |                               |                                  |  |  |                 | 5                     | Pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan sumber<br>daya<br>keagamaan |                                | Peningkata<br>n<br>Kondusivit<br>as Wilayah<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Ekonomi | Program<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembang<br>an<br>Ketahanan<br>Ekonomi,<br>Sosial, dan<br>Budaya | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya | -                 | 720.000.000                    | 1.015.031.41<br>8 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA |  |   |  |   |                     |                                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|--|----------------|--|---|--|---|---------------------|--------------------------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS |  | INDIKATOR      | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7  | 8              | 9  | 10  | 11   | 12  | 13                  | 14                             |
|         |                               | 4                                | Peningkatan<br>Budaya<br>Literasi,<br>Inovasi dan<br>Kreativitas<br>bagi<br>terwujudnya<br>masyarakat<br>berpengetah<br>uan dan<br>berkarakter | Indeks<br>Pembangunan<br>Literasi<br>Masyarakat<br>(nilai | 15              | 1                     | Peningkatan<br>budaya<br>literasi  |                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                  | Program<br>Pembinaan<br>Perpustakaa<br>n                | Pembudayaan<br>Gemar<br>Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota  | -   | 532.319.650         | 270.328.500                    |
|         |                               |                                  |  |   |                 | 2                     | Pengemban<br>gan,<br>pembinaan,<br>dan<br>perlindunga<br>n Bahasa<br>Indonesia,<br>bahasa dan<br>aksara<br>daerah, serta<br>sastra |                |  |   |  | Pembinaan,<br>Pengembangan<br>dan<br>Perlindungan<br>Bahasa dan<br>Sastra yang<br>Penuturannya<br>dalam | -                   | -                              |
|         |                               |                                  |  |   |                 | 3                     | Pengemban<br>gan budaya<br>Iptek,<br>inovasi,<br>kreativitas,<br>dan daya<br>cipta   |                | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Penelitian<br>dan<br>Pengembang<br>an Daerah | Pengembangan<br>Inovasi dan<br>Teknologi   | -   | 1.438.000.00<br>0   | 895.930.390                    |
|         |                               |                                  |  |   |                 | 4                     | Penguatan<br>institusi<br>sosial<br>penggerak<br>literasi dan<br>inovasi   |                |  |   | Pembinaan,<br>Pengembangan<br>dan<br>Perlindungan<br>Bahasa dan<br>Sastra yang<br>Penuturannya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | -   | -                   |                                |
|         | JUMLAH PN 4                   |                                  |  |   |                 |                       |  |                |  |   |  | 987.834.693.<br>342   | 221.260.910.<br>168 |                                |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L   | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL | INDIKATOR                     | TARGE<br>T 2024   | PERATURAN PRESIDEN    |  |  | KABUPATEN/KOTA   |   |  |  |                   |                                |
|---------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|--|--|-------------------|--------------------------------|
|         |   |                                  |                               |   | KEGIATAN<br>PRIORITAS |  | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM                                   | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |
| 1       | 2   | 3                                | 4                             | 5   | 6                     | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12   | 13                | 14                             |
| PN<br>5 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembang an Ekonom dan Pelayanan Dasar         | 1                                | Infrastruktur Pelayanan Dasar | Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)  | 1                     | Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau | Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit)      | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia  | Program Kawasan Permukiman                | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh                     | 4.500.000.000     | 3.923.038.830                  |
|         | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%) |                                  |                               | 94,18   |                       |  | Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit) |  |   | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU                            | -                 |                                |
|         |   |                                  |                               | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) |                       |  | 83,55  | Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA (rumah tangga) | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Kawasan Permukiman   | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | -                 | 10.000.000.000                 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA   |   |                            |  |                   |                                |               |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|---|----------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM                                   | KEGIATAN                   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7         | 8  | 9   | 10                         | 11   | 12                | 13                             | 14            |
|         |                               |                                  |  | Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%) | 75,99           |                       |           | Jumlah rumah tangga berpendapa tan rendah yang menerima bantuan/ subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga) | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | -                 | 10.000.000.000                 | 4.414.108.330 |
|         |                               |                                  |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)      | 92,76           |                       |           | Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)   | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | -                 | 10.000.000.000                 | 4.414.108.330 |
|         |                               |                                  |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum amanf) (%)     | 15              |                       |           | Jumlah kabupaten/ kota yang mengembang kan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/kota)   |   |                            | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                         | -                 | -                              |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024           | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA  |  |   |   |                   |                                |               |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                               |                                  |  |   |                           | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5                         | 6                     | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12                | 13                             | 14            |
|         |                               |                                  |  | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)   | 25,53                     |                       |  | Jumlah kabupaten /kota yang mengimplem entasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten /kota) | Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik | Program Penataan Bangunan Gedung                              | Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | -                 | 4.900.000.000                  | 2.963.975.370 |
|         |                               |                                  |  | Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%) | 67,23                     |                       |  | Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpad u (Hektar)                            | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia                            | Program Kawasan Permukiman                                    | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  | -                 | 10.000.000.000                 | 4.414.108.330 |
|         |                               |                                  |  | Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)  | 100                       |                       |  |   | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia                            | Program Kawasan Permukiman                                    | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha  | -                 | 10.000.000.000                 | 4.414.108.330 |
|         |                               |                                  |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah                                   | 86 layak termasuk 12 aman | 2                     | Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman | Peningkata n Kualitas Lingkunga n Hidup dan Pengelolaa  | Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam | -   | 26.339.298.471    | 19.465.876.630                 |               |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGET 2024                      | PERATURAN PRESIDEN |           | KABUPATEN/KOTA   |   |   |   |               |                         |                 |
|------|--------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|-----------|--|---|---|---|---------------|-------------------------|-----------------|
|      |                    |                            |  |   |                                  | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |                 |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4   | 5                                | 6                  | 7         | 8  | 9   | 10  | 11  | 12            | 13                      | 14              |
|      |                    |                            |  | domestik) layak dan aman (%)  | 3                                |                    |           | n Persampahan  |   | Daerah Kabupaten/Kota   |   |               |                         |                 |
|      |                    |                            |  | Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) ditempat terbuka (%)        |                                  |                    |           | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T                                | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah        | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | -             | 26.339.298.471          | 8.602.786.312   |
|      |                    |                            |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaane) (%) | 80 penanganan dan 20 pengurangan |                    |           | skala permukiman (SR) Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)           | Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah           | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Urusan Penyelenggara n PSU Perumahan  | -             | 54.800.000.000          | 159.708.209.910 |
|      |                    |                            |  | Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)   | 22                               |                    |           | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT) | Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah           | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Urusan Penyelenggara n PSU Perumahan  | -             | 54.800.000.000          |                 |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |   |  | KABUPATEN/KOTA  |   |   |             |                |                         |
|------|--------------------|----------------------------|--|--|-------------|--------------------|---|--|---|---|---|-------------|----------------|-------------------------|
|      |                    |                            |  |  |             | KEGIATAN PRIORITAS |   | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN   | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN | ANGGARAN 2024  | REALISASI ANGGARAN 2024 |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4  | 5           | 6                  | 7 | 8  | 9   | 10  | 11  | 12          | 13             | 14                      |
|      |                    |                            |  | Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota) | 97          |                    |   | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)  | Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah           | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  | -           | 54.800.000.000 |                         |
|      |                    |                            |  | Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)  | 66,34       |                    |   | Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)  | Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah           | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  | -           | 54.800.000.000 |                         |
|      |                    |                            |  | Persentase luas sawah beririgasi (%)   | 69,1        |                    |   | Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota) | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah        | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | -           | 26.339.298.471 | 19.465.876.630          |
|      |                    |                            |  | Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)  | 11.956      |                    |   | Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)                           |   |   | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota            | -           | -              |                         |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA   |  |  |  |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |  |           |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4         | 5           | 6                  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |  | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR) | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | -             | 5.160.000.000           | 9.770.915.562 |
|      |                    |                            |  |           |             |                    | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (RT) | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                           | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | -  | 5.160.000.000 | 9.770.915.562           |               |
|      |                    |                            |  |           |             |                    | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (RT)                     | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                           | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | -  | 5.160.000.000 | 9.770.915.562           |               |
|      |                    |                            |  |           |             |                    | Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)                                 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                           | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | -  | 5.160.000.000 | 9.770.915.562           |               |



| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA   |   |  |  |               |                         |                 |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|-------------|--------------------|--|--|---|--|--|---------------|-------------------------|-----------------|
|      |                    |                            |  |           |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |                 |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4         | 5           | 6                  | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12            | 13                      | 14              |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |  | Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)  | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | -             | 26.339.298.471          | 19.465.876.630  |
|      |                    |                            |  |           |             | 3                  | Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan | Tambahan penyediaan air baku dari sumber air berkelanjutan (m3/detik)                    | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)              | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | -             | 128.465.000.000         | 112.195.729.674 |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |  | Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai) | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)              | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | -             | 128.465.000.000         | 112.195.729.674 |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |  | Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA terpadu berbasis teknologi cerdas      | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka                     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)              | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1                              | -             | 128.465.000.000         | 112.195.729.674 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                                      | KABUPATEN/KOTA   |   |   |   |                   |                                |                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                            | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                                       | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN                                       | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7                                    | 8  | 9   | 10  | 11  | 12                | 13                             | 14             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                                      | (smart water management) (unit)                                      | Stabilisasi Ekonomi                                     |   | (satu) Daerah Kabupaten/Kota                          |                   |                                |                |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 4                     | Keselamatan dan Kemanan Transportasi | Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)     |   |   | -   | -                 | -                              |                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                                      | Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio) |   |   |   |                   |                                |                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                                      | Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)     |   |   |   |                   |                                |                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                                      | Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)            |   |   |   |                   |                                |                |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 5                     | Ketahanan dan Kemananan Transportasi |  | Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | -                 | 39.340.000.000                 | 96.223.601.659 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA                 |  |  |  |                   |                                |                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------------------|----------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8                              | 9  | 10   | 11   | 12                | 13                             | 14             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                | Peningkata<br>n<br>Infrastrukturu<br>r dan<br>Konektivitas<br>Antarwilayah | Program<br>Penyelenggaraan<br>Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan<br>Jalan (LLAJ) | Pengelolaan<br>Terminal<br>Penumpang<br>Tipe C   | -                 | 601.600.000                    | 597.405.336    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                | Peningkata<br>n<br>Infrastrukturu<br>r dan<br>Konektivitas<br>Antarwilayah | Program<br>Penyelenggaraan<br>Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan<br>Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas untuk<br>Jaringan Jalan                      | -                 | 8.272.000.000                  | 10.123.870.230 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                | Peningkata<br>n<br>Infrastrukturu<br>r dan<br>Konektivitas<br>Antarwilayah | Program<br>Penyelenggaraan<br>Lalu<br>Lintas dan                             | Persetujuan<br>Hasil Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas   | -                 | 75.000.000                     | 23.600.000     |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           |                                | Peningkata<br>n<br>Infrastrukturu<br>r dan<br>Konektivitas                 | Program<br>Penyelenggaraan<br>Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan<br>Jalan (LLAJ) | Penetapan<br>Rencana Umum<br>Jaringan Trayek<br>Perkotaan dalam<br>1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | 75.000.000                     | 71.206.500     |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |  |   |   |                   |                                |               |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|--|---|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM  | KEGIATAN                                  | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |               |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7   | 8  | 9  | 10  | 11  | 12                | 13                             | 14            |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   |  | Antarwilay<br>ah                                   |   | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                                |               |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 6                     | Ketahanan Kebencanaa<br>n Infrastruktur               | Jumlah Provinsi yang mingkatkan ketahanan pangan bencana (hidrometeor ologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi) |  |   | -   | -                 | -                              |               |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |   | Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)   |  |   |   |                   |                                |               |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 7                     | Waduk <i>Multipurpos</i><br>e dan modernisasi irigasi | Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)                                | Peningkata<br>n Konduktivitas Wilayah dalam rangka | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi   | -                 | 425.000.000                    | 2.906.833.508 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |                       | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                    | KABUPATEN/KOTA   |   |  |  |                                 |                                |                 |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------|--|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|         |                               |                                  |                       |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR          | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM   | KEGIATAN                                     | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024               | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                 |
| 1       | 2                             | 3                                |                       | 4  | 5               | 6                     | 7                  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12                              | 13                             | 14              |
|         |                               |                                  |                       |  |                 |                       |                    | Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (kumulatif)                        | Stabilisasi Ekonomi   |  | yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                 |                                |                 |
|         |                               |                                  |                       |  |                 |                       |                    | Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)         |   |  |  |                                 |                                |                 |
|         |                               |                                  |                       |  |                 |                       |                    | Presentase daerah irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (persen) (kumulatif) |   |  |  |                                 |                                |                 |
|         |                               |                                  |                       |  |                 |                       |                    | Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)                               |   |  |  |                                 |                                |                 |
|         |                               |                                  |                       |  |                 |                       |                    |  |   | Peningkata<br>n Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian            | Pembangunan Prasarana Pertanian | -                              | 7.647.721.411   |
|         |                               | 2                                | Infrastruktur Ekonomi | Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/kota (%) | 95/74/64        | 1                     | Konektivitas Jalan | Panjang jalan baru yang dibangun (3.000 km)  | Peningkata<br>n Infrastruktur dan Konektivita<br>s Antarwilay<br>ah | Program Penyelengga<br>raan Jalan            | Penyelenggaraa<br>n Jalan Kabupaten/Kota                           | -                               | 684.327.272.194                | 584.485.886.488 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024              | PERATURAN PRESIDEN    |                         | KABUPATEN/KOTA  |         |          |                 |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |  |                              | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR               | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5                            | 6                     | 7                       | 8   | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  | Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (km)         | 1.513                        |                       |                         | Persentase kondisi mantap jalan nasional (97%)  |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Panjang jalan tol baru yang terbangun (km)                             | 2.410                        |                       |                         | Persentase kondisi mantap jalan provinsi (75%)  |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km)                    | 7.255                        |                       |                         | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota (65%)   |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)                  | 7                            | 2                     | Konektivitas Kereta Api | Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) (km)                       |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah rute subsidi tol laut (rute)                                    | 35                           |                       |                         | Persentase kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index kategori 1 dan 2 (persen)</i> |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi) | 23 (17 selesai, 6 berlanjut) |                       |                         | Panjang jalur KA yang beroperasi (km)   |         |          |                 |                   |                                |    |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGET 2024  | PERATURAN PRESIDEN |                    | KABUPATEN/KOTA   |         |          |             |               |                         |    |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|----------------------------|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--|---------|----------|-------------|---------------|-------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
|      |                    |                            |  |  |              | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR          | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |    |  |  |  |  |  |  |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4  | 5            | 6                  | 7                  | 8  | 9       | 10       | 11          | 12            | 13                      | 14 |  |  |  |  |  |  |
|      |                    |                            |  | Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi) | 12 (selesai) |                    |                    | Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)     |         |          | -           | -             | -                       |    |  |  |  |  |  |  |
|      |                    |                            |  | Jumlah rute jembatan udara (rute)                      | 44           | 3                  | Konektivitas Laut  | Jumlah pelabuhan-pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (28 pelabuhan) (lokasi) |         |          |             |               |                         |    |  |  |  |  |  |  |
|      |                    |                            |  |  |              |                    |                    | Jumlah trayek subsidi tol laut (25 trayek) (trayek)                                      |         |          |             |               |                         |    |  |  |  |  |  |  |
|      |                    |                            |  |  |              | 4                  | Konektivitas Udara | Jumlah rute jembatan udara (43 rute) (Rute)  |         |          |             |               |                         |    |  |  |  |  |  |  |
|      |                    |                            |  |  |              |                    |                    | Jumlah bandara baru yang dibangun (21 lokasi) (lokasi)                                   |         |          |             |               |                         |    |  |  |  |  |  |  |
|      |                    |                            |  |  |              |                    |                    | Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi) (lokasi)            |         |          |             |               |                         |    |  |  |  |  |  |  |
|      |                    |                            |  |  |              |                    |                    | Jumlah bandara perairan (waterbased airport) yang dibangun (5 lokasi) (lokasi)           |         |          |             |               |                         |    |  |  |  |  |  |  |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |                         | INDIKATOR  | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |                        | KABUPATEN/KOTA  |   |   |   |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------|--------------------|------------------------|---|---|---|---|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |                         |  |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR              | PRIORITAS KABUPATEN   | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          |                         | 4  | 5           | 6                  | 7                      | 8   | 9   | 10  | 11  | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    |                            |                         |  |             | 5                  | Konektivitas Darat     | Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (36 lokasi) (lokasi)                      |   |   | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                | -             | -                       |               |
|      |                    | 3                          | Infrastruktur Perkotaan | Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass (kumulatif) (kota) | 10          | 1                  | Transportasi Perkotaan | Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)                                    |   |   | -   | -             | -                       |               |
|      |                    |                            |                         | Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)               | 6           |                    |                        | Jumlah jalur khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (kota)                                   |   |   |   |               |                         |               |
|      |                    |                            |                         | Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)        | 10          |                    |                        | Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (kota) | Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah | -             | 50.000.000              | 1.282.661.650 |



| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |   | KABUPATEN/KOTA  |   |  |  |               |                         |               |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|-------------|--------------------|---|---|---|--|--|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                    |                            |  |           |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORITAS KABUPATEN   | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4         | 5           | 6                  | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12            | 13                      | 14            |
|      |                    |                            |  |           |             | 2                  | Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan   | Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen)(kumulatif)                  |   |  | -  | -             | -                       |               |
|      |                    |                            |  |           |             | 3                  | Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan               | Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/kota) | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota      | -             | 26.339.298.471          | 8.602.786.312 |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |   |   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                          | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | -             | 5.160.000.000           | 9.770.915.562 |
|      |                    |                            |  |           |             | 4                  | Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan | Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan (kawasan)  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia                          | Program Kawasan Permukiman                                       | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha       | -             | 10.000.000.000          | 4.414.108.330 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |                              | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |         |          |                 |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---|--|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |                              |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |                              | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8  | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               | 4                                | Energi dan Ketenagalistrikan | Jumlah produksi tenaga listrik (GWh)                                    | 431.281,20      | 1                     | Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan | Penurunan intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)                  |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |                               |                                  |                              | Penurunan emisi CO2 pembangkit (juta ton)                               | 6,07            |                       |   | Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit (%) |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |                              | Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)                   | 85.216          | 2                     | Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan | SAIDI menjadi (jam/ pelanggan)   |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |                              | Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif,sambungan rumah)    | 4.010.445       |                       |   | Penyediaan gas (SBM)   |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |                              | Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD) | 1.276.000       | 3                     | Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik        | Produksi tenaga listrik (TWh)  |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |                              |   |                 |                       |   | Cadangan operasional BBM (hari)  |         |          |                 |                   |                                |    |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR            | TARGET 2024   | PERATURAN PRESIDEN |           |                              | KABUPATEN/KOTA  |  |   |  |                         |               |               |
|------|--------------------|----------------------------|----------------------|---|--------------------|-----------|------------------------------|---|--|---|--|-------------------------|---------------|---------------|
|      |                    |                            |                      |   | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORITAS KABUPATEN          | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024  | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |               |
| 1    | 2                  | 3                          |                      | 4   | 5                  | 6         | 7                            | 8   | 9  | 10  | 11   | 12                      | 13            | 14            |
|      |                    | 5                          | Transformasi Digital | Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)               | 8,8                | 1         | Penuntasan Infrastruktur TIK | Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses mobile broadband   | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -                       | 9.167.555.205 | 9.972.634.237 |
|      |                    |                            |                      | Persentase pengguna internet (%)                              | 82,3               |           |                              | Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)                                       |  |   |  |                         |               |               |
|      |                    |                            |                      | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%) | 75,7               |           |                              | Persentase rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan perkapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)        |  |   |  |                         |               |               |
|      |                    |                            |                      |   |                    |           |                              | Persentase rasio harga layanan <i>mobile boardband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB) |  |   |  |                         |               |               |
|      |                    |                            |                      |   |                    |           |                              | Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital  |  |   |  |                         |               |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA  |  |  |   |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|--|---|--|--|---|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                                | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                                      | PROGRAM  | KEGIATAN                                   | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  | Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik           |  |  |   |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 2                     | Pemanfaata<br>n<br>Infrastruktur<br>TIK  | Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB                       |  |  | -   | -                 | -                              |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  | Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi          | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Pelayanan<br>Penanaman<br>Modal | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | -                 | 1.680.000.000                  | 382.856.304 |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 3                     | Fasilitas pendukung transformasi digital | Jumlah peserta pelatihan digital skill (termasuk kawasan prioritas) |  |  | -   | -                 | -                              |             |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL   | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |                                       | INDIKATOR                               | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |   | KABUPATEN/KOTA   |   |   |  |               |                         |                   |
|------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------------|---|--|---|---|--|---------------|-------------------------|-------------------|
|      |  |                            |                                       |   |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |                   |
| 1    | 2  | 3                          |                                       | 4                                       | 5           | 6                  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12            | 13                      | 14                |
|      |  |                            |                                       |   |             |                    |   | untuk menuju ekonomi digital   |   |   |  |               |                         |                   |
|      | JUMLAH PN 5  |                            |                                       |   |             |                    |   |  |   |   |  |               | 1.583.152.641.165       | 1.367.757.511.342 |
| PN 6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | 1                          | Peningkatan kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)       | 55,5        | 1                  | Pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)  | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | -             | 5.726.160.000           | 2.622.290.039     |
|      |  |                            |                                       | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai) | 60,5        |                    |   | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup (perusahaan) | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -             | 1.000.000.000           | 936.453.177       |
|      |  |                            |                                       | Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)     | 84,5        |                    |   | Luas area dengan nilai tinggi yang konservasi dipertahankan secara nasional (juta ha)          |   |   |  |               |                         |                   |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR  | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |   | KABUPATEN/KOTA   |   |  |  |               |                         |                |
|------|--------------------|----------------------------|--|-------------|--------------------|---|--|---|--|--|---------------|-------------------------|----------------|
|      |                    |                            |  |             | KEGIATAN PRIORITAS |   | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN                                      | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |                |
| 1    | 2                  | 3                          | 4  | 5           | 6                  | 7   | 8  | 9   | 10   | 11   | 12            | 13                      | 14             |
|      |                    |                            | Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai) | 65,5        |                    |   | Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun terhadap <i>baseline</i> rerata luas karhutla tahun 2015 s.d. 2019 (persen) |   |  |  |               |                         |                |
|      |                    |                            |  |             |                    |   | Luas kawasan konservasi (juta ha)  | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | -             | 297.450.000             | 279.748.500    |
|      |                    |                            |  |             |                    |   | Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)   |   |  |  |               |                         |                |
|      |                    |                            |  |             |                    |   | Akurasi informasi meteorologi (persen)   |   |  |  |               |                         |                |
|      |                    |                            |  |             | 2                  | Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton)   | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan | Program Pengelolaan Persampahan                    | Pengelolaan Sampah                               | -             | 82.262.839.803          | 11.018.116.570 |
|      |                    |                            |  |             |                    |   | Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut  | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup                             |  |  |               |                         |                |

| N<br>O. | PRIORITAS<br>NASIONAL | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL | INDIKATOR | TARGET<br>2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |                                   |         |  |             |                  |                               |
|---------|-----------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|--|-------------|------------------|-------------------------------|
|         |                       |                                  |           |                | KEGIATAN<br>PRIORITAS |  | INDIKATOR  | PRIORITAS<br>KABUPATEN            | PROGRAM | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN | ANGGARAN<br>2024 | REALISASI<br>ANGGARAN<br>2024 |
| 1       | 2                     | 3                                | 4         | 5              | 6                     | 7  | 8  | 9                                 | 10      | 11   | 12          | 13               | 14                            |
|         |                       |                                  |           |                |                       |  | dari <i>baseline</i> ( <i>persen</i> )   | dan<br>Pengelolaan<br>Persampahan |         |  |             |                  |                               |
|         |                       |                                  |           |                |                       |  | Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta ton)   |                                   |         |  |             |                  |                               |
|         |                       |                                  |           |                |                       |  | Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari ( <i>persen</i> ) |                                   |         |  |             |                  |                               |
|         |                       |                                  |           |                | 3                     | Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)  |                                   |         | Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota | -           | -                |                               |
|         |                       |                                  |           |                |                       |  | Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton)  |                                   |         |  |             |                  |                               |
|         |                       |                                  |           |                |                       |  | Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak   |                                   |         |  |             |                  |                               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  |   | KABUPATEN/KOTA   |  |  |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--|---|--|--|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                | 4         | 5               | 6                     | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |           |                 |                       |  | yang dipulihkan<br>(lokasi)<br><br>Jumlah spesies<br>TSL punah yang<br>ditingkatkan<br>populasinya<br>(jenis) terancam            |  |  |  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |           |                 | 4                     | Penguatan<br>Kelembagaa<br>n dan<br>Penegakan<br>Hukum di<br>Bidang<br>Sumber<br>Daya Alam<br>dan<br>Lingkungan<br>Hidup | Persentase<br>pemegang izin<br>yang taat terhadap<br>peraturan terkait<br>bidang<br>lingkungan hidup<br>dan kehutanan<br>(persen) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Lingkunga<br>n Hidup<br>dan<br>Pengelolaa<br>n Persampah<br>an | Program<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Terhadap<br>Izin<br>Lingkungan<br>dan Izin<br>Perlindunga<br>n dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup (Pplh) | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Terhadap Usaha<br>dan/atau<br>Kegiatan yang<br>Izin Lingkungan<br>dan Izin PPLH<br>Diterbitkan oleh<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | 1.000.000.00<br>0              | 936.453.177 |
|         |                               |                                  |           |                 |                       |  | Jumlah kasus<br>pidana dan<br>perdata<br>lingkungan hidup<br>dan kehutanan<br>yang ditangani<br>(kasus)                           | Peningkata<br>n Kualitas<br>Lingkunga<br>n Hidup<br>dan<br>Pengelolaa<br>n Persampah<br>an | Program<br>Penanganan<br>Pengaduan<br>Lingkungan<br>Hidup  | Penyelesaian<br>Pengaduan<br>Masyarakat di<br>Bidang<br>Perlindungan<br>dan Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup (PPLH)<br>Kabupaten/Kota                                      | -                 | 290.073.475                    | 240.261.610 |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |  |   |  |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|---|---|--|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9  | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       | Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)                                 |   |  | Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota  |  |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       | Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah) | Peningkata<br>n Kualitas<br>Lingkunga<br>n Hidup<br>dan<br>Pengelolaa<br>n<br>Persampah<br>an                             | Program<br>Perencanaan<br>Lingkungan<br>Hidup  | Rencana<br>Perlindungan<br>dan Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup (RPPLH)<br>Kabupaten/Kota | -  | 1.306.200.00<br>0 | 1.279.833.49<br>5              |                   |
|         |                               | 2                                | Peningkatan<br>Ketahanan<br>Bencana dan<br>Iklim | Persentase<br>penurunan<br>potensi<br>kehilangan PDB<br>akibat dampak<br>bencana (%)                | 0,1             | 1                     | Penanggula<br>ngan<br>Bencana   | Rasio investasi<br>PRB terhadap<br>APBN (rasio)   |  |   | -  | -                 | -                              |                   |
|         |                               |                                  |  | Penurunan<br>potensi<br>kehilangan PDB<br>sektor<br>terdampak<br>bahaya iklim<br>(%)                | 1,15            |                       |   | Persentase<br>kelengkapan<br>sistem peringatan<br>dini bencana<br><i>hidrometeorol<br/>ogisdan tektonis<br/>(persen)</i>  | Peningkata<br>n<br>Kondusivit<br>as Wilayah<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Ekonomi | Program<br>Penanggulan<br>gan Bencana   | Pelayanan<br>Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan<br>terhadap<br>Bencana  | -                 | 4.603.202.49<br>1              | 4.880.064.26<br>2 |
|         |                               |                                  |  | Kecepatan<br>penyampaian<br>informasi<br>peringatan dini<br>bencana kepada<br>masyarakat<br>(menit) | 3               | 2                     | Peningkatan<br>Ketahanan<br>Iklim   | Persentase<br>penurunan potensi<br>kehilangan PDB<br>akibat bahaya<br>iklim di sektor<br>kelautan dan<br>pesisir (persen) |  |   | Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Pengendalian<br>Emisi Gas<br>Rumah Kaca,<br>Mitigasi dan | -                 | -                              |                   |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   |   |  |   |  |                   |                                |                   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |                                  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |         |          |  |   |                                |                   |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---|---|---------|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |                                  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                                   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |                                  | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9       | 10       | 11   | 12  | 13                             | 14                |                   |
|         |                               |                                  |                                  |   |                 |                       |   |   |         |          | Adaptasi<br>Perubahan Iklim  |   |                                |                   |                   |
|         |                               |                                  |                                  |   |                 |                       |   |   |         |          | Persentase<br>penurunan potensi<br>kehilangan PDB<br>akibat bahaya<br>iklim di sektor air<br>(persen)          | Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Pengendalian<br>Emisi Gas<br>Rumah Kaca,<br>Mitigasi dan<br>Adaptasi<br>Perubahan Iklim | -                              | -                 |                   |
|         |                               |                                  |                                  |   |                 |                       |   |   |         |          | Persentase<br>penurunan potensi<br>kehilangan PDB<br>akibat bahaya<br>iklim di sektor<br>pertanian (persen)    | Pengendalian<br>dan<br>Penanggulangan<br>Bencana<br>Pertanian<br>Kabupaten/Kota   | -                              | 1.536.213.84<br>0 | 2.150.273.20<br>0 |
|         |                               |                                  |                                  |   |                 |                       |   |   |         |          | Persentase<br>penurunan potensi<br>kehilangan PDB<br>akibat bahaya<br>iklim di sektor<br>kesehatan<br>(persen) | Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Pengendalian<br>Emisi Gas<br>Rumah Kaca,<br>Mitigasi dan<br>Adaptasi<br>Perubahan Iklim | -                              | -                 |                   |
|         |                               | 3                                | Pembanguna<br>n Rendah<br>Karbon | Penurunan emisi<br>GRK terhadap<br>baseline pada<br>sektor energi | 10,15;<br>11,8  | 1                     | Pembangun<br>an Energi<br>Berkelanjuta<br>n | Porsi energi baru<br>terbarukan dalam<br>bauran energi<br>nasional (persen) |         |          | -  | -   | -                              |                   |                   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                                   | KABUPATEN/KOTA  |         |          |  |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|----------|--|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                         | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7                                 | 8   | 9       | 10       | 11   | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  | (%) kumulatif, tahunan  |                 |                       |                                   |   |         |          |  |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)_kumulatif, tahunan  | 37,79; 57,2     |                       |                                   | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)  |         |          |  |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)_kumulatif, tahunan | 6,99; 9,4       |                       |                                   | Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)                                     |         |          |  |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)_kumulatif, tahunan   | 5,24; 2,87      | 2                     | Pemulihan Lahan Berkelanjuta<br>n | Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha) |         |          | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan | -                 | -                              |    |
|         |                               |                                  |  | Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan          | 6,90; 7,30      |                       |                                   | Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)                             |         |          |  |                   |                                |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR                 | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                    | KABUPATEN/KOTA   |   |   |                       |                   |                                |                    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
|         |                               |                                  |  |                           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR          | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM   | KEGIATAN                                  | SUBKEGIAT<br>AN       | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4                         | 5               | 6                     | 7                  | 8  | 9   | 10  | 11                    | 12                | 13                             | 14                 |
|         |                               |                                  |  | (%)_kumulatif,<br>tahunan |                 |                       |                    | Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B (persen) |   |   | Berkelanjutan/L CP2B  |                   |                                |                    |
|         |                               |                                  |  |                           |                 | 3                     | Pengelolaan Limbah |  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Lingkunga<br>n Hidup<br>dan<br>Pengelolaa<br>n<br>Persampah<br>an | Program<br>Pengelolaan<br>Persampaha<br>n | Pengelolaan<br>Sampah | -                 | 82.262.839.8<br>03             | 11.018.116.5<br>70 |
|         |                               |                                  |  |                           |                 |                       |                    |  |   |   |                       |                   |                                |                    |
|         |                               |                                  |  |                           |                 |                       |                    |  |   |   |                       |                   |                                |                    |
|         |                               |                                  |  |                           |                 |                       |                    |  |   |   |                       |                   |                                |                    |
|         |                               |                                  |  |                           |                 |                       |                    |  |   |   |                       |                   |                                |                    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA   |         |          |  |  |                                |                    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|---------|----------|--|--|--------------------------------|--------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                               | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024  | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7                                       | 8  | 9       | 10       | 11   | 12   | 13                             | 14                 |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 4                     | Pengemban<br>gan Industri<br>Hijau      | Perusahaan<br>industri menengah<br>besar yang<br>tersertifikasi<br>Standar Industri<br>Hijau (SIH)<br>(persen) |         |          | Penerbitan Izin<br>Usaha Industri<br>(IUI), Izin<br>Perluasan Usaha<br>Industri (IPUI),<br>Izin Usaha<br>Kawasan<br>Industri (IUKI)<br>dan Izin<br>Perluasan<br>Kawasan<br>Industri (IPKI)<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Fasilitasi<br>Pemenuhan<br>Komitmen<br>Perolehan IUI,<br>IPUI, IUKI dan<br>IPKI<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kot<br>a dalam<br>Sistem<br>Informasi<br>Industri<br>Nasional<br>(SIINas) yang<br>Terintegrasi<br>dengan Sistem<br>Pelayanan<br>Perizinan<br>Berusaha<br>Terintegrasi<br>Secara<br>Elektronik | 200.000.000                    | 880.786.450        |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 5                     | Rendah<br>Karbon<br>Pesisir dan<br>Laut | Jumlah luas<br>rehabilitasi hutan<br>mangrove (ha)   |         |          | -  | -  | -                              |                    |
|         | JUMLAH PN 6                   |                                  |  |           |                 |                       |   |  |         |          |  |  | 262.747.819.<br>215            | 47.260.513.6<br>20 |

| N<br>O. | PRIORITAS<br>NASIONAL   | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL | INDIKATOR                                     | TARGET<br>2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                                       |   | KABUPATEN/KOTA  |  |   |             |                  |                               |
|---------|---|----------------------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|-------------|------------------|-------------------------------|
|         |   |                                  |   |                | KEGIATAN<br>PRIORITAS |                                       | INDIKATOR   | PRIORITAS<br>KABUPATEN  | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN | ANGGARAN<br>2024 | REALISASI<br>ANGGARAN<br>2024 |
| 1       | 2   | 3                                | 4   | 5              | 6                     | 7                                     | 8   | 9   | 10   | 11  | 12          | 13               | 14                            |
| PN<br>7 | Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik | 1<br>Konsolidasi Demokrasi       | IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai) | 83,71          | 1                     | Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi | Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan) | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | -           | 104.567.805.000  | 104.201.596.621               |
|         |   |                                  | IDI Aspek Kebebasan (nilai)                   | 72,53          | 2                     | Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan    | Skor IDI Variabel Kebebasan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)                   | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta                | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi  | -           | 104.567.805.000  | 104.201.596.621               |
|         |   |                                  | IDI Aspek Kesetaraan (nilai)                  | 81,94          |                       |                                       | Skor IDI Variabel Kesetaraan (Angka target merupakan dengan Intervensi                                      |   |  |   |             |                  |                               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA                 |  |   |                 |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|---|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7  | 8                              | 9  | 10  | 11              | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |  |  | 11              |                       | Kebijakan)<br>Proyeksi                               |                                | Budaya<br>Politik  | Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemili<br>han Umum<br>Kepala Daerah,<br>serta<br>Pemantauan<br>Situasi Politik |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Indeks<br>Kerawanan<br>Pemilu  |                 |                       |  |                                |  |   |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Jumlah<br>Regulasi/Kebija<br>k an Tata Kelola<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik di Pusat<br>dan Daerah yang<br>Terintegrasi<br>Sesuai Asas-asas<br>Keterbukaan<br>Informasi Publik<br>(dokumen) |                 |                       | Persentase<br>Keterwakilan<br>Perempuan di<br>DPR RI |                                |  | -   | -               | -                 |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Persentase<br>Keterwakilan<br>Perempuan di<br>DPRD Provinsi  |                 |                       |  |                                | Pemberdayaan<br>Perempuan<br>Bidang Politik,<br>Hukum, Sosial,<br>dan Ekonomi<br>pada Organisasi<br>Kemasyarakatan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Advokasi<br>Kebijakan dan<br>Pendampingan<br>Peningkatan<br>Partisipasi<br>Perempuan dan<br>Politik,<br>Hukum, Sosial<br>dan Ekonomi                                  | 103.400.000     |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |  | Persentase<br>Keterwakilan<br>Perempuan di<br>DPRD<br>Kabupaten/ Kota  |                 |                       |  |                                | Pemberdayaan<br>Perempuan<br>Bidang Politik,<br>Hukum, Sosial,<br>dan Ekonomi<br>pada Organisasi<br>Kemasyarakatan<br>Kewenangan                   | Advokasi<br>Kebijakan dan<br>Pendampingan<br>Peningkatan<br>Partisipasi<br>Perempuan dan<br>Politik,  | 103.400.000     |                   |                                |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR  | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |  |  |  |                              |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---|---|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |  |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024            | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4  | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9  | 10   | 11   | 12                           | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   |   |  |  |  | Hukum, Sosial<br>dan Ekonomi |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |  |                 | 3                     | Peningkatan<br>Kualitas<br>Komunikasi<br>Publik                               | Persentase (%)<br>kepuasan<br>masyarakat<br>terhadap<br>informasi publik<br>terkait Kebijakan<br>dan Program<br>Prioritas<br>Pemerintah | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>dan<br>Komunikasi<br>Publik | Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                            | 9.167.555.20<br>5              | 9.972.634.23<br>7 |
|         |                               |                                  |  |  |                 |                       |   | Persentase (%)<br>konten informasi<br>publik yang<br>berkualitas  |  |  |  |                              |                                |                   |
|         |                               |                                  |  | Jumlah SDM<br>Bidang<br>Komunikasi dan<br>Informati ka yang<br>kompeten dan<br>profesional                 |                 |                       |   |   |  |  |  |                              |                                |                   |
|         |                               | 2                                | Optimalisasi<br>Kebijakan<br>Luar Negeri | Jumlah Forum<br>yang Dipimpin<br>oleh Indonesia<br>pada Tingkat<br>Regional dan<br>Multilateral<br>(forum) | 16              | 1                     | Penguatan<br>Integritas<br>NKRI dan<br>Perlindunga<br>n WNI di<br>Luar Negeri | Indeks Kemajuan<br>Perundingan<br>Penyelesaian<br>Perbatasan<br>Maritim   |  |  | -  | -                            | -                              |                   |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |                                | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |         |          |                 |                   |                                |    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---|---|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|
|         |                               |                                  |                                |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |    |
| 1       | 2                             | 3                                |                                | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9       | 10       | 11              | 12                | 13                             | 14 |
|         |                               |                                  |                                | Indeks Citra<br>Indonesia di<br>Dunia<br>Internasional<br>(nilai)       | 4               |                       |   | Indeks Pelayanan<br>dan Perlindungan<br>WNI dan BHI   |         |          |                 |                   |                                |    |
|         |                               |                                  |                                | Indeks<br>Pelayanan dan<br>Pelindungan<br>WNI di Luar<br>Negeri (nilai) | 92              | 2                     | Penguatan<br>Kerjasama<br>Pembangun<br>an<br>Internasiona<br>l            | Jumlah<br>Program/Kegiatan<br>Kerjasama<br>Selatan- Selatan<br>Triangular                       |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |                               |                                  |                                |   |                 | 3                     | Peningkatan<br>Citra Positif<br>di Dunia<br>Internasiona<br>l             | Indeks citra<br>Indonesia di dunia<br>internasional   |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |                               |                                  |                                |   |                 | 4                     | Peningkatan<br>Peran<br>Indonesia di<br>tingkat<br>Regional<br>dan Global | Jumlah forum<br>yang dipimpin<br>oleh Indonesia<br>pada tingkat<br>regional dan<br>multilateral |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |                               | 3                                | Penegakan<br>Hukum<br>Nasional | Indeks Perilaku<br>Anti Korupsi<br>(nilai)                              | 4,14            | 1                     | Penataan<br>Regulasi  | Persentase<br><i>judicial review</i><br>yang dikabulkan<br>MK dan MA                            |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |                               |                                  |                                |   |                 | 2                     | Perbaikan<br>Sistem<br>Hukum<br>Pidana dan<br>Perdata                     | Peringkat EoDB<br>Indonesia untuk<br>aspek enforcing<br>contracts<br>Peringkat                  |         |          | -               | -                 | -                              |    |
|         |                               |                                  |                                |   |                 |                       |   | EoDB Indonesia<br>untuk aspek   |         |          |                 |                   |                                |    |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR   | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   | KABUPATEN/KOTA  |  |                                   |   |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |   |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR   | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM  | KEGIATAN                          | SUBKEGIAT<br>AN                               | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4   | 5               | 6                     | 7   | 8   | 9  | 10                                | 11  | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   | resolving<br>insolvency   |  |                                   |   |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   | Peringkat EoDB<br>Indonesia untuk<br>aspek getting<br>credits                         |  |                                   |   |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   | Persentase Pelaku<br>Residivis  |  |                                   |   |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |   |                 | 3                     | Penguatan<br>Sistem Anti<br>Korupsi               | IPAK  |  |                                   | -   | -                 | -                              |                   |
|         |                               |                                  |  |   |                 | 4                     | Peningkatan<br>Akses<br>terhadap<br>Keadilan      | Indeks Akses<br>terhadap keadilan   |  |                                   | -   | -                 | -                              |                   |
|         |                               | 4                                | Reformasi<br>Birokrasi<br>dan Tata<br>Kelola | Indeks<br>Pelayanan<br>Publik (nilai)<br>(Kementerian/L<br>embaga;<br>Provinsi; | 4,2; 4;<br>3,80 | 1                     | Penguatan<br>Implementa<br>si<br>Manajemen<br>ASN | Persentase<br>Kementerian<br>dengan Indeks<br>Sistem Merit<br>Kategori Baik<br>Keatas | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Kepegawaia<br>n Daerah | Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur | -                 | 1.156.522.00<br>0              | 1.459.157.50<br>0 |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   | Persentase LPNK<br>dengan Indeks<br>Sistem Merit<br>Kategori Baik<br>Keatas           |  |                                   |   |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |   |                 |                       |   | Persentase<br>Provinsi dengan<br>Indeks Sistem<br>Merit Kategori<br>Baik Keatas       |  |                                   |   |                   |                                |                   |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |                                      | KABUPATEN/KOTA  |  |   |  |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR                            | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN  | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7                                    | 8   | 9  | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                                      | Persentase<br>Kabupaten/ Kota<br>dengan Indeks<br>Sistem Merit<br>Kategori Baik<br>Keatas |  |   |  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 2                     | Transformas<br>i pelayanan<br>publik |   | Peningkata<br>n<br>Infrastrukturu<br>r dan<br>Konektivitas<br>Antarwilayah | Program<br>Penyelenggaran<br>Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan<br>Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota      | -                 |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                                      |   | Peningkata<br>n<br>Infrastrukturu<br>r dan<br>Konektivitas<br>Antarwilayah | Program<br>Penyelenggaran<br>Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan<br>Jalan (LLAJ) | Persetujuan<br>Hasil Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas<br>(Andalalin)<br>untuk Jalan<br>Kabupaten/Kota | -                 | 75.000.000                     | 23.600.000  |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |                                      |   | Peningkata<br>n<br>Infrastrukturu<br>r dan<br>Konektivitas<br>Antarwilayah | Program<br>Penyelenggaran<br>Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan<br>Jalan (LLAJ) | Audit dan<br>Inspeksi<br>Keselamatan<br>LLAJ di Jalan  | -                 | 50.000.000                     | 174.202.000 |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |  |   |  |                   |                                |                    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|--|--|--|---|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                    |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14                 |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 3                     | Penataan<br>Kelembagaa<br>n dan proses<br>bisnis | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah Pusat<br>(Kementerian<br>/Lembaga) dengan<br>Indeks Maturitas<br>SPBE Baik Keatas | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Pengelolaan<br>Aplikasi<br>Informatika | Pengelolaan e-<br>government Di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                 | 12.868.783.0<br>00             | 20.681.072.2<br>57 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah<br>Daerah (Provinsi)<br>dengan Indeks<br>Maturitas SPBE<br>Baik Keatas            |  |   |  |                   |                                |                    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah<br>Daerah<br>(Kabupaten/ Kota)<br>dengan Indeks<br>Maturitas SPBE<br>Baik Keatas  |  |   |  |                   |                                |                    |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 4                     | Reformasi<br>Sitem<br>Akuntabilita<br>s Kinerja  | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(Kementerian/Le<br>mbaga) yang<br>mendapatkan<br>Opini WTP Pusat               |  |   | -  | -                 | -                              |                    |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah<br>Provinsi yang  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan                        | Program<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah      | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan                          | -                 | 315.000.000                    | 646.434.750        |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |           | KABUPATEN/KOTA   |  |   |   |                   |                                |             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|---|---|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN   | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN   | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |             |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7         | 8  | 9  | 10  | 11  | 12                | 13                             | 14          |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | mendapatkan<br>Opini WTP   | Pelayanan<br>Publik  |   | Keuangan<br>Daerah  |                   |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah<br>Kabupaten yang<br>mendapatkan<br>Opini WTP                             | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah                                    | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan<br>Keuangan<br>Daerah | -                 | 315.000.000                    | 646.434.750 |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah Kota<br>yang<br>mendapatkan<br>Opini WTP                                  |  |   | -   | -                 | -                              |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah Pusat<br>(Kementerian<br>/Lembaga) dengan<br>Skor B Ke atas<br>Atas SAKIP | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota | Penataan<br>Organisasi  | -                 |                                |             |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |           | Persentase<br>Instansi<br>Pemerintah<br>Daerah (Provinsi)<br>dengan Skor B Ke<br>atas Atas SAKIP               | Peningkata<br>n Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintah<br>an dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota | Penataan<br>Organisasi  | -                 |                                |             |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL   |   | INDIKATOR                            | TARGET 2024                     | PERATURAN PRESIDEN                    |                     | KABUPATEN/KOTA   |  |   |  |  |                         |               |               |
|------|--------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|---|--|--|-------------------------|---------------|---------------|
|      |                    |  |   |                                      |                                 | KEGIATAN PRIORITAS                    | INDIKATOR           | PRIORITAS KABUPATEN  | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | ANGGARAN 2024  | REALISASI ANGGARAN 2024 |               |               |
| 1    | 2                  | 3  |   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                   | 8  | 9  | 10  | 11   | 12   | 13                      | 14            |               |
|      |                    |  |   |                                      |                                 |                                       |                     | Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Penataan Organisasi  | -  |                         |               |               |
|      |                    |  | 5 | Menjaga stabilitas keamanan nasional | Indeks Kekuatan Militer (nilai) | 0,21                                  | 1                   | Penguatan Keamanan Dalam Negeri  | Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)                                   | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | -                       | 1.958.800.000 | 2.149.045.731 |
|      |                    | Indeks Terorisme Global (nilai)  |   |                                      | 4,29                            | Indeks Risiko Terorisme (Target)      |                     |  |  |   |  |  |                         |               |               |
|      |                    | Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) |   |                                      | >60                             | Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara |                     |  |  |   |  |  |                         |               |               |
|      |                    | Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)                                  |   |                                      | 3,3                             |                                       |                     |  | Angka Kejadian Konflik   |   |  |  |                         |               |               |
|      |                    |  |   |                                      |                                 |                                       |                     |  | Angka Korban Pengungsi Internal                                    |   |  |  |                         |               |               |
|      |                    |  |   |                                      |                                 | 2                                     | Penguatan Kemampuan | Pemenuhan MEF  |  |   |  | -  | -                       | -             |               |

| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |  | KABUPATEN/KOTA   |  |   |  |                   |                                |                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------------|--|--|--|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                               |                                  |  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS | INDIKATOR  | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN                                       | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIAT<br>AN  | ANGGARA<br>N 2024 | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |                   |
| 1       | 2                             | 3                                |  | 4         | 5               | 6                     | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12                | 13                             | 14                |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       | Pertahanan<br>dibarengi<br>Confidence<br>Building<br>Measures<br>(CBM) | Persentase<br>Kontribusi<br>Industri<br>Pertahanan                   |  |   |  |                   |                                |                   |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 3                     | Penguatan<br>Keamanan<br>Laut  | Angka<br>Pelanggaran<br>Hukum dan<br>Gangguan<br>Keamanan di<br>Laut |  |   | -  | -                 | -                              |                   |
|         |                               |                                  |  |           |                 | 4                     | Penguatan<br>Keamanan<br>dan<br>Ketertiban<br>Masyarakat               | Angka Prevalensi<br>Penyalahguna<br>Narkotika                        | Peningkata<br>n<br>Kondusivit<br>as Wilayah<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Ekonomi | Program<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengembang<br>an<br>Ketahanan<br>Ekonomi,<br>Sosial, dan<br>Budaya   | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya        | -                 | 720.000.000                    |                   |
|         |                               |                                  |  |           |                 |                       |  | Crime Rate   | Peningkata<br>n<br>Kondusivit<br>as Wilayah<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Ekonomi | Program<br>Peningkatan<br>Kewaspadaa<br>n Nasional<br>dan<br>Peningkatan<br>Kualitas dan<br>Fasilitasi<br>Penanganan<br>Konflik<br>Sosial | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pelaksanaan<br>Pemantapan<br>Kewaspadaan<br>Nasional dan<br>Penanganan<br>Konflik Sosial | -                 | 1.958.800.00<br>0              | 2.149.045.73<br>1 |

| N O. | PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL |  | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERATURAN PRESIDEN |  | KABUPATEN/KOTA                    |   |  |   |               |                         |                 |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|---------------|-------------------------|-----------------|
|      |                    |                            |  |           |             | KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR                              | PRIORITAS KABUPATEN               | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | ANGGARAN 2024 | REALISASI ANGGARAN 2024 |                 |
| 1    | 2                  | 3                          |  | 4         | 5           | 6                  | 7                                      | 8                                 | 9   | 10   | 11  | 12            | 13                      | 14              |
|      |                    |                            |  |           |             |                    |  | Pelayanan Publik Polri yang Prima | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | -             | 104.567.805.000         | 104.201.596.621 |
|      |                    |                            |  |           |             | 5                  | Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber | Skor Global Cyber Security Index  | Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | -             | 1.958.800.000           | 2.149.045.731   |



| N<br>O. | PRIORITA<br>S<br>NASIONA<br>L | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NASIONAL | INDIKATOR | TARGE<br>T 2024 | PERATURAN PRESIDEN    |   |           | KABUPATEN/KOTA                 |         |          |                 |                     |                                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
|         |                               |                                  |           |                 | KEGIATAN<br>PRIORITAS |   | INDIKATOR | PRIORIT<br>AS<br>KABUPA<br>TEN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIAT<br>AN | ANGGARA<br>N 2024   | REALISASI<br>ANGGARA<br>N 2024 |
| 1       | 2                             | 3                                | 4         | 5               | 6                     | 7 | 8         | 9                              | 10      | 11       | 12              | 13                  | 14                             |
|         | JUMLAH PN 7                   |                                  |           |                 |                       |   |           |                                |         |          |                 | 356.264.075.<br>205 | 352.655.462.<br>550            |

### 3.5.2. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

Berdasarkan arah kebijakan yang diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 prioritas pembangunan daerah Jawa Barat untuk tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis Jawa Barat, antara lain: kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar, serta reformasi birokrasi dan inovasi daerah. Adapun program prioritas pembangunan Jawa Barat untuk tahun 2024, yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata;
- 2) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama;
- 3) Penguatan sistem kesehatan daerah;
- 4) Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana;
- 5) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa; dan
- 6) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Di samping itu, kegiatan di tahun 2024 juga diarahkan pada penormalan ekonomi; operasi, pemeliharaan, optimalisasi, rehabilitasi proyek strategis; keberlanjutan Program Jabar Juara; pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM); reformasi birokrasi; serta penyelesaian program strategis.



**BAB IV**

**FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

**4.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Tingkat capaian penyerapan APBD Kabupaten Bekasi dan Capaian kinerja program dan kegiatan sampai Triwulan IV tahun 2024, secara umum di pengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut :

**A. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Arah kebijakan nasional dan regional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta dukungan ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program yang relevan di daerah;
2. Arah kebijakan nasional dan regional provinsi yang mendukung prioritas peningkatan kompetensi SDM aparatur penyelenggaran pembangunan;
3. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik teknis (proses) maupun administratif (dokumen perencanaan);
4. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai Arah dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, Dukungan dari staf dan bawahan, Perencanaan kerja yang telah dipersiapkan, Dukungan anggaran yang tersedia, Dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalannya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
6. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
7. Sudah terbangun mekanisme koordinasi dan komunikasi antar PD maupun dengan institusi pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, faktor pendorong capaian kinerja yang dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi, antara lain:



## 1. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Dukungan yang baik dari pimpinan serta saling koordinasi dan kolarbosasi dalam proses pelaksanaan kegiatan;
- 2) Struktur dan pengembangan kompetensi personil dan kapasitas SDM yang menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan persampahan di Kabupaten Bekasi;
- 3) Pendanaan dan alokasi anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan persampahan;
- 4) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana aksi kegiatan;
- 5) Mulai masifnya pemantauan kualitas air dan udara didukung dengan pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air dan Udara yang didukung dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem online;
- 6) Terlaksananya KLHS pada dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang;
- 7) Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang sesuai dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku;
- 9) Terlaksananya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 10) Terlaksananya dokumen Rencana Aksi melalui kajian bidang pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disusun;
- 11) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai;
- 12) Terlaksananya penyusunan kajian identifikasi kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati; dan
- 13) Adanya Forum Group Discussion Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca untuk mengevaluasi hasil inventarisasi tahun sebelumnya dan meningkatkan koordinasi antar PD sehingga data yang diperoleh sesuai.

## 2. Dinas Pemadam Kebakaran

- 1) Adanya usulan dari masyarakat melalui Musrembang untuk peningkatan kegiatan penyuluhan di setiap kecamatan, desa/kelurahan;



- 2) Adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulan dini bahaya kebakaran;
- 3) Adanya peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi tentang proteksi kebakaran terhadap bangunan dan gedung;
- 4) Adanya peningkatan kapasitas sumber daya melalui lembaga-lembaga pelatihan secara rutin, agar kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat (*rescue*) terus meningkat; dan
- 5) Adanya aparatur pemadam kebakaran yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas untuk melayani masyarakat.

### **3. Dinas Perikanan**

- 1) Peningkatan kualitas SDM Perikanan, dengan dilakukannya pelatihan untuk para pembudidaya ikan kecil, nelayan dan unit pengolah ikan; dan
- 2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi perikanan Kabupaten Bekasi.

### **4. Dinas Pertanian**

- 1) Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yaitu meningkatnya potensi warga kabupaten bekasi untuk memiliki hewan peliharaan sehingga meningkatnya kebutuhan obat hewan;
- 2) Ada beberapa komoditas hortikultura yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Komoditas yang mengalami kenaikan produksi antara lain adalah Bawang merah, Bayam, kangkung, tomat, cabe keriting, cabe TW, Jamur tiram, Jambu air, lengkuas. Sedangkan yang mengalami penurunan produksi antara lain adalah : Kencur, Jahe, Caisim, Cabe rawit, Jamur merang, Jambu biji, Mangga, Pisang dan Pepaya. Penyebab produksi mengalami penurunan antara lain berasal dari faktor eksternal, yaitu faktor alam yang sangat panas/cuaca ekstrem atau El Nino yang sangat berdampak terhadap tanaman hortikultura tersebut;
- 3) Keberhasilan tersedianya dukungan anggaran dan sarana budidaya produksi tanaman pangan;
- 4) Semakin meningkatnya populasi ternak dan bertambahnya usaha budidaya ternak;
- 5) Dukungan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi;
- 6) Jumlah anggaran yang mencukupi untuk mengakomodir semua usulan musrembang dan pokpir;



- 7) Sarana prasarana yang mendukung pelayanan inseminasi buatan (Plastiksheet, plastik gloves, straw, N2 cair);
- 8) Anggaran, sarana prasana yang tersedia;
- 9) Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memberikan anggaran APBD dan DID yang digunakan untuk belanja bahan kimia dan pupuk dan pompa 3 inch;
- 10) Dukungan dari Pemerintah pusat yang memberikan Bantuan benih padi sebanyak 294.038 kg . Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang digunakan untuk Belanja benih, handsprayer dan pompa (3,4, dan 6 inch) untuk wilayah yang terdampak bencana kekeringan;
- 11) Tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang membantu petani secara langsung di lapangan yaitu Petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) yang terdapat di Setiap Kecamatan;
- 12) Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yaitu meningkatnya potensi warga kabupaten bekasi untuk memiliki hewan peliharaan sehingga jumlah dokter hewan praktek meningkat;
- 13) Tersedianya Programa Penyuluhan Pertanian, rencana kerja tahunan dan terlaksananya kunjungan lapangan;
- 14) Komitmen petani dalam mendukung kelembagaan, fungsi kelembagaan  
sudah berjalan, adanya dukungan dari Instansi terkait; dan
- 15) Lahan demplot, petani pelaksana kegiatan, penyuluh pertanian pendamping kegiatan.

## **5. Dinas Sosial**

- 1) Komitmen Pemangku Kepentingan  
Keterlibatan dan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan, termasuk pimpinan organisasi, masyarakat, dan mitra kerja, dapat menjadi pendorong utama untuk kesuksesan evaluasi.
- 2) Partisipasi Aktif Masyarakat  
Partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi dapat memberikan wawasan dan perspektif yang lebih luas terhadap dampak program sosial.
- 3) Pemahaman yang Jelas Terhadap Renja



Pemahaman yang jelas terhadap Renja dan tujuan program oleh seluruh pihak terlibat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi.

4) Ketepatan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang tepat dan terukur dapat menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan Renja.

5) Fleksibilitas Terhadap Perubahan

Organisasi yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dapat merespon temuan evaluasi dengan cepat dan efektif.

6) Ketepatan Waktu Pelaporan

Pengumpulan dan pelaporan data evaluasi yang tepat waktu dapat memberikan informasi yang aktual untuk mendukung pengambilan keputusan.

**6. Dinas Kesehatan**

- 1) Pemanfaatan Posyandu secara optimal diseluruh wilayah Puskesmas, adanya jaminan persalinan yang berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan Ibu Hamil saat melahirkan, pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk lansia, masyarakat yang dimudahkan untuk mengaksesfasilitas kesehatan serta peran aktif petugas kesehatan dalam pemanfaatan Posyandu;
- 2) Membuat regulasi kebijakan daerah untuk upaya penurunan AKI. Peningkatan Skrining Jejaring Layak Hamil, kelas ibu hamil, P4K, Desa Siagauntuk semua Fasyankes. Pembinaan dari Puskesmas untuk seluruh SPKS yang ada di wilayah kerja;
- 3) Membuat regulasi kebijakan daerah untuk upaya penurunan AKB. Updating Pelatihan Resusitasi Neonatus untuk seluruh Nakes ASN dan Non ASN yang berkolaborasi dengan Organisasi Profesi. Pembinaan TPMB yang menyumbang kematian pada wilayah kerja Puskesmas masing-masing; dan
- 4) Tenaga kesehatan yang sudah terampil melakukan skrining Kesehatan.

**7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat yang disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bekasi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan masukan dari Musrenbang Desa, Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-PD) dan Musrenbang Kabupaten.

**8. Dinas Perhubungan**

- 1) Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
- 2) Optimalisasi Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Bekasi melalui pembagian tugas yang jelas;
- 3) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak kedua/dinas/instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dengan maksud untuk mengetahui sedini mungkin kendala dan hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaannya; dan
- 5) Mengalokasikan dana khusus APBD untuk kegiatan team teknis administrasi pengadaan barang/jasa, dengan maksud agar petugas kesekretariatan, khususnya tenaga teknis administrasi pengadaan barang/jasa dapat membantu sepenuhnya kelancaran administrasi dan kegiatan team/panitia barang/jasa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

**9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**

- 1) Terpenuhinya fasilitas, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
  - a. Tersedianya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi; dan
  - b. Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep.331-DISPERKIMTAN/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana TA 2024.
- 2) Meningkatnya Ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman dan Perumahan dalam kondisi baik





- a. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi; dan
  - b. Terdapat Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.522-Disperkimtan/2024, tanggal 31 Juli 2024, tentang Penetapan Calon Penerima Calon Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.
- 3) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan jalan
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi;
  - b. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 050 / SE-81 /Disperkimtan Tanggal 20 Oktober 2021 tentang Petunjuk teknis pengajuan usulan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - c. Tahap KUA-PPAS dianggarkan sebesar 57.300.000.000,- dengan lokasi : Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Marunda dan sekitar overpass Perlintasan Jalan tol Cibitung - Cilincing di Desa Segara Makmur dan Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi III; Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Tegaldanas – Cibeber Tahap V; Pengadaan tanah untuk Fly Over Lemah Abang Tahap V; Pengadaan tanah untuk pengendalian Banjir Kali Bekasi Tahap III; dan
  - d. Serah terima Jalan Lingkungan dari Pengembang seluas 85.440 M2.
- 4) Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Ketersediaan sanitasi
- a. Dokumen Review SSK dan Sanitasi Kabupaten Bekasi Tahun 2022;
  - b. Kebijakan berupa SK Bupati Nomor HK.02.02/Kep.452-BAPPEDA/2022; tentang Desa /Kelurahan Prioritas Penanganan Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bekasi Tahun 2024; dan
  - c. Laporan Capaian Sanitasi dilakukan pada aplikasi SI-STBM.
- 5) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
- a. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi;
  - b. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 050 / SE-81 / Disperkimtan Tanggal 20 Oktober 2021 tentang Petunjuk teknis pengajuan usulan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;



- c. Usulan permohonan lokasi pembebasan lahan dari instansi terkait sudah lengkap yaitu Perluasan TPA Burangkeng (21.998 M2);
  - d. Usulan permohonan lokasi lahan dari instansi terkait sudah lengkap yaitu Pengadaan Tanah Untuk Penanganan Konstruksi Permanen Tanggul Sungai Citarum Hilir Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin (4.065 M2);
  - e. serah Terima Lahan TPU dari Pengembang seluas 90.179 M2; dan
  - f. Serah Terima Fasos - Fasum ( 11 Pengembang) seluas 181.162 M2.
- 6) Meningkatnya luasan Kawasan kumuh yang tertangani
- a. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat dan Berkah);
  - b. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 663/Kep.508-Disperkimtan/2020 tentang Penetapan LokasiKawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasin TA 2020;
  - c. Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh di Kabupaten Bekasi Nomor PU.03.02/2949/Disperkimtan/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022; dan
  - d. Dokumen RP2KPKPK Tahun 2024.

## **10. Dinas Pendidikan**

- 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar unIersal bermutu dan kesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota melalui:
- a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar yang bermutu antar propinsi, kabupaten dan kota yang meliputi penyediaan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
  - b. perluasan pemerataan akses SD/SDLB darn SMP/SMPLB bermutu dan kesetaraan gender di semua propinsi, kabupaten dan kota;
  - c. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A dan Paket B bemutu dan kesetaraan gender di semua propinsi, kabupaten dan kota; dan
  - d. penyediaan model pembelajaran, data dan infomasi berbasisiset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar.



- 2) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan menengah bermutu, kesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua propinsi, kabupaten dan kota melalui:
  - a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan menengah bermutu yang meliputi penyediaan tenaga kependidikan paket.;
  - b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten dan kota; dan
  - c. ketersediaan model kurikulum dan pembelajaran data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan kesetaraan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan kesetaraan menengah.
- 3) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui:
  - a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota;
  - b. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota; dan
  - c. Penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar nasional pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan.

#### **11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas pelayanan pengaduan Korban Perempuan dan Anak;
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana fasilitas untuk pembelajaran SEKOCI di lokasi P2WKSS;
- 3) Memfasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;
- 4) Meningkatkan sistem aplikasi data terpadu mengenai Laporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak;



- 5) Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lintas Sektor terkait Penyusunan ARG; dan
- 6) Sudah Tersedianya Rumah Aman.

## **12. DPMPTSP**

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Memberdayakan seluruh staf dan pelaksana kegiatan melalui pembagian tugas kepada masing-masing staf dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk diantisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang;
- 4) Meningkatkan Investasi melalui promosi investasi;
- 5) Meningkatkan pelayanan melalui sistem aplikasi;
- 6) Sosialisasi Pelayanan Perizinan melalui media elektronik;
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kinerja pada Tahun 2024.

## **13. Satpol PP**

- 1) Standar Operasi Prosedur yang Jelas;
- 2) Pengawasan oleh PPK dan PPTK terhadap pelaksanaan subkegiatan tetap on schedule dan capaian pelaksanaan subkegiatan dapat dimaksimalkan;
- 3) Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM; dan
- 4) Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait.

## **14. Dinas Perdagangan**

- 1) Pembinaan terhadap pelaku UMKM terutama dari aspek kualitas sehingga dapat memiliki standar produk yang berorientasi ekspor;
- 2) Meningkatkan promosi dan pameran produk-produk UMKM yang berorientasi ekspor;
- 3) Melaksanakan kerjasama serta koordinasi dengan instansi lain seperti Kementrian, Pemerintah Provinsi, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam upaya peningkatan ekspor, baik jumlah ataupun negara tujuan ekspor;
- 4) Peningkatan pelayanan SKA bagi para pelaku ekspor;



- 5) Peningkatan SDM Dinas Perdagangan dengan cara mengikuti BIMTEK, Workshop, Seminar dan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina/pusat maupun Provinsi;
- 6) Terkendalinya stok dan harga barang pokok dan penting; dan
- 7) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan Kementrian, Pemerintah Pusat dan BUMN dalam rangka Pengendalian Stok dan Harga Komoditas tertentu

**15. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1) Komitmen Pimpinan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan;
- 2) Fasilitasi usulan penelitian dan pengembangan Badan sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi Mitra Kerja Balitbangda; dan
- 3) Fasilitasi penjangkaran inovasi daerah, difusi inovasi daerah dan publikasi inovasi daerah dengan pendampingan dan kerjasama dalam pengembangan inovasi daerah.

**16. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

- 1) Forum Penataan Ruang Kab.Bekasi berjalan dengan baik dengan melakukan analisis komprehensif terhadap permohonan Persetujuan KKPR sehingga permohonan PKKPR yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Regulasi Sektoral dapat diminimalisir;
- 2) Help Desk Perizinan Pemanfaatan Ruang berjalan dengan baik sehingga dapat membantu masyarakat dalam proses permohonan perizinan;
- 3) Proses perizinan berbasis online/OSS RBA menjadikan proses perizinan transparan; dan
- 4) Pelaku usaha sudah banyak yang memahami RTRW Kabupaten Bekasi.

**17. Dinas Arsip dan Perpustakaan**

- A. Urusan Perpustakaan
  - 1. Adanya program literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbagai program dan kegiatan masyarakat dalam berkegiatan dan belajar di perpustakaan telah ditingkatkan dengan mengedepankan aspek kebermanfaatan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sehingga melalui program tersebut perpustakaan dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, pendidikan, maupun bidang lain seperti tingkat kesehatan masyarakat melalui literasi informasi kesehatan;



- 2. Tingginya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah turut diimbangi oleh perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bersifat swadaya masyarakat sehingga 21 variabel peningkatan kunjungan semakin meningkat karena melalui beberapa program yang dilaksanakan dengan memperlihatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- B. Urusan Kearsipan
  - 1. Adanya regulasi daerah di Bidang Kearsipan;
  - 2. Adanya sarana penyimpanan arsip depo arsip / *record center* membuat pengelolaan arsip statis menjadi lebih intensif dan kondusif;
  - 3. Adanya program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinamis kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Intensif dalam Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah.

**18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
- 2) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Managemen Talenta Pegawai Negeri Sipil belum optimalnya Sistem penilaian kinerja;
- 3) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pola Karier PNS;
- 4) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 5) Tersedianya aplikasi kepegawaian yaitu Bekasi Integrated System Manajemen ASN (BISMA) dan Sistem Informasi Karyawan (SIKAWAN).

**19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 1) Sudah mulai terbentuknya forum-forum penanggulangan bencana yang membantu kinerja BPBD;
- 2) Sarana prasarana penanggulangan bencana relatif memadai; dan
- 3) Supporting penganggaran yang baik.



**20. Sekretariat DPRD**

- 1) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; dan
- 2) Penempatan SDM yang memadai dan proporsional serta professional.

**21. Kecamatan Babelan**

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Partisipasi dan keterlibatan serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program, kegiatan cukup baik; dan
- 3) Tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**22. Kecamatan Cikarang Barat**

- 1) Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas;
- 2) Pimpinan memiliki komitmen dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- 3) Adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari internal perangkat daerah;
- 4) Adanya koordinasi yang baik dari pimpinan daerah dan perangkat daerah terkait.

**23. Kecamatan Sukawangi**

- 1) Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas;
- 2) Komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja perangkat daerah;
- 3) Adanya koordinasi yang baik dari pimpinan daerah dan perangkat daerah terkait;
- 4) Adanya dukungan yang baik dari seluruh internal perangkat daerah.

**B. Faktor Penghambat :**

1. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Jika ditinjau lebih mendalam, maka kelemahan tersebut terkait erat dengan permasalahan indikator kinerja. Perangkat daerah seringkali gagal dalam menentukan rumus perhitungan indikator kinerja program/kegiatan secara tepat;
2. Keterbatasan SDM personal dan sering berganti-ganti SDM yang mengampu perencanaan;



- 3. Masih didapati satuan indikator program (*outcome*) pada data evaluasi RKPD yang belum konsisten, dan untuk kemudahan penyusunan cenderung diambil pilihan untuk menggunakan satuan indikator kegiatan (output). Secara teknis kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi OPD untuk menyelesaikan daftar program dan kegiatan, meskipun secara substansi pada prakteknya menjadi kendala pada tahapan evaluasi kinerja teknis. Meskipun mekanisme pelaporan telah menerapkan aturan yang mewajibkan perangkat daerah menggunakan aplikasi SIMPPD, namun masih terjadi pelaporan yang secara substansi belum tepat, baik teknis maupun keuangan;
- 4. Perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perubahan anggaran biaya pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5. Manajemen penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi yang menerapkan teknologi sistem informasi yang belum terintegrasi;
- 6. Belum tersedia kajian khusus yang dapat diterapkan/dioperasionalkan dalam waktu dekat, khususnya yang ditujukan untuk upaya pengembangan berbagai potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bekasi, antara lain kajian pengembangan sektor ekonomi kreatif, sektor pariwisata, dan lain-lain;

Faktor penghambat capaian kinerja yang dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi, antara lain:

**1. Dinas Lingkungan Hidup**

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup;
- 2) Masyarakat Kabupaten Bekasi yang heterogen memiliki sikap yang kurang peduli terhadap lingkungan;
- 3) Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang menyebabkan rendahnya akses dan ketersediaan sumber daya untuk pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Kurangnya kompetensi personil (SDM) yang menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanganan persampahan;
- 6) Terbatasnya pendanaan dan alokasi anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta kurangnya mekanisme insentif dan disinsentif yang efektif;





- 7) Kondisi meteorologi dan cuaca ekstrim yang berdampak;
- 8) Jumlah sarana prasarana yang ada belum dapat memenuhi target pelayanan;
- 9) Dalam menjalankan program pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi belum memiliki Perda sampah yang mengatur secara keseluruhan pengolahan sampah di Kabupaten Bekasi, dimana Perda adalah kebijakan regulasi yang akan menaungi beberapa peraturan pendukung di bawahnya;
- 10) Dalam menjalankan program pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi, dalam penganggaran program Pengelolaan Sampah belum masuk menjadi prioritas, range anggaran masih 1-2% total APBD idealnya adalah 3%-5%;
- 11) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan ramah lingkungan;
- 12) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 13) Masih kurangnya kebijakan terkait pengelolaan lingkungan; dan
- 14) Masih kurangnya kebijakan terkait pemenuhan Ruang Terbuka Hijau, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan perlindungan terhadap kawasan lindung dan kawasan dengan jasa ekosistem tinggi.

## **2. Dinas Pemadam Kebakaran**

- 1) Jauhnya lokasi kejadian kebakaran dari Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran yang pada sampai saat ini baru beroperasi 7 Pos Pemadam Kebakaran selain dari kantor Pemadam Kebakaran;
- 2) Traffic Line yang sulit dikendalikan; dan
- 3) Kecilnya jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.

## **3. Dinas Perikanan**

- 1) Sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan yang belum memadai sehingga produksi yang dihasilkan belum dapat optimal;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya perikanan, berkelanjutan, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan.

## **4. Dinas Pertanian**

- 1) Wilayah kerja Kabupaten Bekasi yang luas, kurangnya sumber daya manusia pada bidang keswan dan kesmavet dalam melakukan



pengawasan serta kurangnya kesadaran pet shop dan poultry shop dalam menjual obat hewan yang tidak berizin;

- 2) Faktor eksternal(Faktor alam) adanya panas yang sangat ekstrim /El Nino terhadap komoditas hortikultura menyebabkan penurunan produksi;
- 3) El nino yg berkepanjangan sehingga petani bnyk mengalami gagal tanam pertanaman yg tdk tepat waktu karena bencana kekeringan dan belum adanya jaminan ketersediaan lahan (LP2B);
- 4) Kurang kesadaran peternak dlm mengembangkan teknologi budidaya ternakdan merebaknya penyakit pada ternak ( PMK, LSD dll);
- 5) Kurangnya sarana pendukung untuk penanganan/pengolahan pasca panen hortikultura;
- 6) Masih kurangnya kesadaran peternak akan manfaat dan keuntungan sapi yang di IB;
- 7) Cuaca yang tidak dapat diprediksi membuat petani telat mengantisipasi datangnya bencana banjir (*La Nina*) dan kekeringan (*El-Nino*), kerusakan saluran sekunder, diwilayah utara, sampah dan sedimentasi saluran sekunder serta bangunan liar (Bangli) diatas saluran sekunder di Wilayah Utara;
- 8) Perubahan waktu tanam yang terjadi akibat cuaca ekstrim dapat mendukung perkembangan OPT antara lain tikus, wereng batang cokelat (WBC), penggerek batang padi (PBP), tungro dan Bacterial Leaf Blight (BLB), serta kerdil rumput/kerdil hampa;
- 9) Luas wilayah kerja , kurangnya sumber daya manusia pada bidang keswan dan kesmavet dalam melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran dokter hewan praktek mandiri untuk membuat surat izin praktek dan lamanya proses administrasi dari organisas profesi PDHI; dan
- 10) Masih rendahnya penanganan pasca panen di tingkat petani yang menyebabkan masih tingginya tingkat susut hasil (losses).

## 5. Dinas Sosial

- 1) Keterbatasan Sumber Daya  
Keterbatasan anggaran, personel, dan teknologi dapat menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi serta pengumpulan data yang diperlukan;
- 2) Perubahan Kondisi Sosial yang Cepat



Adanya perubahan sosial yang cepat dan tidak terduga dapat membuat Renja menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan aktual;

3) **Tingkat Kompleksitas Program**

Program-program sosial yang kompleks atau terlalu rumit dapat menghambat evaluasi yang efektif dan menyulitkan pemahaman terhadap dampak yang sebenarnya;

4) **Kurangnya Data yang Akurat**

Keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat menghambat analisis yang mendalam dan memberikan gambaran yang tepat tentang kinerja program.

## **6. Dinas Kesehatan**

- 1) Belum maksimalnya peran kader kesehatan masyarakat khususnya pada pelayanan kesehatan ibu hamil sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya, terdapat ibu hamil yang bersalin bukan di fasilitas kesehatan, kurangnya kesadaran ibu balita tentang pentingnya memeriksakan balita di posyandu, kurangnya fasilitas rujukan yang mempunyai NICU untuk menangani kasus Neonatal, dan masih tingginya jumlah penderita penyakit-penyakit penyebab kematian seperti Tuberkulosis (TB) dan Hipertensi;
- 2) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah untuk upaya penurunan AKB;
- 3) Capaian pelayanan skrining kesehatan pada usia lanjut yang masih rendah;
- 4) Tidak semua balita gizi buruk mendapat PMT dikarenakan terbatasnya anggaran;
- 5) Lintas Sektor yang masih kurang berpartisipasi untuk Pendeklarasian ODF, Perilaku masyarakat yang belum mau ada perubahan untuk Stop BABS, serta ekonomi masyarakat yang belum mencukupi untuk pembuatan Jamban/WC;
- 6) Tidak semua masyarakat dapat hadir pada pembinaan sarana air minum tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran.

## **7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan program dan kegiatan tidak menemukan penghambat yang signifikan hanya saja ada perbedaan rencana awal dengan kondisi dilapangan.



## 8. Dinas Perhubungan

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik yang dilakukan dengan pihak pelaksana maupun instansi terkait, sehingga bila dipaksakan kegiatannya tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 2) Masih minimnya jumlah pegawai dinas perhubungan yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;
- 3) Sertifikasi/rekomendasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Kementerian perhubungan bagi Perusahaan yang ingin ikut dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas perhubungan menjadi kendala penyelenggaraan pelelangan; dan
- 4) Keterbatasan personal dalam Menyusun dokumen lelang, mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan dokumen.

## 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan

- 1) Terpenuhinya fasilitasi, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- 2) Terdapat Korban Bencana Tidak Memiliki Lahan Pribadi;
- 3) Meningkatnya Ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman dan Perumahan dalam kondisi baik;
- 4) Terdapat perbedaan indikator antara DPA dengan Target Capaian. Bahwa Dokumen DPA satuan jalan lingkungan menggunakan M2, sedangkan Target Capaian IKU menggunakan satuan panjang (Mtr).
- 5) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan jalan
  - a. Lokasi yang akan dibebaskan belum lengkap proses administrasinya
  - b. DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) belum lengkap dari instansi pemohon
  - c. Alas Hak atas tanah yang akan dibebaskan belum lengkap
- 6) Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Ketersediaan sanitasi  
Terdapat Desa yang sudah deklarasi Bebas ODF tetapi kondisi dilapangan masih terdapat OD.
- 7) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
  - a. Lokasi yang akan dibebaskan belum lengkap proses administrasinya
  - b. DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) belum lengkap dari instansi pemohon



- c. Alas Hak atas tanah yang akan dibebaskan belum lengkap
- 8) Meningkatnya luasan Kawasan kumuh yang tertangani
- 9) Tidak ada dukungan penangan 7 Indikator Kawasan Kumuh sebagaimana Peraturan Bupati Bekasi nomor 72 tahun 2020 Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat dan Berkah)

**10. Dinas Pendidikan**

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah dan berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Perhubungan serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan;
- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

**11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Masih kurangnya Koordinasi dengan SatgasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2) Masih kurangnya SDM para kader/peserta sekoper cinta
- 3) Kurangnya sinergitas serta kesadaran dari warga dan masing-masing perangkat daerah di lokasi P2WKSS bahwa P2WKSS bukan hanya untuk menjadi juara saja tetapi juga untuk meningkatkan pembangunan Desa terutama dalam aspek ekonomi
- 4) Belum adanya aplikasi data terpadu tentang laporan korban kekerasan padaperempuan dan anak

**12. DPMPTSP**

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Terbatasnya ketersediaan anggaran yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan; dan
- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

**13. Satpol PP**

- 1) Beberapa pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan mengalami keterlambatan pada tahap awal pelaksanaan sehingga berdampak pada schedule tahapan pelaksanaan selanjutnya;



- 2) Perlunya percepatan administrasi penunjang pencairan anggaran agar proses pelaksanaan subkegiatan dapat tetap berjalan normal;
- 3) Faktor kemampuan belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena aparat Satpol PP untuk anggota memiliki tingkat pendidikan SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD dan belum maksimal dalam mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya;
- 4) Faktor sarana dan prasarana belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena sarana dan prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional lapangan yang digunakan masih sangat terbatas, demikian juga dengan fasilitas lainnya seperti komputer, printer, meja biro, kursi pejabat struktural dan kursi pegawai masih kurang;
- 5) Faktor Sumber Daya Manusia yang belum memadai, untuk Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai dengan jumlah yang hanya 65 orang PNS.

#### **14. Dinas Perdagangan**

- 1) Tidak stabilnya kondisi politik dunia misalnya adanya perang Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina yang menyebabkan terganggunya rantai dagang internasional termasuk ekspor dari Indonesia;
- 2) Fluktuasi ekonomi; dan
- 3) Tidak ada lagi kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota

#### **15. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1) Implementasi diseminasi hasil kajian yang tidak menjadi dasar kebijakan yang berbasis hasil penelitian dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah mitra kerja Balitbangda;
- 2) Partisipasi Stakeholders (Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Desa, Universitas dan Sekolah) berkomitmen dalam pengembangan inovasi daerah;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pengembangan inovasi daerah kepada Stakeholder secara berkala dan sistematis.

#### **16. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

- 1) Perlu penyesuaian antara substansi revisi RTRW Kab. Bekasi dengan RTRW Prov Jawa Barat yang membutuhkan tahapan dan waktu sampai



sesuai, Adatahapan berikutnya yang harus di tempuh untuk proses revisi RTRW Kabupaten Bekasi yaitu permohonan persetujuan substansi dan pembahasan lintas sektor kementrian / lembaga dan pembahasan Ranperkada dengan DPRD Kabupaten;

- 2) Masa berlaku sumber data penyusunan peta maksimal 2 tahun (Peningkatan Peran Serta Masyarakat);
- 3) Belum diketahui pengaruh / impact sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat terhadap tata ruang;
- 4) Sistem OSS RBA dan GISTARU yang baru sehingga masih banyak pemohon yang belum memahami proses di ke -2 sistem tersebut. Hal ini mengakibatkan proses validasi yang lama karena membutuhkan klarifikasi dari pemohon;
- 5) Banyak pelaku usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi Pemanfaatan Ruang Blok Plan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga proses pengesahan blok plan menjadi lama;
- 6) Kurangnya pemahaman pemilik bangunan bahwa untuk memanfaatkan bangunan harus memiliki SLF;
- 7) Kurangnya pemahaman pemilik bangunan bahwa sebelum membangun harus memiliki PBG.

## **17. Dinas Arsip dan Perpustakaan**

### **A. Urusan Perpustakaan**

1. Masih terbatasnya pengadaan buku-buku dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang sehingga pada pelaksanaan kegiatan kurang berjalan optimal;
2. Secara umum penghambat peningkatan kunjungan terbagi menjadi dua faktor yaitu keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak dapat terakomodasinya permintaan layanan perpustakaan keliling dari masyarakat selama 1 tahun berjalan; dan
3. Belum terjangkaunya data terkait perpustakaan yang dikelola oleh lembaga atau instansi baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bekasi.

### **B. Urusan Kearsipan**

1. Anggaran kurang memadai;



- 2. Terbatasnya sumber daya manusia kearsipan yang dimiliki oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengolahan arsip di Kabupaten Bekasi;
- 3. Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Arsip Dinamis kepada Perangkat Daerah, masih terdapat kendala berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (Pengelola Arsip) dan Sarana dan prasarana pengelolaan arsip dinamis di Perangkat Daerah; dan
- 4. Pemahaman terkait kearsipan yang masih kurang di kalangan Pegawai Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

**18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1. Kondisi Sistem Merit Kabupaten Bekasi yang masih Predikat Baik;
- 2. Belum optimalnya Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja dan disiplin;
- 3. Belum optimalnya Sistem penilaian kinerja;
- 4. Upaya pembinaan aparatur belum optimal;
- 5. Masih kurangnya kesadaran ASN untuk mengembangkan kompetensinya;
- 6. Pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional belum optimal; dan
- 7. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

**19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 1) Kurangnya jumlah SDM (sumber daya Manusia) dalam penanganan bencana;
- 2) Kurangnya koordinasi dalam unsur pentahelik;
- 3) Belum maksimalnya diimplementasikan regulasi yang dibuat; dan
- 4) Masih belum maksimalnya kegiatan yang berbasis digitalisasi/aplikasi.

**20. Sekretariat DPRD**

- 1) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- 2) Ketidakpastian jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD;
- 3) Keterbatasan tenaga ahli atau pakar dalam penyusunan perundang-undangan;
- 4) Tingginya kegiatan anggota dan pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan legislatif sehingga diperlukan pendampingan secara intensif dengan para anggota dan pimpinan perwakilan rakyat dalam melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan; dan





- 5) Tidak adanya usulan Perda inisiatif dari masing-masing komisi dan terjadinya ketidakpahaman terhadap tugas, pokok, dan fungsi serta kebijakan yang belum optimal sehingga berdampak pada pembiasan tanggungjawab.

**21. Kecamatan Babelan**

- 1) Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah dan belum sesuai dengan beban tugas;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaianprogram dan kegiatan; dan
- 3) Kuantitas Sumber Daya Aparatur pelayanan publik yang belum memadai.

**22. Kecamatan Cikarang Barat**

- 1) Samarnya tujuan dan kebijakan dari perangkat daerah;
- 2) Kurangnya dukungan dari para penerima kebijakan;
- 3) Adanya ketidakselarasan waktu dalam program dan kegiatan yang direncanakan dengan pelaksanaannya; dan
- 4) Adanya sumber daya manusia yang kurang memadai.

**23. Kecamatan Sukawangi**

- 1) Samarnya tujuan dan kebijakan dari perangkat daerah;
- 2) Kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu;
- 3) Kurangnya dukungan dari para penerima kebijakan; dan
- 4) Kurangnya pengembangan sumber daya yang ada.

**4.2 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN RKPD BERIKUTNYA**

Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV tahun 2024, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada RKPD berikutnya adalah sebagai berikut :

- 1. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, dipandang perlu untuk menyelaraskan kembali cakupan program berikut target dan indikator capaian program (*outcome*) dengan sasaran misi yang ditetapkan dalam RPD (target dan indikator capaian sasaran misi) sebagai pedoman bagi PD dalam menyelaraskan indikator dan target capian kinerja program dan kegiatan dalam Renstra/Renja-nya;
- 2. Perbedaan penerapan indikator (*outcome*) pada program yang mempunyai cakupan kegiatan (dan sub kegiatan) yang sama masih menjadi kendala dalam proses identifikasi dan evaluasi capaian kinerja program yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa evaluasi Renstra/Renja oleh masing-masing



perangkat daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki/melengkapi data-data yang belum sesuai. Evaluasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong terlaksananya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja pelaksanaan programnya;

3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran program RPD ke dalam RKPD dan penjabarannya melalui APBD diharapkan dapat terjaga, untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan pada periode pembangunan berikutnya;
4. Mengkaji kembali keselarasan program prioritas maupun program rutin PD termasuk ketersediaan anggarannya dalam upaya mendukung percepatan pencapaian target kinerja sasaran RPD 2023-2026, baik pada tahun berjalan (2024) maupun untuk menunjang penyusunan rencana pada tahun terakhir (2026);
5. Merumuskan perencanaan Anggaran Kas yang terstruktur besarannya di Triwulan I s.d Triwulan IV sehingga proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar dapat diselesaikan di Triwulan IV;
6. Merumuskan suatu inovasi atau terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi di segala bidang;
7. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang;
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi agar pembangunan yang di tuju tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat;
9. Merumuskan strategi-strategi pembiayaan dan pendanaan pembangunan sesuai aturan berlaku, yang bisa melibatkan sektor swasta / perusahaan untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi;
10. Tindak lanjut koordinasi secara intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan yang berdasarkan diseminasi hasil kajian etiap kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif maka Masyarakat;
11. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periodemendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan; dan
12. Mempersiapkan perencanaan keberlanjutan untuk memastikan bahwa keberhasilan yang dicapai dapat dipertahankan dalam jangka panjang.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**5.1 KESIMPULAN**

Selama pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun anggaran 2024, berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan program seluruh perangkat daerah sampai dengan akhir Triwulan IV/2024, hasil evaluasi secara umum menunjukkan **rerata capaian kinerja fisik “sangat tinggi” (93,26%) dan rerata kinerja penyerapan anggaran “sangat tinggi” (90,74%)**.

Berdasarkan kondisi diatas dapat diketahui bahwa rerata capaian kinerja fisik lebih tinggi dari capaian kinerja penyerapan anggaran dimana capaian fisik lebih tinggi sebesar 1,47% dari capaian kinerja penyerapan anggaran. Capaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran tersebut mengalami kenaikan pesat pada Triwulan IV jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan pada masing-masing perangkat daerah yang masih dalam proses pada triwulan sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

**5.2 REKOMENDASI**

Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD berikutnya kiranya diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam cakupan memaksimalkan upaya dalam rangka pencapaian target sesuai indikator yang ditetapkan maupun dalam cakupan perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi untuk penyusunan RKPD periode selanjutnya, antara lain:

1. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah (RKPD) untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RKPD) yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan berpedoman/mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan, perencanaan program dan kegiatan agar lebih akurat dan pendanaan yang tepat, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan oleh perangkat daerah secara berkesinambungan, pembinaan kepada pegawai, serta perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran selanjutnya;



3. Menyelaraskan program prioritas maupun program PD termasuk ketersediaan anggarannya untuk mendukung percepatan pencapaian target kinerja sasaran RPD 2023-2026;
4. Optimalisasi pengelolaan data-data pembangunan yang didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya, baik dalam cakupan internal Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun eksternal (SIPD, Satu Data, dll);
5. Optimalisasi koordinasi dan konsultasi lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya dalam menjabarkan arah kebijakan umum yang harus diterjemahkan oleh PD ke dalam Renstra/Renja PD, untuk menunjang pencapaian target kinerja sasaran RPD 2023-2026;
6. Menyusun timeline pelaksanaan kegiatan atau ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan dan tercapai sesuai dengan target.

